

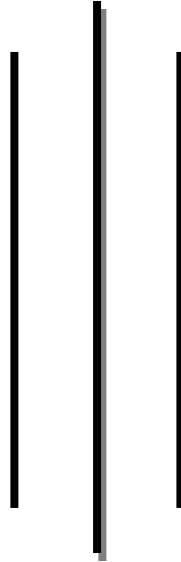
**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2023**



**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



KATA PENGANTAR

**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang merupakan amanat konstitusional telah dapat disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan Laporan Hasil Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2023 yang memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, tugas pembantuan, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Target sasaran pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah di laksanakan dan disesuaikan dengan besaran belanja daerah.

Kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah atasan dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dan melakukan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kinerja ke depan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini disampaikan kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara, dengan memohon ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kiranya senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam melanjutkan cita-cita masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lubuk Pakam, 26-03-2024



BUPATI DELI SERDANG

ALYUSUF SIREGAR

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



DAFTAR ISI

**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	viii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.1.1 Penjelasan Umum	I - 1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	I - 1
b. Data Geografis Wilayah	I - 2
c. Jumlah penduduk	I - 3
d. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan.....	I - 5
e. Jumlah Perangkat Daerah,Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintahan	I- 6
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I- 9
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I - 30
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I - 37
b. Visi dan Misi Kepala daerah	I - 38
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah	I - 43
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen Perencanaan tahunan.....	I - 48
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 77
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II - 1
A. Capaian Kinerja Makro.....	II - 1
B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II - 3
1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II - 4
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II - 47
3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	II - 73
C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II - 78
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III - 1
A. Tugas Pembantuan	III - 1
B. Hambatan dan Permasalahan	III - 2
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV - 1
A. Urusan Pendidikan	IV - 1
B. Urusan Kesehatan	IV - 18
C. Urusan Pekerjaan Umum	IV - 41
D. Urusan Perumahan Rakyat	IV - 55
E. Urusan Trantibumlinmas	IV - 61
F. Urusan Sosial	IV - 85
BAB V PENUTUP	V - 1

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



DAFTAR TABEL

**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	I -	4
Tabel 1.2	Banyaknya Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin	I -	4
Tabel 1.3	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Deli Serdang	I -	5
Tabel 1.4	Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin	I -	7
Tabel 1.5	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 s.d.Tahun 2023	I -	11
Tabel 1.6	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli serdang Tahun 2023	I -	14
Tabel 1.7	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2023	I -	16
Tabel 1.8	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaen Deli Serdang Tahun 2023	I -	19
Tabel 1.9	Target dan Realisasi Bagian Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Tahun 2023	I -	29
Tabel 1.10	Target dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023	I -	31
Tabel 1.11	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer dan Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2023	I -	33
Tabel 1.12	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 dan 2023	I -	36
Tabel 1.13	Rencana Program Prioritas Kabupaten Deli Serdang	I -	43
Tabel 1.14	Dukungan RKPD Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023	I -	76
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Makro	II-	2
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-	4
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-	47
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	II-	73
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Kab.Deli Serdang 2019 - 2024	II.	80
Tabel 2.6	Target Kinerja	II-	81
Tabel 2.7	Skala Pengukuran Capaian Kinerja	II-	83
Tabel 2.8	Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	II-	84
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Sasaran 1	II-	87
Tabel 2.10	Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara Tahun 2023	II-	89
Tabel 2.11	Rata – Rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten	II-	91

dan Kota Sumatera Utara Tahun 2023

Tabel 2.12	Capaian Kinerja Sasaran 2	II-	93
Tabel 2.13	Umur Harapan Hidup Kabupaten dan Kota Sumatera Utara Tahun 2023	II-	95
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Sasaran 3	II-	96
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Sasaran 4	II-	99
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Sasaran 5	II-	101
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Sasaran 6	II-	104
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Sasaran 7	II-	106
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Sasaran 8	II-	112
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Sasaran 9	II-	113
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Sasaran 10	II-	115
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Sasaran 11	II-	120
Tabel 2.23	Capaian Sasaran 1 dengan Target P-RPJMD	II-	123
Tabel 2.24	Capaian Sasaran 2 dengan Target P-RPJMD	II-	124
Tabel 2.25	Capaian Sasaran 3 dengan Target P-RPJMD	II-	125
Tabel 2.26	Capaian Sasaran 4 dengan Target P-RPJMD	II-	126
Tabel 2.27	Capaian Sasaran 5 dengan Target P-RPJMD	II-	127
Tabel 2.28	Capaian Sasaran 6 dengan Target P-RPJMD	II-	128
Tabel 2.29	Capaian Sasaran 7 dengan Target P-RPJMD	II-	130
Tabel 2.30	Capaian Sasaran 8 dengan Target P-RPJMD	II-	131
Tabel 2.31	Capaian Sasaran 9 Terhadap Target RPJMD	II-	131
Tabel 2.32	Capaian Sasaran 10 Terhadap Target RPJMD	II-	132
Tabel 2.33	Capaian Sasaran 11 Terhadap Target RPJMD	II-	133
Tabel 2.34	Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	II-	134
Tabel 2.35	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	II-	135
Tabel 4.1	Target Capaian SPM Dinas Pendidikan	IV-	1
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2022	IV-	2
Tabel 4.3	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	IV-	12
Tabel 4.4	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Berdasarkan Jabatan	IV-	12
Tabel 4.5	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	13
Tabel 4.6	Penerima Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	IV-	19
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023	IV-	20
Tabel 4.8	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	IV-	22
Tabel 4.9	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	23

Tabel 4.10	Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	IV-	33
Tabel 4.11	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	IV-	42
Tabel 4.12	Alokasi Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023	IV-	43
Tabel 4.13	Komposisi Personil Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023	VI-	49
Tabel 4.14	Komposisi Personil Berdasarkan Golongan Tahun 2023	VI-	49
Tabel 4.15	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	50
Tabel 4.16	Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-	56
Tabel 4.17	Alokasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023	IV-	56
Tabel 4.18	Kualifikasi Pendidikan Personil	IV-	58
Tabel 4.19	Pangkat dan Golongan Personil	IV-	58
Tabel 4.20	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	59
Tabel 4.21	Target Pencapaian SPM dan Perangkat Daerah yang Menangani	IV-	62
Tabel 4.22	Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	IV-	63
Tabel 4.23	Alokasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV-	65
Tabel 4.24	Alokasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	IV-	69
Tabel 4.25	Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pendidikan	IV-	73
Tabel 4.26	Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan	IV-	73
Tabel 4.27	Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Pendidikan	IV-	74
Tabel 4.28	Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Jabatan	IV-	75
Tabel 4.29	Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Golongan	IV-	75
Tabel 4.30	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	76
Tabel 4.31	Permasalahan dan Solusi Penerapan	IV-	81
Tabel 4.32	Permasalahan dan Solusi Penerapan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	IV-	84
Tabel 4.33	Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023	IV-	85
Tabel 4.34	Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM	IV-	87
Tabel 4.35	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2022	IV-	89
Tabel 4.36	Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional	IV-	89
Tabel 4.37	Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan	IV-	89
Tabel 4.38	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	92

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Rata-rata Lama Sekolah 2021-2023	II -	90
Grafik 2.2	Umur Harapan Hidup Kab.Deli Serdang Tahun 2021 s/d 2023	II-	94
Grafik 2.3	Nilai PDRB (ADHB) 2021 s/d 2023	II -	97
Grafik 2.4	Nilai Realisasi PMDN Tahun 2021-2023	II -	100
Grafik 2.5	Nilai Realisasi PMA Tahun 2021-2023	II -	100
Grafik 2.6	Persentase Kemiskinan 2020 s/d 2022	II -	102
Grafik 2.7	Jalan Dalam Kondisi Baik 2021 s/d 2023	II -	105
Grafik 2.8	Irigasi Dalam Kondisi Baik 2020 s/d 2022	II -	106

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

BAB I

PENDAHULUAN



**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TAHUN 2023

B A B I

PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”* Selanjutnya pada Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa LPPD disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sejak tahun 2020, penyusunan LPPD dan Ringkasan LPPD serta pelaksanaan EPPD mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran serta penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal selama tahun 2023 yang kesesuaian materinya disusun berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan mampu memberikan gambaran keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan.

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

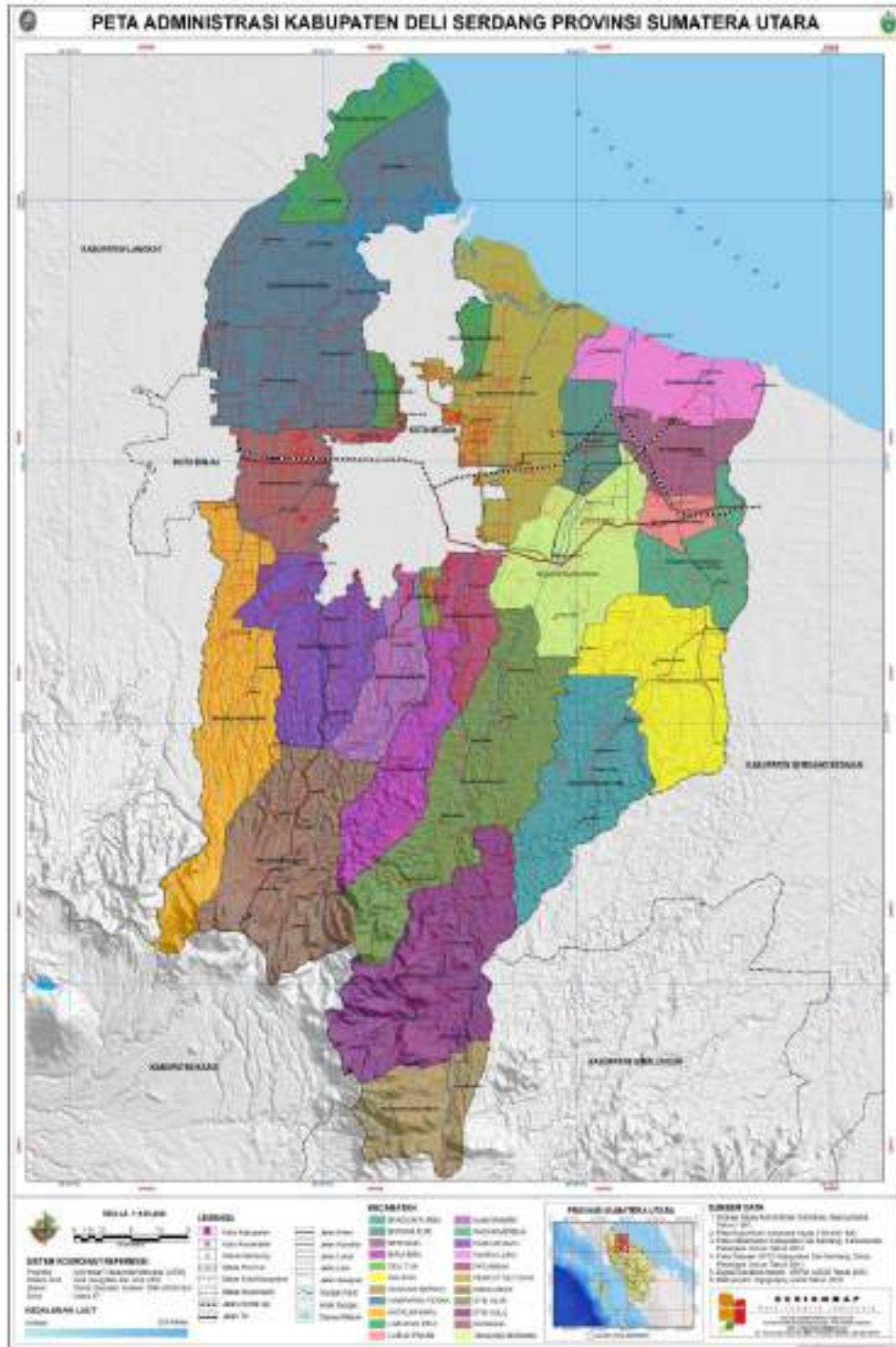
Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan Kesultanan Deli dan Serdang. Kesultanan Deli berkedudukan di Medan dan Kesultanan Serdang berkedudukan di Perbaungan. Kedua wilayah tersebut dalam masa penjajahan merupakan Karesidenan Sumatera Timur. Sejak proklamasi, kekuasaan kesultanan berakhir dan struktur pemerintahan disesuaikan dengan Pemerintah Indonesia dan Kesultanan Deli dan Serdang dijadikan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Pembentukan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092). Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1984, ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986. Seiring dengan gerak roda pembangunan yang terus melaju diciptakan motto bagi daerah Deli Serdang yaitu : “BHINNEKA PERKASA JAYA” yang tercantum di pita lambang Daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam pengertian “Dengan masyarakatnya yang beraneka ragam Suku, Agama, Ras dan Golongan bersatu dalam ke Bhinnekaan secara kekeluargaan dan gotong royong membangun semangat kebersamaan, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya sehingga menjadi kekuatan dan keperkasaan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan, maju, mandiri dan jaya sepanjang masa.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Deli Serdang terletak pada titik koordinat 2^o57' sampai dengan 3^o16' Lintang Utara, dan 98^o33' sampai dengan 99^o27' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut. Batas – batas administrasi Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Binjai, Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.



c. Jumlah Penduduk

Populasi penduduk di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari berbagai jenis etnis dan suku bangsa yang tersebar di 22 kecamatan. Penduduk Kabupaten Deli Serdang berdasarkan DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester II tahun 2023 berjumlah 2.031.022 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.018.784 jiwa dan perempuan 1.012.238 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jlh Penduduk
1	Gunung Meriah	1.495	1.607	3.102
2	Tanjung Morawa	119.746	118.354	238.100
3	Sibolangit	10.534	10.979	21.513
4	Kutalimbaru	19.499	20.240	39.379
5	Pancurbatu	49.016	49.975	98.991
6	Namo Rambe	20.728	21.063	41.791
7	Biru-Biru	20.202	20.257	40.459
8	STM Hilir	17.367	17.527	34.894
9	Bangun Purba	12.716	12.807	25.523
10	Galang	37.415	37.051	74.466
11	STM Hulu	7.327	7.522	14.849
12	Patumbak	52.328	51.502	103.830
13	Deli Tua	30.596	30.365	60.961
14	Sunggal	124.546	125.012	249.558
15	Hamparan Perak	89.468	86.808	176.276
16	Labuhan Deli	34.432	33.521	67.953
17	Percut Sei Tuan	207.748	205.228	412.976
18	Batang Kuis	36.390	35.666	72.056
19	Lubuk Pakam	45.801	46.764	92.565
20	Pagar Merbau	21.212	21.136	42.348
21	Pantai Labu	27.086	26.028	53.114
22	Beringin	33.132	32.826	65.958
Jumlah		1.018.784	1.012.238	2.031.022

Sumber Data: DKB Semester 2 - Dinas Dukcapil Kab. Deli Serdang 2023

Komposisi penduduk Kabupaten Deli Serdang berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Banyaknya Penduduk menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

No	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan
1	0 – 5 Tahun	84.414	78.146
2	6 – 10 Tahun	99.443	92.757
3	11 - 15 Tahun	103.701	96.655
4	16 – 20 Tahun	68.427	67.014
5	21 – 25 Tahun	90.129	87.483
6	26 – 30 Tahun	85.978	83.409
7	31 – 35 Tahun	81.035	77.233
8	36 – 40 Tahun	79.192	77.482
9	41 -45 Tahun	77.785	78.290
10	46 – 50 Tahun	64.168	67.042

11	51 – 55 Tahun	57.925	62.211
12	56 – 60 Tahun	44.431	48.800
13	61 – 65 Tahun	35.245	39.215
14	66 – 70 Tahun	23.395	25.759
15	71 – 75 Tahun	12.819	14.811
16	≥76 Tahun	10.464	15.931

Sumber Data: DKB Semester 2 - Dinas Dukcapil Kab. Deli Serdang 2023

Komposisi penduduk Kabupaten Deli Serdang berdasarkan banyaknya penduduk menurut agama per desa/kelurahan :

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan (untuk Kabupaten/Kota)

Wilayah Kabupaten Deli Serdang seluas 2.497,72 km², secara administratif Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan.

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Administrasi
Kabupaten Deli Serdang

KECAMATAN	JUMLAH	
	DESA	KELURAHAN
1. Gunung Meriah	12	--
2. STM Hulu	20	--
3. Sibolangit	30	--
4. Kutalimbaru	14	--
5. Pancur Batu	25	--
6. Namo Rambe	36	--
7. Biru-biru	17	--
8. STM Hilir	15	--
9. Bangun Purba	24	--
10. Galang	28	1
11. Tanjung Morawa	25	1
12. Patumbak	8	--
13. Deli Tua	3	3
14. Sunggal	17	--
15. Hamparan Perak	20	--
16. Labuhan Deli	5	--
17. Percut Sei Tuan	18	2
18. Batang Kuis	11	--
19. Pantai Labu	19	--
20. Beringin	11	--
21. Lubuk Pakam	6	7
22. Pagar Merbau	16	--
Jumlah	380	14

Sumber Data: Bag. Tata Pemerintahan Setdakab Deli Serdang

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah adalah Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui Urusan Konkuren yang terdiri dari Ringkasan Urusan Wajib dan Ringkasan Urusan Pilihan, serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 24 Urusan Wajib dan 5 Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 061 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari Sekretariat Daerah dengan 10 (sepuluh) bagian, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas sebanyak 23 dinas, kecamatan sebanyak 22 (dua puluh dua) dan unsur penunjang lainnya sebanyak 7 OPD. Dinas daerah di Kabupaten Deli Serdang sebagai pelaksana teknis urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan terdiri dari 23 dinas yakni:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Sosial.
8. Dinas Ketenagakerjaan.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian
23. Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sedangkan unsur penunjang daerah lainnya yakni terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Deli Serdang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan UPT RSUD H. Amri Tambunan. Perangkat daerah didukung dengan sejumlah personil baik yang berasal dari PNS dan non PNS. Jumlah PNS di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Informasi Kepegawaian per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 9.780 personil. Jumlah perangkat daerah dan jumlah pegawai pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
1	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	11	7	4
2	Sekretariat Daerah	117	63	54
3	Staf Ahli Bupati Deli Serdang	8	8	0
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29	15	14
5	Inspektorat	76	48	28
6	Dinas Pendidikan	5.020	1.178	3.842
7	Dinas Kesehatan	2.368	198	2.170
8	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H. Amri Tambunan	281	51	230
9	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	98	70	28
10	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	37	28	9
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	39	28	11

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
12	Satuan Polisi Pamong Praja	67	57	10
13	Dinas Sosial	26	10	16
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	50	7	43
15	Dinas Ketahanan Pangan	30	12	18
16	Dinas Lingkungan Hidup	31	13	18
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47	27	20
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38	22	16
19	Dinas Perhubungan	41	37	4
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25	9	16
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	39	17	22
21	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	30	15	15
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	30	10	20
23	Dinas Perikanan	30	14	16
24	Dinas Pertanian	154	72	82
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84	31	53
26	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian	31	17	14
27	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	51	48	3
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	33	13	20
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40	18	22
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	44	16	28
31	Badan Pendapatan Daerah	102	49	53
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43	35	8
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	12	1
34	Kantor Camat STM Hulu	13	12	1
35	Kantor Camat STM Hilir	24	14	10
36	Kantor Camat Pantai Labu	21	17	4
37	Kantor Camat Beringin	17	10	7

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
38	Kantor Camat Bangun Purba	13	10	3
39	Kantor Camat Pagar Merbau	16	12	4
40	Kantor Camat Galang	31	20	11
41	Kantor Camat Lubuk Pakam	72	42	30
42	Kantor Camat Tanjung Morawa	29	17	12
43	Kantor Camat Batang Kuis	18	11	7
44	Kantor Camat Hamparan Perak	23	15	8
45	Kantor Camat Sunggal	36	15	21
46	Kantor Camat Labuhan Deli	27	11	16
47	Kantor Camat Percut Sei Tuan	47	26	21
48	Kantor Camat Sibolangit	32	24	8
49	Kantor Camat Pancur Batu	34	11	23
50	Kantor Camat Deli Tua	44	20	24
51	Kantor Camat Namorambe	21	12	9
52	Kantor Camat Patumbak	18	12	6
53	Kantor Camat Biru-Biru	19	11	8
54	Kantor Camat Kutalimbaru	21	13	8
55	Kantor Camat Gunung Meriah	11	6	5
T O T A L		9.780	2.609	7.171

Sumber data: BKPSDM Kab. Deli Serdang per 31 Desember 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu masa tahun anggaran tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

Penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran atau output dan hasil atau outcome dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang berikut merupakan data sementara sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

1) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Jumlah Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 sesuai APBD Tahun 2023 adalah Rp. 4.329.752.442.663 berubah menjadi Rp. 4.401.020.036.873,00 pada PAPBD Tahun 2023. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 3.853.330.105.887,03 atau 87,56% dari yang ditargetkan pada PAPBD dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2022 s.d. Tahun 2023

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
	Pajak Daerah	1.201.597.247.055,00	767.658.224.719,40	63,89	1.268.083.193.305,00	797.734.218.178,00	62,91
	Retribusi Daerah	109.625.530.700,00	29.221.518.926,00	26,66	107.838.378.704,00	43.129.679.515,00	39,99
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	21.867.488.711,00	21.867.488.711,00	100,00	19.681.368.926,00	19.681.368.926,00	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	171.874.097.366,00	222.985.437.831,81	129,74	196.068.743.376,00	189.257.261.768,03	96,53
JUMLAH		1.504.964.363.832,00	1.041.732.670.188,21	69,22	1.591.671.684.311,00	1.049.802.528.387,03	65,96
2.	DANA PERIMBANGAN						
	Dana Bagi Hasil (DBH)	72.236.417.000,00	123.584.262.879,00	171,08	60.634.483.000,00	70.132.681.000,00	115,66
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.352.573.416.000,00	1.348.515.058.970,00	99,70	1.490.378.523.000,00	1.507.732.049.770,00	101,16
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	693.357.636.000,00	630.872.162.655,00	90,99	641.814.985.000,00	610.403.014.618,00	95,11
JUMLAH		2.118.167.469.000,00	2.102.971.484.504,00	99,28	2.192.827.991.000,00	2.188.267.745.388,00	99,79
3.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA						
	DID (Insentif Fiskal)	-	-	0,00	11.679.399.000,00	11.679.399.000,00	100,00
	Dana Desa	323.958.125.000,00	323.862.404.000,00	99,97	348.484.064.000,00	347.737.140.900,00	99,79

	JUMLAH	323.958.125.000,00	323.862.404.000,00	99,97	360.163.463.000,00	359.416.539.900,00	99,79
4.	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH						
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	232.063.094.087,00	260.828.890.656,00	112,40	256.356.898.562,00	255.843.292.212,00	99,80
	JUMLAH	232.063.094.087,00	260.828.890.656,00	112,40	256.356.898.562,00	255.843.292.212,00	99,80
5.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	Pendapatan Hibah	-	1.623.000.000,00		-	-	
	JUMLAH	-	1.623.000.000,00		-	-	
	TOTAL	4.179.153.051.919,00	3.731.018.449.348,21	89,28	4.401.020.036.873,00	3.853.330.105.887,03	87,56

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (Data setelah Audit BPK)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp. 1.049.802.528.387,03 atau 65,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.591.671.684.311,00. Meskipun secara keseluruhan penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 kurang dari target yang ditetapkan, namun nilai tersebut mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2022.

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan adalah sebesar 27,24%, Adapun perincian pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 tersaji pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
	Pajak Daerah	1.201.597.247.055,00	767.658.224.719,40	63,89	1.268.083.193.305,00	797.734.218.178,00	62,91
	Retribusi Daerah	109.625.530.700,00	29.221.518.926,00	26,66	107.838.378.704,00	43.129.679.515,00	39,99
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	21.867.488.711,00	21.867.488.711,00	100,00	19.681.368.926,00	19.681.368.926,00	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	171.874.097.366,00	222.985.437.831,81	129,74	196.068.743.376,00	189.257.261.768,03	96,53
JUMLAH		1.504.964.363.832,00	1.041.732.670.188,21	69,22	1.591.671.684.311,00	1.049.802.528.387,03	65,96

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

(1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak (WP) kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terdiri dari berbagai komponen sebagai berikut:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- Pajak Parkir
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Air Tanah
- Pajak PBB Pedesaan/Perkotaan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk TA. 2022 dan 2023 disajikan pada tabel 1.7 berikut:

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	8.247.975.000,00	5.997.886.543,00	72,72	10.000.000.000,00	9.093.789.233,00	90,94
2	Pajak Restoran	38.750.000.000,00	35.612.706.786,00	91,90	49.142.500.000,00	43.622.306.334,00	88,77
3	Pajak Hiburan	5.200.000.000,00	6.231.245.474,00	119,83	9.980.000.000,00	8.320.462.550,00	83,37
4	Pajak Reklame	17.500.000.000,00	11.283.642.306,00	64,48	20.125.000.000,00	11.364.920.136,00	56,47
5	Pajak Penerangan Jalan	295.105.000.000,00	203.334.563.003,00	68,90	295.000.000.000,00	213.042.327.681,00	72,22
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000.000,00	1.042.473.810,00	3,47	16.000.000.000,00	2.564.438.695,00	16,03
7	Pajak Parkir	13.000.000.000,00	6.645.503.456,00	51,12	18.345.000.000,00	11.309.022.817,00	61,65
8	Pajak Sarang Burung	75.000.000,00	10.600.000,00	14,13	3.086.250.000,00	7.100.000,00	0,23
9	Pajak Air Tanah	18.000.000.000,00	22.128.115.376,40	122,93	20.700.000.000,00	10.579.516.910,00	51,11
10	Pajak PBB Perdesaan/Perkotaan	507.219.272.055,00	217.199.292.039,00	42,82	565.704.443.305,00	220.558.219.773,00	38,99
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	268.500.000.000,00	258.172.195.926,00	96,15	260.000.000.000,00	267.272.114.049,00	102,80
Jumlah		1.201.597.247.055,00	767.658.224.719,40	63,89	1.268.083.193.305,00	797.734.218.178,00	62,91

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

Target Pajak daerah pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 1.268.083.193.305,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 797.734.218.178,00 atau 62,91 %. Sebagaimana tabel 1.7 rincian Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel dari target Rp. 10.000.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 9.093.789.233,00 atau sebesar 90,94 % dari target.
- 2) Pajak Restoran dari target Rp. 49.142.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 43.622.306.334,00 atau sebesar 88,77 % dari target.
- 3) Pajak Hiburan dari target Rp. 9.980.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 8.320.462.550,00 atau sebesar 83,37 % dari target.
- 4) Pajak Reklame dari target Rp. 20.125.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 11.364.920.136,00 atau sebesar 56,47 % dari target.
- 5) Pajak Penerangan Jalan dari target Rp. 295.000.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 213.042.327.681,00 atau sebesar 72,22% dari target.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target Rp. 16.000.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.564.438.695,00 atau sebesar 16,03 % dari target.
- 7) Pajak Parkir dari target Rp. 18.345.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 11.309.022.817,00 atau sebesar 61,65 % dari target.
- 8) Pajak Sarang Burung dari target Rp. 3.086.250.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 7.100.000,00 atau sebesar 0,23% dari target.
- 9) Pajak Air Tanah dari target Rp. 20.700.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 10.579.516.910,00 atau sebesar 51,11% dari target.
- 10) Pajak PBB Perdesaan/Perkotaan dari target Rp. 565.704.443.305,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 220.558.219.773,00 atau sebesar 38,99% dari target.
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target Rp. 260.000.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 267.272.114.049,00 atau sebesar 102,80% dari target.

(2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelolaan pendapatan retribusi daerah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 2 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012. Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD. Jenis pendapatan retribusi yang dikelola pada TA 2023 meliputi (sesuai yang diatur dalam UU dan Perda):

- a. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. Retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir; dan
- c. Retribusi perijinan tertentu yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk TA. 2022 dan 2023 disajikan pada tabel 1.8 berikut:

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
I	Retribusi Daerah						
	DINAS KESEHATAN						
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	5.475.170.700,00	1.379.923.702,00	25,20	5.495.170.700,00	654.918.547,00	11,92
2	Ret. Jasa Pemakaian ruangan	20.000.000,00	0	0			
	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI						
1	Ret pemakaian kekayaan daerah pemakaian Ruangan	0	0	0			
2	Ret. Pemakaian Alat	180.000.000,00	197.972.589,00	109,98	200.000.000,00	425.040.468,00	212,52
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEKUKIMAN SERTA PERTANAHAN						
1	Retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran	0	0	0			
2	Retribusi penyediaan atau peyedotan kakus	0	0	0			
3	Retribusi izin mendirikan bangunan	0	0	0			
	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG						

1	Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	105.000.000,00	125.000.000,00	119,05	150.000.000,00	156.000.000,00	104,00
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	250.000.000,00	285.763.000,00	114,31	440.000.000,00	338.368.500,00	76,90
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
1	Ret Pemakaian kekayaan daerah pemakaian laboratorium	200.000.000,00	161.067.500,00	80,53	210.000.000,00	181.442.750,00	86,40
	DINAS PERHUBUNGAN						
2	Ret Pengujian Kendaraan Bermotor	2.050.000.000,00	1.895.315.000,00	92,45	2.035.635.500,00	707.183.000,00	34,74
3	Ret Terminal	621.450.000,00	187.674.000,00	30,20	647.710.000,00	106.010.000,00	16,37
4	Ret tempat Kusus Parkir	120.000.000,00	143.405.000,00	119,50	150.000.000,00	167.540.000,00	111,69
5	Ret Ijin trayek	11.660.000,00	595.000,00	5,10	15.000.000,00		0,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0,00	0,00	0			
	Ret. Persetujuan Bangunan Gedung	90.375.500.000	17.449.911.000	19,31	87.000.000.000	33.532.142.500,00	38,54
	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA						

	Ret PelayananTempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00	18.009.000,00	30,02	72.000.000,00	22.945.000,00	31,87
	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH						
1	Ret Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	14.450.000,00	9,63	250.000.000,00	292.850.000,00	117,14
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						
1	Ret Menara Telekomunikasi	3.200.000.000,00	2.569.406.000,00	80,29	3.311.175.000,00	1.632.806.000,00	49,31
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
2	Ret tera ulang	264.000.000,00	264.041.560,00	100,02	270.600.000,00	270.628.990,00	100,01
3	Ret pelayanan persampahan/kebersihan	500.000.000,00	254.853.400,00	50,97	594.780.000,00	261.237.878,00	43,92
4	Ret pelayanan pasar	2.000.000.000,00	1.453.660.000,00	72,68	2.150.000.000,00	1.424.777.428,00	66,27
5	Ret Pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan	20.000.000,00	66.044.000,00	330,22	25.000.000,00	144.623.000,00	578,49
	KECAMATAN LABUHAN DELI						
1	Ret pelayanan persampahan/kebersihan	88.750.000,00	88.750.000,00	100,00	107.387.500,00	90.780.000,00	84,53
2	Ret izin mendirikan bangunan(IMB)	0	0	0			
3	Penyediaaan pelayanan parkir ditepi jalan umum	80.000.000,00	40.250.000,00	50,31	91.989.683,00	45.000.000,00	48,92
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	2.089.020,00	0			

	KECAMATAN PERCUT SEI TUAN						
1	Ret pelayanan pesampahan/kebersihan	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00	520.300.000,00	440.000.000,00	84,57
2	Ret izin mendirikan bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum	410.000.000,00	258.150.000,00	62,96	471.447.123,00	228.000.000,00	48,36
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	14.858.220,00	0			
	KECAMATAN SUNGGAL						
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	302.500.000,00	261.050.000,00	86,30
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	400.000.000,00	40.000.000,00	10,00	459.948.413,00	46.500.000,00	10,11
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	14.589.000,00	0			
	KECAMATAN TANJUNG MORAWA						
1	Ret Pelayanan Persampahan/Keberihan	280.000.000,00	225.890.000,00	80,68	338.800.000,00	237.200.000,00	70,01
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	300.000.000,00	99.900.000,00	33,30	344.961.310,00	105.700.000,00	30,64
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	3.856.725,00	0			

KECAMATAN LUBUK PAKAM							
1	Ret Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	262.500.000,00	207.977.000,00	79,23	317.625.000,00	155.300.000,00	48,89
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	300.000.000,00	97.768.000,00	32,59	344.961.310,00	109.320.000,00	31,69
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		5.079.970,00				
KECAMATAN NAMORAMBE							
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	105.000.000,00	97.301.000,00	92,67	127.050.000,00	114.544.000,00	90,16
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	20.000.000,00	4.000.000,00	20,00	22.997.421,00	3.400.000,00	14,78
KECAMATAN PANCUR BATU							
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	211.750.000,00	211.750.000,00	100,00
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	49.444.454,00	49.444.454,00	100,00
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.419.240,00	0			
KECAMATAN DELI TUA							

1	Ret Pelayanan Pesampahan/Kebersihan	110.000.000,00	35.000.000,00	31,82	133.100.000,00	45.000.000,00	33,81
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	45.994.841,00	46.000.000,00	100,01
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	572.000,00	0			
KECAMATAN GALANG							
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00	100.100.000,00	100,10	121.000.000,00	121.008.000,00	100,01
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan(IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	68.992.262,00	69.000.000,00	100,01
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	7.263.300,00	0			
KECAMATAN BANGUN PURBA							
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	20.000.000,00	10.500.000,00	52,50	22.997.421,00	7.000.000,00	30,44
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.359.200,00	0			
KECAMATAN HAMPARAN PERAK							
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.000.000,00	54.000.000,00	108,00	60.500.000,00	60.600.000,00	100,17

2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	50.000.000,00	17.800.000,00	35,60	57.493.552,00	10.200.000,00	17,74
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	3.587.600,00	0			
	KECAMATAN BATANG KUIS						
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	57.500.000,00	57.600.000,00	100,17	69.575.000,00	69.575.000,00	100,00
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	71.000.000,00	68.500.000,00	96,48	81.640.843,00	64.000.000,00	78,39
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.699.200,00	0			
	KECAMATAN BERINGIN						
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000	30.016.000	100,05	36.300.000,00	36.300.000,00	100,00
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	40.000.000	10.830.000	27,08	45.994.841,00	12.070.000,00	26,24
	KECAMATAN PANTAI LABU						
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.000.000,00	22.675.000,00	98,59	27.830.000,00	27.504.000,00	98,83
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			

3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	22.000.000,00	10.000.000,00	45,45	25.297.163,00	16.700.000,00	66,02
	KECAMATAN PATUMBAK						
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.000.000,00	44.250.000,00	98,33	54.450.000,00	54.450.000,00	100,00
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	40.000.000,00	7.700.000,00	19,25	45.994.841,00	8.400.000,00	18,26
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	6.174.000,00	0			
	KECAMATAN BIRU-BIRU						
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	0	0	25.000.000,00	7.000.000,00	28,00
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	20.000.000,00	6.640.000,00	33,20	22.997.421,00	7.670.000,00	33,35
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	4.410.000,00	0			
	KECAMATAN KUTALIMBARU						
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	20.000.000,00	18.200.000,00	91,00	22.997.421,00	17.500.000,00	76,10
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.961.700,00	0			
	KECAMATAN SIBOLANGIT						

1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	20.000.000,00	11.500.000,00	57,50	22.997.421,00	20.000.000,00	86,97
KECAMATAN STM HILIR							
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	0	0	25.000.000,00		0,00
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	20.000.000,00	6.600.000,00	33,00	22.997.421,00		0,00
KECAMATAN STM HULU							
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan(IMB)	0	0	0			
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	20.000.000,00	1.000.000,00	5,00	22.997.421,00	10.500.000,00	45,66
KECAMATAN PAGAR MERBAU							
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan				25.000.000,00		0,00
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	20.000.000,00	5.612.000,00	28,06	22.997.421,00	2.700.000,00	11,74
KECAMATAN GUNUNG MERIAH							
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0			
Jumlah		109.625.530.700,00	29.221.518.926,00	26,66	107.838.378.704,00	43.129.679.515,00	39,99

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

Berdasarkan rincian pada tabel 1.8 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2023 adalah sebesar Rp 43.129.679.515,00 atau 39,99% dari anggaran sebesar Rp 107.838.378.704,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 13.908.160.589,00 apabila dibandingkan dengan nilai realisasi T.A. 2022 yang hanya mencapai Rp 29.221.518.926,00. Kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 41,08%.

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen dari PAD. Penerimaan ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal dari bank sumut.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp. 19.681.368.926,00 atau dengan pencapaian 100% dari target yang dianggarkan sebagaimana tersaji pada 1.9 berikut :

Tabel 1.9

Target dan Realisasi Bagian Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah	21.867.488.711	21.867.488.711	100,00%	19.681.368.926,00	19.681.368.926,00	100,00%
JUMLAH		21.867.488.711	21.867.488.711	100,00%	19.681.368.926	19.681.368.926	100,00%

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari berbagai komponen berikut:

- Hasil Penjualan BMD yang tidak di pisahkan
- Jasa giro kas daerah
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
- Pendapatan BLUD
- Pendapatan dana kapitasi JKN
- Pendapatan dari Pengembalian
- Penerimaan atas tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah
- Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- Pendapatan denda pajak daerah

Target Lain-lain PAD yang sah pada T.A. 2023 sebesar Rp. 196.068.743.376,00 dengan realisasi sebesar Rp. 189.257.261.768,03 atau 96.53% sebagaimana tersaji pada tabel 1.10 sebagai berikut :

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023

No	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak di pisahkan	0	1.615.000.000,00	0,00		601.959.199,00	
2	Jasa giro kas daerah	5.737.469.285,00	6.348.299.878,78	110,65	5.737.469.285,00	6.027.088.676,56	105,05
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	56.423.323,00	0,00		791.673,00	
4	Pendapatan BLUD	153.636.628.081,00	199.198.097.660,55	129,66	173.964.656.091,00	159.672.657.427,50	91,78
5	Pendapatan dana kapitasi JKN	0	0	0,00	1.866.618.000,00	538.764.411,00	28,86
6	Pendapatan dari Pengembalian	7.500.000.000,00	3.705.512.330,89	49,41	7.500.000.000,00	4.019.006.936,00	53,59
7	Penerimaan atas tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	0	1.003.264.030,34	0,00		913.717.905,76	
8	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain	0	3.900.866.332,38	0,00		11.136.302.672,03	
9	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0	3.717.697.152,59	0,00		2.397.048.894,06	
10	Pendapatan denda pajak daerah	5.000.000.000,00	3.440.277.123,28	68,81	7.000.000.000,00	3.949.923.973,12	56,43
Jumlah		171.874.097.366,00	222.985.437.831,81	129,74	196.068.743.376,00	189.257.261.768,03	96,53

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

b. Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Daerah

Pendapatan transfer atau dana perimbangan merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain dalam hal ini pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan nonfisik, bantuan keuangan, serta dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Realisasi pendapatan transfer T.A. 2023 sebesar Rp 2.803.527.577.500,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp 2.809.348.352.562,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 115.864.798.340,00 atau 41,32% apabila dibandingkan dengan realisasi T.A. 2022. Pendapatan transfer terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah antar daerah.

Rincian anggaran dan realisasi dana perimbangan tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel 1.11 berikut.

Tabel 1.11

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer dan Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2023

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.442.125.594.000,00	2.426.833.888.504,00	99,37	2.552.991.454.000,00	2.547.684.285.288,00	99,79
	a. Dana Perimbangan	2.118.167.469.000,00	2.102.971.484.504,00	99,28	2.192.827.991.000,00	2.188.267.745.388,00	99,79
	Dana Bagi Hasil Pajak, terdiri dari :						
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33.711.797.000,00	71.766.911.259,00	212,88	21.587.104.000,00	21.587.104.000,00	100,00
	Pajak Penghasilan orang Pribadi						
	- PPh WPOPDN	1.743.201.000,00	3.504.183.769,00	201,02	1.803.346.000,00	1.803.346.000,00	100,00
	- PPh Pasal 21	28.907.828.000,00	36.845.445.929,00	127,46	33.597.851.000,00	33.597.851.000,00	100,00
	Dana bagi hasil Cukai Tembakau	180.323.000,00	186.303.893,00	103,32	278.200.000,00	278.200.000,00	100,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri dari :						
	- Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	247.617.000,00	281.080.418,00	113,51	179.453.000,00	179.453.000,00	100,00
	- Bagi hasil pungutan hasil perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.497.040.000,00	1.497.040.000,00	100,00
	- Bagi hasil pertambangan minyak bumi	10.021.000,00	38.402.911,00	383,22	67.440.000,00	67.440.000,00	100,00
	- Bagi hasil pertambangan gas bumi	24.653.000,00	44.125.308,00	178,99	84.802.000,00	84.802.000,00	100,00
	- Bagi hasil pertambangan panas bumi	261.948.000,00	271.608.342,00	103,69	81.140.000,00	81.140.000,00	100,00
	- Dana Bagi Hasil Tera Ulang						
	- Bagi hasil dari Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00		746.000,00	746.000,00	100,00

	- Bagi hasil dari mineral dan Batubara-Royalti	5.190.718.000,00	8.687.890.050,00	167,37	1.457.361.000,00	1.457.361.000,00	100,00
	- Bagi hasil Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					9.498.198.000,00	
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.352.573.416.000,00	1.348.515.058.970,00	99,70	1.490.378.523.000,00	1.507.732.049.770,00	101,16
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	693.357.636.000,00	630.872.162.655,00	90,99	641.814.985.000,00	610.403.014.618,00	95,11
	b. DID	0,00	0,00	0,00	11.679.399.000,00	11.679.399.000,00	100,00
	c. Dana Desa	323.958.125.000,00	323.862.404.000,00	99,97	348.484.064.000,00	347.737.140.900,00	99,79
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah,	232.063.094.087,00	260.828.890.656,00	112,40	256.356.898.562,00	255.843.292.212,00	99,80
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, terdiri dari :						
	a. Pajak kendaraan bermotor	34.568.404.082,00	44.951.954.811,00	130,04	70.343.448.672,00	70.343.448.672,00	100,00
	c. BBNKB	20.770.111.823,00	20.770.111.823,00	100,00	15.376.671.862,00	15.376.671.862,00	100,00
	e. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	73.791.844.585,00	73.791.844.585,00	100,00	70.681.257.219,00	71.551.930.839,00	101,23
	f. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	1.079.597.372,00	1.079.597.372,00	100,00	2.818.612.104,00	2.818.612.104,00	100,00
	h. Pajak Rokok	74.364.908.705,00	96.551.265.478,00	129,83	84.364.908.705,00	83.494.235.085,00	98,97
	Bantuan Keuangan	27.488.227.520,00	23.684.116.587,00	86,16	12.772.000.000,00	12.258.393.650,00	95,98
	Jumlah	2.674.188.688.087,00	2.687.662.779.160,00	100,50	2.809.348.352.562,00	2.803.527.577.500,00	99,79

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer biasanya terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Lainnya Sumbangan Pihak Ketiga dan Lain-Lain Pendapatan Hibah Dana Bos. Sesuai yang ditargetkan pada anggaran tahun 2023, tidak terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel 1.12 berikut:

Tabel 1.12

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 dan 2023

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
	Pendapatan Hibah	0	1.623.000.000,00	0,00	-	-	0,00
SUB TOTAL LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	1.623.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2 Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK) **Perencanaan Pembangunan Daerah**

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal akibat adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi pembangunannya. Dalam menyelesaikan hal tersebut tentunya diperlukan analisis yang bersifat adaptif dan solutif atas berbagai kondisi masyarakat yang belum ideal di waktu yang akan datang.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang diidentifikasi melalui data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kabupaten Deli Serdang dan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memerhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah

Kabupaten Deli Serdang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih perlunya optimalisasi pengembangan produk unggulan daerah berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, terutama untuk menjaga potensi resesi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, terutama dampaknya terhadap sektor formal dan informal. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasi dan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor produknya; dan perlunya Optimalisasi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.
2. Meski secara persentase penduduk miskin Kabupaten Deli Serdang adalah yang paling rendah diantara Kabupaten di Sumatera Utara, namun kenaikan sedikit saja akan menambah jumlah penduduk miskin yang signifikan, dikarenakan jumlah penduduk Kab. Deli Serdang yang relatif besar (terbesar setelah Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara). Masih terdapat penduduk yang tergolong miskin serta masih tingginya angka pengangguran. Ditambah dengan adanya dampak Covid-19 yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran baru akibat berkurangnya kesempatan kerja karena adanya pembatasan sosial serta potensi resesi ekonomi nasional dan dunia. Angka kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang termasuk yang terendah. Meskipun angka kemiskinan (versi BPS : 3,89% untuk tahun 2019, dan 3,88% untuk tahun 2020) terus menunjukkan kinerja yang positif, namun masih tetap menjadi tugas bagi Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, maka jumlah penduduk miskin berpotensi akan dapat meningkat. Sehingga diperlukan upaya penguatan jaring pengaman sosial,

penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga miskin, serta peningkatan perlindungan masalah sosial melalui lembaga sosial dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman

3. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender, dan penyandang disabilitas, dengan memperhatikan dampak Covid-19 serta pola hidup baru. Beberapa akar permasalahan dari kondisi tersebut, antara lain: Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan utamanya pendidikan inklusi dan pendidikan karakter serta metode pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh, kualitas mutu pendidikan, masih adanya anak putus sekolah dan belum optimalnya pendidikan non formal; masih belum optimalnya layanan kesehatan di semua tingkatan; masih adanya SPM bidang kesehatan yang belum mencapai sasaran (Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV); masih terdapat balita stunting; masih relatif tingginya angka konfirmasi positif Covid-19; serta belum optimalnya kapasitas masyarakat dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam pembangunan.
4. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang belum optimal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan skema tatanan kehidupan baru, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik hingga di tingkat kecamatan, belum terbentuknya Zona Integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perubahan regulasi dan aplikasi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi terhadap keterlambatan penyediaan dokumen perencanaan dan keuangan tepat waktu.
5. Ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masih belum merata dan memadai di seluruh kecamatan, infrastruktur yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dan risiko bencana. Akar permasalahan yang masih muncul yaitu : akses konektivitas antar wilayah yang belum seluruhnya terbangun; waktu tempuh kendaraan yang masih belum optimal yang dipengaruhi kondisi kemantapan jalan; serta infrastruktur yang mendukung kawasan strategis provinsi yang perlu ditingkatkan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-empat RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun Visi Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2019-2024 adalah:



Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang pada gambar di atas, maksud dari misi tersebut adalah:



Dalam upaya pencapaian lima (5) misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka dirumuskan tujuan pada masing-masing misi tersebut. Sementara itu, untuk menggambarkan tercapainya tujuan, maka disusunlah rumusan kondisi untuk melihat ketercapaian tujuan, rumusan kondisi dimaksud berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah, pencapaian hasil pembangunan tersebut disebut dengan sasaran. Untuk tahun 2023, telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah atas setiap misi pembangunan sebagaimana berikut:

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi	1.1	Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	1.1.1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan secara berkelanjutan
				1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan
2	Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif	2.1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	2.1.1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor strategis
						Optimalisasi produk-produk unggulan berbasis potensi lokal melalui inovasi dan ekonomi kreatif
						Optimalisasi ketersediaan dan distribusi pangan serta peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan
						Pengembangan dan Pemasaran Sektor Pariwisata
						Peningkatan pemberdayaan masyarakat kewirausahaan
						Optimalisasi sarana dan prasarana, potensi, produk unggulan, dan kapasitas SDM Pemerintahan Desa
				2.1.2	Meningkatnya investasi	Optimalisasi kemudahan proses investasi yang inklusif
		2.2	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	2.2.1	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat	Peningkatan perlindungan dan kelembagaan perempuan dan anak
				Optimalisasi pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran		
				Optimalisasi pembinaan dan pelatihan kesempatan kerja		

	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi			
3	Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan	3.1	Mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi	Akslerasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan sarana dan prasarana	
				3.1.2	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman		
				3.1.3	Meningkatnya ketersediaan RTH publik		Peningkatan panataan ruang terbuka hijau publik
		3.2	Mewujudkan kawasan yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan	3.2.1	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan	
				3.2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan		Peningkatan layanan pengelolaan persampahan
				3.2.3	Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang		Optimalisasi perencanaan tata ruang
4	Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	4.1	Mewujudkan masyarakat yang religius dan taat hukum	4.1.1	Meningkatnya nilai-nilai keagamaan, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan stabilitas dan keamanan	
		4.2	Mewujudkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	4.2.1	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal	Peningkatan dan pengendalian kelestarian budaya	
5	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab	5.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5.1.1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, terintegrasi dan sinergi melalui inovasi dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel	
				5.1.2	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah		

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perumusan program pembangunan daerah memiliki tujuan untuk mengilustrasikan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Perumusan tersebut merupakan rencana pembangunan konkret dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih. Dalam mencapai keberhasilan pembangunan, pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu menetapkan beberapa program unggulan untuk menjadi prioritas pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program pembangunan memiliki dua sifat yaitu strategis dan operasional. Program yang bersifat strategis melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dengan intensitas yang tinggi bila dibandingkan yang operasional. Selain itu, penganggaran untuk program strategis harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan program yang bersifat strategis memiliki dampak yang besar dan memiliki kepentingan yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Program dapat menjadi strategis dengan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu program pemerintah daerah dapat menjadi strategis pada satu tahun atau periode dan menjadi operasional pada periode berikutnya.

Penyusunan program didasarkan pada akar permasalahan pada setiap sektor pelayanan pemerintahan di Kabupaten Deli serdang sebagai upaya yang mendukung pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program-program tersebut dirangkum berdasarkan masing-masing perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel 1.13 Rencana Program Prioritas Kabupaten Deli Serdang

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM

KEMANDIRIAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PERENCANAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEUANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KEPEGAWAIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM

DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Rencana Kerja Daerah bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (fiscal capacity) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan menurut hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan, Kabupaten, dengan tetap memedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Deli Serdang dijabarkan dalam Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas: a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah; b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; d) Urusan pilihan; e) Unsur pendukung urusan pemerintahan; f) Unsur penunjang urusan pemerintahan; g) Unsur pengawas; h) Unsur kewilayahan; i) Unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Pendidikan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI	99,79 %

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD terakreditasi minimal B	84%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP terakreditasi minimal B	88%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi	40%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase PKBM terakreditasi	71%
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru	70%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rata-Rata Capaian Penilaian Kinerja Guru	86 Skor
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru	70%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rata-rata capaian penilaian kinerja guru	88 Skor

2. Urusan Wajib Kesehatan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,6 poin
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	30%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase perencanaan program/kegiatan kesehatan yang evidenced based	96%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah sakit yang memenuhi standar mutu	70%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5 poin
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi teknis dan bersertifikat	27%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi teknis	55%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan bersertifikat	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,82%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi standar	100%
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan dan depot air minum yang memenuhi syarat higiene sanitasi	100%
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan yang laik sehat	55%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,50%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	71%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	71%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu aktif	93%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	78%

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	81%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	79%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum aman	37,50
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang Mendapat Layanan Air Minum/Bersih	6595 SR

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase penyediaan sarana dan prasarana persampahan	41
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana Persampahan	2 Jenis
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	77,5
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tinggal yang Mendapat Layanan Sanitasi Aman	1485 RT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berkurangnya luas genangan/ banjir di kawasan permukiman	75
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Genangan yang Tertangani	126 Ha
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Ber-IMB	35%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Pengawasan Bangunan	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan dalam Kondisi Mantap	75%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	74%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase perencanaan tata ruang	58%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan tata ruang	58%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan tata ruang	58%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan tata ruang	14%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan tata ruang	14%

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh	6,8%
Pendataan Penyediaan dan	Teridentifikasinya Rumah di	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lokasi Rawan Bencana	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Layak Huni Yang Terbangun Bagi Korban Bencana Alam	100%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh	6,8%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya dokumen perencanaan	6 Dokumen
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya Luas Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	30 Ha
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	70%
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Rumah yang Terfasilitasi PSU	10000 Unit

5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kriminalitas	15%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Berkurangnya daerah rawan bencana	55 Lokasi
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya informasi daerah rawan bencana yang diterima masyarakat	100 %
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat korban bencana yang menerima bantuan	100%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	80%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Kualitas Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
Kabupaten/Kota	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	

6. Urusan Wajib Sosial

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayakan	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS tertangani	100 persen
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS bukan HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100 persen
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	100%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin terkelola	100 persen
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang mendapat perlindungan sosial	100 persen
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang mendapat perlindungan sosial	100 persen
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Penanganan	100%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang mendapat perlindungan sosial	100 persen
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang mendapat perlindungan sosial	100 persen
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase areal pemakaman yang dikelola	75%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100 persen

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kualitas Koordinasi Perencanaan Tenaga Kerja	100%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data rencana tenaga kerja yang tersedia	1 dokumen
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	386 orang
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan yang menjawab 80% pertanyaan dengan benar	80 Persen
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mengikuti pembinaan menjawab 80% pertanyaan dengan benar	80 Persen
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar	80 orang
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan PPTKIS yang mendapatkan pembinaan menjawab 80% pertanyaan dengan benar	80 Persen
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	100%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus hubungan industrial yang dicegah dan ditangani	180 Kasus

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	100%
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	100%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	100%
PROGRAM PEMENUHAN HAK	Tingkat Pemenuhan Hak	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
ANAK (PHA)	Anak	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Hak Anak	100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak dari Tindakan Kekerasan	100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak dari Tindakan Kekerasan	100%

3. Urusan Wajib Pangan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77%
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang	10%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	64%
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan	0,8%
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang	10%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Optimalisasi Pemanfaatan Perkarangan Rumah Tangga	2,5%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	64%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan	0,8%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	64%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keamanan Pangan	60%

4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Sampah	35%
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Baku Mutu Lingkungan	60%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik yang berkualitas di kawasan perkotaan	15,5
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Tertata	30 Ha
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64 poin
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang di bina dan diawasi	100 Dunia Usaha
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64 poin
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek Lingkungan Hidup	350 Orang
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64 poin
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup	100 Orang
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64 poin
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha Taat Lingkungan	100 Persen

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
(PPLH) Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	45%
Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola 3R	55 Persen

5. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan pada masyarakat	83%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pengadaan Dokumen Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Desa Binaan	5 Desa
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil pada masyarakat	91%
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Perkawinan Keliling	100 Pasangan Nikah
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	86%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya OPD yang Melakukan Pemanfaatan Data	20 OPD
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase akurasi data base Dukcapil semakin meningkat	87%
Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan	75 Buku

6. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang memiliki kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat	55%
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase kerjasama desa yang terfasilitasi	100%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan administrasi pemerintahan yang efektif dan taat aturan	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memenuhi tertib administrasi pemerintahan	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa	58%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan, posyantek dan kelompok perempuan di desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	97%

7. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan dan Informasi Keluarga	100%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan dan Informasi Keluarga	100%
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan dan Informasi Keluarga	100%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam ber KB	100%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam ber KB	100%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam ber KB	100%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam ber KB	100%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam ber KB	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang Ketahanan Keluarga	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang Ketahanan Keluarga	100%
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang Ketahanan Keluarga	22 Kecamatan

8. Urusan Wajib Perhubungan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	56%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	63%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal dalam Kondisi baik	100%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pengawasan Pelaksanaan izin dan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/ Kota	100%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	100%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten	70%
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	100%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi LLAJ di Jalan dan Pelayanan Angkutan Umum	70%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Barang dan Angkutan Orang	100%

9. Urusan Wajib KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah	81,82 %
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Informasi Yang Berkualitas	100%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan layanan Pemerintah Daerah dan layanan publik yang terintegrasi dan memenuhi interoperabilitas	74,16 %
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan Domain/ sub Domain dan Interkoneksi intra Pemerintah Daerah	100%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan aplikasi e-government yang terintegrasi	100%

10. Urusan Wajib KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Terwujudnya pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi	50 KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan akuntabel	100%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Terciptanya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	25 KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya data perkembangan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	100%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terciptanya pendidikan dan pelatihan pelatihan perkoperasian	20 Orang
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya koperasi yang memahami perkoperasian dan akuntansi koperasi	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	50 Koperasi
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	Meningkatnya kinerja	720 UM

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	UMKM yang berdaya saing	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan pemberdayaan usaha mikro	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terwujudnya pengembangan usaha mikro	350 UMKM
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan UMKM skala mikro menjadi skala kecil	100%

11. Urusan Wajib Penanaman Modal

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	4165.817,19 Rp Juta
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah dibidang penanaman modal	100%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase pembuatan peta potensi investasi kabupaten	100%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	4165817,19 Rp Juta
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	100%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	4165817,19 Rp Juta
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dibidang penanaman modal	100%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	4165817,19 Rp Juta
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	4165817,19 Rp Juta
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
	Daerah Kabupaten/Kota	

12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase daya saing pemuda yang dikembangkan	80%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang dikembangkan	60%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan	50%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase daya saing keolahragaan yang dikembangkan	82%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase olahraga yang dibina	75%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	87%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	80%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase operasional kesekretariatan	85%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang dibina	90%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kapasitas kepramukaan yang dikembangkan	47%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi pramuka yang dibina	70%

13. Urusan Wajib Statistik

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase layanan Data statistik Sektoral yang terintegrasi pada pusat data pemerintah daerah	72,58 %
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Data Sektoral PD Pada Pusat	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
	Data Pemerintah Daerah	

Urusan Wajib Persandian

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian perangkat daerah untuk pengamanan informasi	46,95 %
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian PD	100%

14. Urusan Wajib Kebudayaan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya yang dikembangkan	40%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan yang dikelola	14%
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	25%
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang dibina	30%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	80%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	54%
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah yang dibina	27%
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sejarah lokal yang dibina	24%
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15%
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	12%
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan museum	105%
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan museum	100%

15. Urusan Wajib Perpustakaan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pengunjung perpustakaan	12%
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengunjung perpustakaan	100%
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengunjung perpustakaan	100%
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase akses literasi Pendidikan Non Formal	45%
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	terrealisasinya pengumpulan naskah kuno	100%

16. Urusan Wajib Kearsipan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Audit Kearsipan	100%
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Pengawasan Kearsipan	100%
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Pengawasan Kearsipan	100%
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan simpul JIKN tingkat Kabupaten	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Nilai audit Kearsipan	100%
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Nilai Pengawasan Kearsipan	100%

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	28,447.22 Ton
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan penangkapan ikan	100%
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok nelayan	100%
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase ketersediaan tempat tambat sampan / tangkahan yang dibutuhkan	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	67,764.59 Ton
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok pembudidaya ikan	100%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pengelolaan pembudidayaan ikan	100%
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya perikanan	100%
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase anggota pokmaswas dan pelaku usaha perikanan yang terlatih dan sadar hukum dalam pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya	100%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	108,453.93 Ton
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase ketersediaan dokumen data informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	100%
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kegiatan yang terlaksana pada Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100%
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	100%

2. Urusan Pilihan Pariwisata

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata yang ditingkatkan	17%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang ditingkatkan	54%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran yang diselenggarakan	55%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Persentase pemasaran yang diselenggarakan	60%

Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataaan yang dikembangkan	77%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata yang ditingkatkan	75%

3. Urusan Pilihan Pertanian

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian	554.428 ton
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan dan pendampingan penggunaan sara pertanian yang terlaksana	100%
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian	554.428 ton
Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian	100%
Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan pembangunan prasarana pertanian	100%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah populasi ternak	290.950 ton
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	100%
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan yang terlaksana	100%
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa medik veteriner yang terlaksana	100%
PROGRAM PENYULUHAN	Jumlah produksi pertanian	554.428 ton

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PERTANIAN		
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	100%

4. Urusan Pilihan Perdagangan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	100%
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100%
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Penerbitan STPW yang Tepat Waktu untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	100%
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	100%
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	100%
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab/Kota	100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	30,83 Rp
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Dustribusi Perdagangan	100%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi harga antar waktu	100%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Per Komoditas Bahan Pokok	100%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Ketersediaan Bahan Evaluasi untuk Perumusan Kebijakan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Secara Tepat dan Cepat	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pupuk yang Disalurkan	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	100%
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	100%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar, Alat Ukur, Takar Timbang yang diawasi serta bertanda tera sah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	100%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang yang diawasi serta bertanda tera sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Barang Produksi dalam Negeri yang diperdagangkan di toko swalayan	100%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Identifikasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Perdagangan	100%

5. Urusan Pilihan Perindustrian

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase tingkat penambahan industri kecil dan menengah di kabupaten	100%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	100%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	100%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	100%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	100%

D. Unsur Pendukung

1. Unsur Sekretariat Daerah

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase data dan informasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80%
Administrasi Tata Pemerintahan	Terpenuhinya kegiatan administrasi Tata pemerintahan	3 kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Peserta	100%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kerja Sama Antar Daerah	1 kegiatan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kualitas Koordinasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya di	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
	Bidang Perekonomian	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa	12 Bulan
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%

2. Unsur Sekretariat DPRD

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase produk hukum yang ditetapkan	100%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Tugas DPRD	100%

E. Unsur Penunjang

1. Unsur Perencanaan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD	100%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan	100%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sinkronisasi Usulan RK DAK dan Tertib Pelaksanaan SIPD	100%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Evaluasi RKPD/RPJMD	100%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%

2. Unsur Keuangan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD	100%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pendanaan Perangkat Daerah Berbasis Kinerja	100%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan keuangan dan APBD yang tepat waktu	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	100%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran dana transfer	100%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen barang milik daerah yang diselesaikan	100%

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%

3. Unsur Kepegawaian

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	100%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pelaksanaan Diklat berdasarkan AKD	100%
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan	2 Sub Kegiatan

5. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kajian Yang Digunakan Dalam Rancangan/Rumusan Kebijakan	100%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Data Hasil Penelitian Yang Terpublikasikan	100%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Data Hasil Penelitian Yang Terpublikasikan	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Data Hasil Penelitian Yang Terpublikasikan	100%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Data Hasil Penelitian Yang Terpublikasikan	100%

F. Unsur Pengawasan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas SPIP	3 Level
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Dilaksanakan	100%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	100%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	B Kategori
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	2 Dokumen
Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli	100%

G. Unsur Kewilayahan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 Poin
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Perempuan	100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Tertib Administrasi Masyarakat Kelurahan	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
UMUM	Ketertiban Masyarakat	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan SOP Protokol Kesehatan Covid-19 di Masyarakat	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Konflik	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	100%

H. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Peningkatan Pemahaman Aktualisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	75%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	100%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan terdaftar yang dibina dan terverifikasi	100%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	100%

Program/Kegiatan	Kinerja	Target dan Satuan
Budaya	Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Informasi Potensi Konflik	80%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanjangan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%

Prioritas Nasional untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Prioritas Nasional Tahun 2023

Berdasarkan aplikasi SIPD yang telah memuat *tagging* Prioritas Nasional terhadap kegiatan RKPD tahun 2023, distribusi dukungan pendanaan RKPD Kabupaten Deli Serdang terhadap Prioritas Nasional adalah tersaji dalam tabel berikut.:

Tabel 1.14

Dukungan RKPD Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional/Program Pendukung Prioritas Nasional
A.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
1.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
4.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
5.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
8.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

No	Prioritas Pembangunan Nasional/Program Pendukung Prioritas Nasional
9.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
10.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
11.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
12.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
13.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
14.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
15.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
16.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
B.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
17.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
18.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
19.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
20.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
21.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
22.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
23.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
24.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
C.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
25.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
26.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
27.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
28.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
29.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
30.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
31.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
32.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
33.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
34.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
35.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
36.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
37.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
38.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
39.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
40.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
41.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
42.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
43.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
44.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
45.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
46.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
47.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
48.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
49.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
D.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
50.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
51.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

No	Prioritas Pembangunan Nasional/Program Pendukung Prioritas Nasional
52.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
53.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
54.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
55.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
E.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
56.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
57.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
58.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
59.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
60.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
61.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
62.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
63.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
64.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
65.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
F.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
66.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
67.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
68.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
69.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
70.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
G.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
71.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
72.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
73.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
74.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
75.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
76.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
77.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
78.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
79.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
80.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
81.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang

berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya pada Pasal 298 disebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Sehingga penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Pengertian SPM secara tekstual yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu

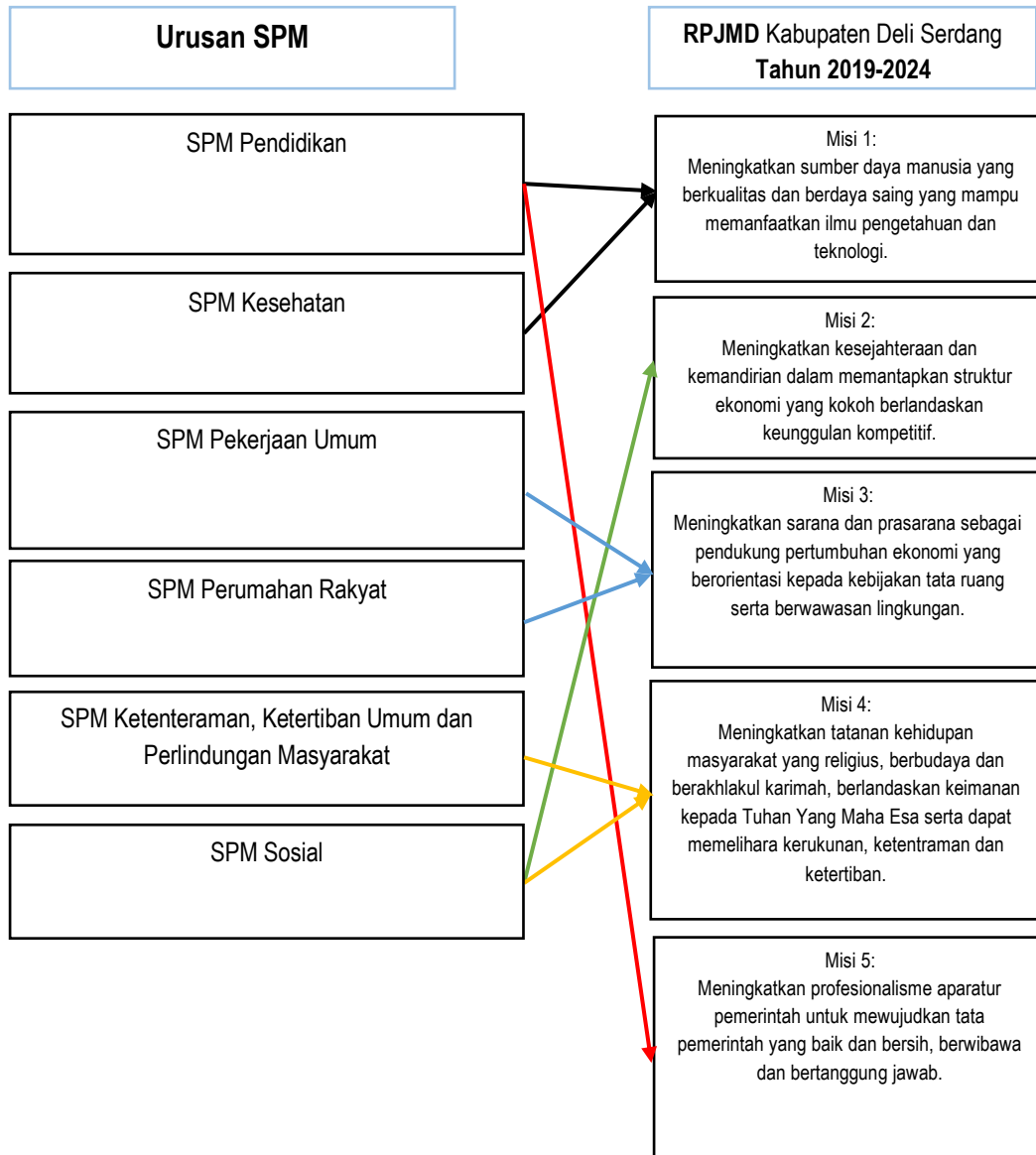
Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah meliputi 6 (enam) urusan sesuai dengan kementerian masing-masing yaitu :

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
dan
6. Urusan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pasal 14 ayat (2) menjelaskan Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat tersebut disampaikan bahwa yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah” meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diperkuat dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 8 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka mewajibkan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 perlu memuat 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang selanjutnya ditetapkan sebagai SPM terdiri atas: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan (6) Sosial. Pada fungsinya SPM menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan SPM menjadi penting utamanya untuk menjamin sinergitas dan mendukung ketercapaian program pembangunan nasional. Keterkaitan kedua dokumen tersebut sebagaimana dalam diagram di bawah ini:

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)



Prioritas pembangunan tahun 2022 sebagai bagian dari tahun pembangunan kedua periode RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjawab permasalahan yang berkembang dengan memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan keterbatasan sumber daya dan tetap mengacu pada kebijakan pembangunan maka prioritas pembangunan tahun 2022 terfokus pada pemulihan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan ekonomi dan infrastruktur terintegrasi dengan mengutamakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2022, dilakukan melalui :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung teknologi
2. Pemulihan Kesejahteraan Masyarakat dan Transformasi ekonomi berbasis Sumber Daya Manusia

3. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah, dan
4. Pemantapan peran pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka mendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal maka arah kebijakan belanja daerah tahun 2022 yang terdapat dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 salah satunya adalah membiayai belanja pemenuhan pelayanan dasar minimal (SPM).

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



TAHUN 2023

B A B II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Capaian Kinerja Makro

Pengukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal digunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator). Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Indikator IPM terdiri atas Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran perkapita. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Deli Serdang mencapai angka 77,16 pada tahun 2023 dengan laju kinerja 1,27 poin dari dibandingkan tahun 2022 yang besarnya 76,19. Capaian IPM Kabupaten Deli Serdang telah semakin membaik dan sudah dalam status IPM yang tinggi (di atas 70).

Angka Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dengan melihat persentase tingkat kemiskinan suatu daerah. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut

termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, kurangnya air bersih, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 sebesar 3,44% mengalami penurunan laju kinerja sebesar -4,972% dibanding Tahun 2022 sebesar 3,62%. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023.

Angka Pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka, mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran (tidak bekerja). Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 berada di posisi 8,79% dan angka tidak mengalami perubahan dibandingkan pada tahun 2022 berada di posisi 8,79%.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 di angka 4,7% menjadi 5,34% di tahun 2023 dengan laju kinerja sebesar 13,617%. Demikian juga dengan **Angka Pendapatan Per Kapita** yang diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan pada tahun 2023 di angka 39,44% dibanding tahun 2022 sebesar 38,67% dengan laju kinerja sebesar 1,99%. Sedangkan angka ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan yakni dari 0,27 pada tahun 2022 menjadi 0,295 pada tahun 2023 dengan laju kinerja sebesar 9,259%.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,19	77,16	1,27
2	Angka Kemiskinan	Persen	3,62	3,44	-4,972
3	Angka Pengangguran	Persen	8,79	8,79	0
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,7	5,34	13,617
5	Pendapatan Per Kapita*	Juta Rp.	38,67	39,44	1,99
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)*	Ratio	0,27	0,295	9,259

Sumber data: BPS Kab. Deli Serdang

B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada sub bab ini terdapat tiga indikator kinerja kunci yaitu Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Berikut ini adalah Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	445	Dinas Pendidikan	
2	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1320	Dinas Pendidikan	
3	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1040	Dinas Pendidikan	
4	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1971	Dinas Pendidikan	
5	Pendidikan	Jumlah pendidik pada PAUD	3628	Dinas Pendidikan	
6	Pendidikan	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	290	Dinas Pendidikan	
7	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	127	Dinas Pendidikan	
8	Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	633	Dinas Pendidikan	
9	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	195370	Dinas Pendidikan	
10	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	80874	Dinas Pendidikan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
11	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	121551	Dinas Pendidikan	
12	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	34607	Dinas Pendidikan	
13	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12458	Dinas Pendidikan	
14	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4404	Dinas Pendidikan	
15	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	11431	Dinas Pendidikan	
16	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4706	Dinas Pendidikan	
17	Pendidikan	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1890	Dinas Pendidikan	
18	Pendidikan	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	684	Dinas Pendidikan	
19	Pendidikan	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1317	Dinas Pendidikan	
20	Pendidikan	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	656	Dinas Pendidikan	
21	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4398	Dinas Pendidikan	
22	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2177	Dinas Pendidikan	
23	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	529	Dinas Pendidikan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
24	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	191	Dinas Pendidikan	
25	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	372	Dinas Pendidikan	
26	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	314	Dinas Pendidikan	
27	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	28	Dinas Pendidikan	
28	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2369	Dinas Pendidikan	
29	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	169	Dinas Pendidikan	
30	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	188	Dinas Pendidikan	
31	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	528	Dinas Pendidikan	
32	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	209	Dinas Pendidikan	
33	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	529	Dinas Pendidikan	
34	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	170	Dinas Pendidikan	
35	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
36	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	24	Dinas Kesehatan	
37	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	24	Dinas Kesehatan	
38	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1516	Dinas Kesehatan	
39	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36	Dinas Kesehatan	
40	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1516	Dinas Kesehatan	
41	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36	Dinas Kesehatan	
42	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1516	Dinas Kesehatan	
43	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36	Dinas Kesehatan	
44	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1568	Dinas Kesehatan	
45	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36	Dinas Kesehatan	
46	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1681	Dinas Kesehatan	
47	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36	Dinas Kesehatan	
48	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Usia Produktif)	1681	Dinas Kesehatan	
49	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36	Dinas Kesehatan	
50	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Usia lanjut)	1681	Dinas Kesehatan	
51	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36	Dinas Kesehatan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
52	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Hipertensi))	1681	Dinas Kesehatan	
53	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36	Dinas Kesehatan	
54	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Diabetes mellitus)	1681	Dinas Kesehatan	
55	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36	Dinas Kesehatan	
56	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang dengan Gangguan Jiwa/ODGJ)	1493	Dinas Kesehatan	
57	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36	Dinas Kesehatan	
58	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Tuberkolosis)	1681	Dinas Kesehatan	
59	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36	Dinas Kesehatan	
60	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (HIV)	624	Dinas Kesehatan	
61	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
62	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
63	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
64	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
65	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
66	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PKP serta Pertanahan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
67	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
68	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	66,38	Dinas SDA BM BK	
69	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	58,88	Dinas SDA BM BK	
70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas SDA BM BK	
71	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak)	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
72	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
73	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
75	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	478	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
77	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	478	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
78	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
79	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
81	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	164	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
82	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	422	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
83	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	50	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
84	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
85	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
86	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	4	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
87	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
88	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	164	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
89	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	4	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
90	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
91	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	973	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
92	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
93	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
94	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
95	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	1	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
96	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
97	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
98	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	3670,70	Dinas SDA BM BK	
99	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dibangun	69,733	Dinas SDA BM BK	
100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dibangun	507,5	Dinas SDA BM BK	
101	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	57,389	Dinas SDA BM BK	
102	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas SDA BM BK	
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0	Dinas SDA BM BK	
104	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas SDA BM BK	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
105	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dipelihara	86,172	Dinas SDA BM BK	
106	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	2648,8	Dinas SDA BM BK	
107	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas SDA BM BK	
108	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	123	Dinas SDA BM BK	
109	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas SDA BM BK	
110	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas SDA BM BK	
111	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1	Dinas SDA BM BK	
112	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1	Dinas SDA BM BK	
113	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1	Dinas SDA BM BK	
114	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1	Dinas SDA BM BK	
115	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	Dinas SDA BM BK	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
116	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	1	Dinas SDA BM BK	
117	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	1	Dinas SDA BM BK	
118	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	1	Dinas SDA BM BK	
119	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	1	Dinas SDA BM BK	
120	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPMPSTP	
121	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas SDA BM BK	
122	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	32	Dinas SDA BM BK	
123	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas SDA BM BK	
124	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	Dinas SDA BM BK	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
125	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas SDA BM BK	
126	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas SDA BM BK	
127	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	24	Dinas SDA BM BK	
128	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas SDA BM BK	
129	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas SDA BM BK	
130	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	32	Dinas SDA BM BK	
131	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas SDA BM BK	
132	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
133	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	61	Dinas PKP serta Pertanahan	
134	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	305	Dinas PKP serta Pertanahan	
135	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	47	Dinas PKP serta Pertanahan	
136	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	14	Dinas PKP serta Pertanahan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
137	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
138	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
139	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	305	Dinas PKP serta Pertanahan	
140	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	69491	Dinas PKP serta Pertanahan	
141	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
142	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
143	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
144	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	61	Dinas PKP serta Pertanahan	
145	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
146	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	23676	Dinas PKP serta Pertanahan	
147	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	533,5	Dinas PKP serta Pertanahan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
148	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	261	Dinas PKP serta Pertanahan	
149	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	114	Dinas PKP serta Pertanahan	
150	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah di kab/kota	484463	Dinas PKP serta Pertanahan	
151	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit PK RTLH	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
152	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tidak layak huni	10273	Dinas PKP serta Pertanahan	
153	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang tidak dihuni	23289	Dinas PKP serta Pertanahan	
154	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rasio rumah dan KK	0.77	Dinas PKP serta Pertanahan	
155	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah pembangunan baru	18944	Dinas PKP serta Pertanahan	
156	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	381	Dinas PKP serta Pertanahan	
157	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	397132	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
158	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	37462	Dinas PKP serta Pertanahan	
159	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	397132	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
160	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	1006	Dinas PKP serta Pertanahan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
161	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	2543	Dinas SDA BM BK	
162	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	165	Dinas PKP serta Pertanahan	
163	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang terregistrasi	165	Dinas PKP serta Pertanahan	
164	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	18	Dinas PKP serta Pertanahan	
165	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1181	Satpol PP	
166	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	11664	Satpol PP	
167	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	4	Satpol PP	
168	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6	Satpol PP	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
169	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	5	Satpol PP	
170	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya sarana prasarana minimal	76	Satpol PP	
171	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	BPBD	
172	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	BPBD	
173	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	
174	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
175	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD	
176	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD	
177	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	BPBD	
178	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	BPBD	
179	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	BPBD	
180	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	BPBD	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
181	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	0	BPBD	
182	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	BPBD	
183	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	293	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
184	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
185	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	110	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
186	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
187	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	187	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
188	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
189	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	119	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
190	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
191	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	116	Dinas Sosial	
192	Sosial	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	22	Dinas Sosial	
193	Sosial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Dinas Sosial	
194	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	116	Dinas Sosial	
195	Sosial	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0	Dinas Sosial	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
196	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	57	Dinas Sosial	
197	Sosial	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
198	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	52	Dinas Sosial	
199	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	22	Dinas Sosial	
200	Sosial	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	1	Dinas Sosial	
201	Sosial	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial	
202	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial	
203	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	3	Dinas Sosial	
204	Sosial	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	4	Dinas Sosial	
205	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia	0	Dinas Sosial	
206	Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	Dinas Sosial	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
207	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	28	Dinas Sosial	
208	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	18	Dinas Sosial	
209	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	69	Dinas Sosial	
210	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	58	Dinas Sosial	
211	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	50	Dinas Sosial	
212	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	6556	Dinas Sosial	
213	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	6556	Dinas Sosial	
214	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	Dinas Sosial	
215	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	250	Dinas Sosial	
216	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	6556	Dinas Sosial	
217	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	35	Dinas Sosial	
218	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0	Dinas Tenaga Kerja	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
219	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	Dinas Tenaga Kerja	
220	Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	123	Dinas Tenaga Kerja	
221	Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	Dinas Tenaga Kerja	
222	Tenaga Kerja	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	Dinas Tenaga Kerja	
223	Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	4,93	Dinas Tenaga Kerja	
224	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	20,68	Dinas Tenaga Kerja	
225	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	Dinas Tenaga Kerja	
226	Tenaga Kerja	Jumlah penganggur yang dilatih	348	Dinas Tenaga Kerja	
227	Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Dinas Tenaga Kerja	
228	Tenaga Kerja	Persentase penyerapan lulusan	26,8	Dinas Tenaga Kerja	
229	Tenaga Kerja	Lulusan bersertifikat kompetensi	82,8	Dinas Tenaga Kerja	
230	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Tenaga Kerja	
231	Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Tenaga Kerja	
232	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0,5	Dinas Tenaga Kerja	
233	Tenaga Kerja	Data tingkat produktivitas total	0	Dinas Tenaga Kerja	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
234	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	70,19	Dinas Tenaga Kerja	
235	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0,62	Dinas Tenaga Kerja	
236	Tenaga Kerja	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	63478	Dinas Tenaga Kerja	
237	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	23,09	Dinas Tenaga Kerja	
238	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	88,17	Dinas Tenaga Kerja	
239	Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	3,058	Dinas Tenaga Kerja	
240	Tenaga Kerja	Jumlah mogok kerja	4	Dinas Tenaga Kerja	
241	Tenaga Kerja	Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
242	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Tenaga Kerja	
243	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
244	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan PHK	124	Dinas Tenaga Kerja	
245	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	256	Dinas Tenaga Kerja	
246	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	5	Dinas Tenaga Kerja	
247	Tenaga Kerja	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Tenaga Kerja	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
248	Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	37,5	Dinas Tenaga Kerja	
249	Tenaga Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	132	Dinas Tenaga Kerja	
250	Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	2535	Dinas Tenaga Kerja	
251	Tenaga Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	24	Dinas Tenaga Kerja	
252	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Dinas Tenaga Kerja	
253	Tenaga Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	Dinas Tenaga Kerja	
254	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Dinas Tenaga Kerja	
255	Tenaga Kerja	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	3516	Dinas Tenaga Kerja	
256	Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	14	Dinas Tenaga Kerja	
257	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100	Dinas Tenaga Kerja	
258	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	2535	Dinas Tenaga Kerja	
259	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	18	Dinas Tenaga Kerja	
260	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
261	Tenaga Kerja	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas Tenaga Kerja	
262	Tenaga Kerja	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1	Dinas Tenaga Kerja	
263	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	13	Dinas PPPAPPKB	
264	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	54	Dinas PPPAPPKB	
265	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	33	Dinas PPPAPPKB	
266	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4	Dinas PPPAPPKB	
267	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas PPPAPPKB	
268	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	4	Dinas PPPAPPKB	
269	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	Dinas PPPAPPKB	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
270	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	7	Dinas PPPAPPKB	
271	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	10	Dinas PPPAPPKB	
272	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	Dinas PPPAPPKB	
273	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3	Dinas PPPAPPKB	
274	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas PPPAPPKB	
275	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	3	Dinas PPPAPPKB	
276	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas PPPAPPKB	
277	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	4	Dinas Ketahanan Pangan	
278	Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0	Dinas Ketahanan Pangan	
279	Pangan	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Ketahanan Pangan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
280	Pangan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	Dinas Ketahanan Pangan	
281	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	
282	Pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	
283	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan	
284	Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	Dinas Ketahanan Pangan	
285	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
286	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	2	Dinas PKP serta Pertanahan	
287	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
288	Pertanahan	Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
289	Pertanahan	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
290	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	66.19	DLH	
291	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	72.67	DLH	
292	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	31.31	DLH	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
293	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1	DLH	
294	Lingkungan Hidup	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	136	DLH	
295	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	5	DLH	
296	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	DLH	
297	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DLH	
298	Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan	31	DLH	
299	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	100	Disdukcapil	
300	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perceraian	100	Disdukcapil	
301	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta kematian	100	Disdukcapil	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
302	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan	100	Disdukcapil	
303	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	380	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
304	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	380	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
305	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	2238	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
306	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	225	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
307	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dinas PPPAPPKB	
308	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	71375	Dinas PPPAPPKB	
309	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	19,61	Dinas PPPAPPKB	
310	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	61,77	Dinas PPPAPPKB	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
311	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	3	Dinas PPPAPPKB	
312	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	82	Dinas PPPAPPKB	
313	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,47	Dinas PPPAPPKB	
314	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	394	Dinas PPPAPPKB	
315	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	55,7	Dinas PPPAPPKB	
316	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0,11	Dinas PPPAPPKB	
317	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	23,21	Dinas PPPAPPKB	
318	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	76,47	Dinas Perhubungan	
319	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	45,25	Dinas Perhubungan	
320	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
321	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	33,33	Dinas Perhubungan	
322	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo	
323	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo	
324	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	Dinas Kominfo	
325	Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	94	Dinas Kominfo	
326	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	94	Dinas Kominfo	
327	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	41,81	Dinas Kominfo	
328	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	95,65	Dinas Kominfo	
329	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	13,04	Dinas Kominfo	
330	Komunikasi dan Informatika	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	Dinas Kominfo	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
331	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	13,04	Dinas Kominfo	
332	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	94	Dinas Kominfo	
333	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	94	Dinas Kominfo	
334	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas Kominfo	
335	Komunikasi dan Informatika	Persentase data yang dapat berbagi pakai	33	Dinas Kominfo	
336	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	45,45	Dinas Kominfo	
337	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0	Dinas Kominfo	
338	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	5	Dinas Kominfo	
339	Komunikasi dan Informatika	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	0,2	Dinas Kominfo	
340	Komunikasi dan Informatika	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Kominfo	
341	Komunikasi dan Informatika	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Kominfo	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
342	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi dan UKM	
343	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi dan UKM	
344	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,86	Dinas Koperasi dan UKM	
345	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	41	Dinas Koperasi dan UKM	
346	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	12,14	Dinas Koperasi dan UKM	
347	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,21	Dinas Koperasi dan UKM	
348	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15,01	Dinas Koperasi dan UKM	
349	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Dinas Koperasi dan UKM	
350	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25,83	Dinas Koperasi dan UKM	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
351	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi dan UKM	
352	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,1	Dinas Koperasi dan UKM	
353	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24,5	Dinas Koperasi dan UKM	
354	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,1	Dinas Koperasi dan UKM	
355	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	50	Dinas Koperasi dan UKM	
356	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	Dinas Koperasi dan UKM	
357	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1,87	Dinas Koperasi dan UKM	
358	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,34	Dinas Koperasi dan UKM	
359	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,27	Dinas Koperasi dan UKM	
360	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,64	Dinas Koperasi dan UKM	
361	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	1,97	Dinas Koperasi dan UKM	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
362	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	DPMPTSP	
363	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
364	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	6	DPMPTSP	
365	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	DPMPTSP	
366	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	7	DPMPTSP	
367	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	3	DPMPTSP	
368	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	331	DPMPTSP	
369	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	4470	DPMPTSP	
370	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	4413615800	DPMPTSP	
371	Penanaman Modal	Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat kabupaten/kota	92	DPMPTSP	
372	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	175	DPMPTSP	
373	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	4470	DPMPTSP	
374	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
375	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
376	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
377	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
378	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	924	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
379	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	3	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
380	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Kominfo	
381	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	33	Dinas Kominfo	
382	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	33	Dinas Kominfo	
383	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Kominfo	
384	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Kominfo	
385	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	94	Dinas Kominfo	
386	Statistik	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	94	Dinas Kominfo	
387	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	Dinas Kominfo	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
388	Persandian	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	Dinas Kominfo	
389	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	Dinas Kominfo	
390	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	Dinas Kominfo	
391	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	21	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
392	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	21	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
393	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	21	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
394	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	221	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
395	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	21	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
396	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	21	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
397	Kebudayaan	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
398	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	21	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
399	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	21	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
400	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	431	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
401	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	8419	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
402	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	431	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
403	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	7	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
404	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	5	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
405	Kebudayaan	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
406	Kebudayaan	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	18	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
407	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	3	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
408	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
409	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	5	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
410	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,214	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
411	Perpustakaan	Persentase kermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0,052	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
412	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,115	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
413	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	62,89	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
414	Perpustakaan	Jumlah pasyarakatangemar membaca di masyarakat	470	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
415	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
416	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
417	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	304	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
418	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	99,94	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
419	Kearsipan	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
420	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
421	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,036	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
422	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	629	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
423	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
424	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
425	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
426	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
427	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
428	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	10894	Dinas Perikanan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
429	Kelautan dan Perikanan	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100	Dinas Perikanan	
430	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Perikanan	
431	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	9	Dinas Perikanan	
432	Kelautan dan Perikanan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	66237000	Dinas Perikanan	
433	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	142	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
434	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	706	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
435	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	397	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
436	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1522	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
437	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	8	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
438	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	1	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
439	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	80	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
440	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	4,5	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
441	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	93,3	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
442	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	16	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
443	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	82	Dinas Pertanian	
444	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan	223371	Dinas Pertanian	
445	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	15	Dinas Pertanian	
446	Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	57,7	Dinas Pertanian	
447	Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100	Dinas Pertanian	
448	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	50.86	Dinas Pertanian	
449	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
450	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
451	Kehutanan	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
452	Kehutanan	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
453	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
454	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
455	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
456	Perdagangan	Persentase penerbitan TDG	89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
457	Perdagangan	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
458	Perdagangan	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
459	Perdagangan	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
460	Perdagangan	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
461	Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
462	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0.86	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
463	Perdagangan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	41329.4	Dinas Perindag	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
464	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	95.19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
465	Perdagangan	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
466	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
467	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
468	Perindustrian	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
469	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
470	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	7.31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
471	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
472	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
473	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi

2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 67.786. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 71.215	95,1850032	Dinas Pendidikan	
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 242.086 Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 235.406	102,8376507	Dinas Pendidikan	
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 116.832. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 119.283	97,9452227	Dinas Pendidikan	
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum	60,6542056	Dinas Pendidikan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 3.894. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 6.420			
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 2.920. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 2.016.905	1,4477628	Dinas Kesehatan	
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 21. Jumlah RS di kabupaten/kota = 24.	87,5	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 46.300. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 47.156	98,1847485	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 44.349. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 45.011	98,5292484	Dinas Kesehatan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 39.938. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 42.868	93,1650649	Dinas Kesehatan	
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 152.545. Jumlah balita di kabupaten/kota = 165.231	92,322264	Dinas Kesehatan	
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 358.431. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 369.499	97,0045927	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 1.406.863. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 1.594.286	88,2440792	Dinas Kesehatan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 198.797. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 203.345	97,763407	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 536.233. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 564.456	94,9999646	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 45.133. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 48.896	92,304074	Dinas Kesehatan	
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 3.275. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 3.381	96,8648329	Dinas Kesehatan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 62.589. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 56.203	111,3623828	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 54.030. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 63.449	85,1550064	Dinas Kesehatan	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) =0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota;	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi;	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 18.228. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 23.068	79,0185538	Dinas SDA BM BK	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota = 353.963. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh	77,5000766	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
			kabupaten/kota tersebut = 456.726.			
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic;	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 397.132. Jumlah rumah di Kabupaten A = 456.726	86,9519143	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 830. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 830	100	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota;	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = $1.537.127 \text{ Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota} = 2.040,951$	75,314253	Dinas SDA BM BK	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi;	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = $137 \cdot \text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota} = 2.756$	4,9709724	Dinas SDA BM BK	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 571. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 603	94,6932007	Dinas SDA BM BK	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 61. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 125	48,8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani;	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 114,3. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 533,5	21,4245548	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 10.273. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 484.463	2,1204922	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 37.462. Jumlah unit rumah kab/kota = 484.463	7,7326855	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan;	Jumlah pengaduan yang ditangani = 1.181 Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 1.211	97,5227085	Satpol PP	
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = 4. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 4	100	Satpol PP	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 0. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang	0	BPBD	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
			ditetapkan = 0			
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 0. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 0	0	BPBD	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 0. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 0	0	BPBD	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 152. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 241	63,0705394	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	8,36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 116. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 116	100	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota;	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 6.556 Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 6.556	100	Dinas Sosial	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 14. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota =14	100	Dinas Tenaaga Kerja	
2.a.2	Tenaga Kerja	 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 10.237 Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 1.073.496	0,9536132	Dinas Tenaaga Kerja	
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 75.568,66. Jumlah tenaga kerja = 1.073.496	7,0394915	Dinas Tenaaga Kerja	
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 3.690. Jumlah Perusahaan = 4.185	88,172043	Dinas Tenaaga Kerja	
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota;	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 1.711. Jumlah pencaker yang terdaftar = 2.535	67,495069	Dinas Tenaaga Kerja	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = 202.983.088.689. Jumlah seluruh belanja langsung APBD = 4.573.427.170.286	4,4383147	Dinas PPPAPPKB	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 152. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 152	100	Dinas PPPAPPKB	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 43. Jumlah penduduk perempuan = 724.484	5,9352587	Dinas PPPAPPKB	
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan);	Jumlah cadangan pangan = 18,91. Jumlah kebutuhan pangan = 911.456	2,0747025	Dinas Ketahanan Pangan	
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi = 0. seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk	Jumlah penetapan tanah	100	Dinas	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		pembangunan fasilitas umum	untuk pembangunan fasilitas umum = 2. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 2.		Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal;	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0. Luas tanah diatas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang diterbitkan = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi;	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 0. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		72,67	Dinas Lingkungan Hidup	
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 163.484,23. Jumlah seluruhTotal vol timbunan sampah tahun berjalankabupaten/kota = 411.211,01	39,7567735	Dinas Lingkungan Hidup	
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 31. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 31.	100	Dinas Lingkungan Hidup	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman = 1.456.399 Jumlah penduduk wajib KTP-el =	98,6781696	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
			1.457.908			
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 157.184. Jumlah anak usia 0-17 tahun 518.767	30,2995372	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 518.767. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 590.083	87,9142426	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama;	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 10. Jumlah PD = 32	31,25	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.1.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 262. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.1.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 9. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 262	3,4351145	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,7	Dinas PPPAPPKB	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 170.890. Jumlah Pasangan Usia Subur = 276.772	61,7439625	Dinas PPPAPPKB	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 41.626. Jumlah Pasangan Usia Subur = 276.772	15,0398162	Dinas PPPAPPKB	
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,5	Dinas Perhubungan	
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,42	Dinas Perhubungan	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo;	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 53. Jumlah PD = 53	100	Dinas Kominfo	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi =29. Jumlah Layanan Publik = 29	100	Dinas Kominfo	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota;	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 50.238. Jumlah penduduk = 2.031.022	2,473533	Dinas Kominfo	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas;	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 70. Jumlah seluruh koperasi = 453	15,4525386	Dinas Koperasi dan UKM	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha;	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 300. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 140.059	0,2141954	Dinas Koperasi dan UKM	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota;	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 503.047.86 Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 3.910.567.94	12,8638057	DPMPSTP	
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 1.115. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 482.517	0,2310799	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 117.321. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 482.517	24,3143765	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	37	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 33. jumlah PD = 33	100	Dinas Kominfostan	
2.s.2	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 33 jumlah PD = 33	100	Dinas Kominfostan	
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah;	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 0. Jumlah area penilaian = 0.	0	Dinas Kominfostan	
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 0. Jumlah cagar budaya yang terdata = 21	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		67,01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		51,57	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		74,99	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		108,66	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan = 88.770,92. Target Produksi Perikanan = 139.461	63,6528635	Dinas Perikanan	
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 1.422. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 100	1.422	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota;	(Jumlah wisatawan tahun n) = 833.243. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 1.260.000	66,1303968	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi;	Jumlah kamar yang terjual = 19.238. Jumlah kamar yang tersedia = 336.165	5,7227849	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 3.357.470.000. Total PDRB berlaku = 127.546.550.000	2,6323487	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realisasi PAD dari sektor pariwisata = 61.036.558.117. Total Realisasi PAD = 801.699.510.966	7,613396	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
3.c.1	Pertanian	Produktivitas; pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun;	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 780.148. luas panen = 107.927	722,8478509	Dinas Pertanian	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota;	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -2 Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 7	-28,5714286	Dinas Pertanian	
3.d	Kehutanan			0		Sudah menjadi kewenangan Provinsi
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota;	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 0	0		Sudah menjadi kewenangan Provinsi
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan);	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 0. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk;	Realisasi = 26.329,451 RDKK = 33.285,5213	79,1018136	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku;	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 14.946. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 15.702.	95,1853267	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota;	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 3.445. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 1.971.	174,7843734	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait;	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota;	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini;		50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.h	Transmigrasi			0		Sudah menjadi kewenangan Provinsi

3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan;	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 409.526.753.597. Jumlah APBD = 3.864.372.930.375,8	10,5974957	BKAD	
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD =1.049.802.528.387. Jumlah Pendapatan APBD = 3.853.330.105.887	27,2440331	BKAD	
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);		3,178	Inspektorat	
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);		3	Inspektorat	
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures);	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 2.531.855.681.019,8 jumlah belanja APBD = 3.864.372.930.375,8	65,5178919	BKAD	
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan;		4	BKAD	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama;	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 1.843	0	Bagian PBJ	
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif;	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 195. Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = 7.054	2,764389	Bagian PBJ	
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 2.482.892.865.283. total belanja operasi dan modal = 3.974.357.168.629	62,4728166	BKAD	
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) – Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 68.289.692.664. Jumlah Nilai	5,6560542		

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 264.000.000. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 264.000.000	100	Bapenda	
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 6. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	50	BKAD	

C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu menunjukkan upaya pertanggung jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berisikan Target Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja. Definisi Perjanjian Kinerja berdasarkan PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Kesepakatan Kinerja yang terukur antara pemberi amanah dengan penerima amanah.

Secara umum tujuan perjanjian kinerja Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023, antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya.
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Kabupaten Deli Serdang.

5. Sebagai dasar dalam pengukuran sasaran kinerja, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
6. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (*Reward*) maupun sanksi (*Punishment*).

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Deli Serdang Tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Deli Serdang Tahun 2023 sesuai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Deli Serdang yang selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Deli Serdang 2019 - 2024

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET BERSIKAWAL TAHUN				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			FONDAS KABUPATEN SERDANG
			2023		2024		2019	2021	2024	2022	2023	2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI							
1	Ratunata (sua serkotat)	Tahun	4,46	10,09	9,98	10,10	10,00	10,00	10,04	10,00	10,12	10,11	10,11
2	Harapan lama serkotat Usur	Tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	P-RPJMD	P-RPJMD	P-RPJMD	P-RPJMD	12,17	12,35	12,58
3	Harapan Piso	Tahun	71,51	71,46	72,62	71,77	71,70	71,75	71,80	71,7	71,87	71,87	71,97
4	Nilai PDSD (ADMS)	Tribun	122,02	130,11	133,49	133,1	146,04	155,77	173,1	146,04	155,77	173,10	173,10
5	Jumlah Pile Investasi Berkala Nasional (PMN dan PNU)	Rp. Aka	1.346.694,2 0	1.728.633,0 0	1.548.654,2 0	2.704.296,5 0	1.363.837,2 0	1.585.837,2 0	1.548.654,2 0	1.363.837,2 0	2.772.893,5 8	2.772.893,5 8	2.772.893,5 8
		US \$	183.200,60	111.287,99	184.996,80	31.492,70	184.996,80	184.996,80	183.200,60	184.996,80	104.529,62	134.529,62	104.529,62
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Perserit	n/a	n/a	n/a	n/a	P-RPJMD	P-RPJMD	P-RPJMD	68	69	70	70
7	Jalan dalam Kondisi baik inspi	N	72	72,54	73	73,19	74	75	76	74	75	76	76
8	Kecamatan dalam Kondisi Baik	N	73	73,80	76	76,60	79	79	80	79	79	80	80
9	Densitas Ancal	N	0,16	0,163	0,11	0,14	0,14	0,13	0,12	0,14	0,13	0,11	0,12

No.	NOMOR	SASARAN	TARGET/REALISASI AWAL TAHUN				TARGET SEBELUM PERUBAHAN BIRING			TARGET SETELAH PERUBAHAN BIRING			KONDISI AWAL BIRING	
			2022		2023		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
10	Kualitas Cakupan Pelayanan Air Minum Bersih	%	75,3	72,52	76,5	76,17	77,5	78,5	80	77,5	78,5	80	80,00	
11	Pemerataan Rantai Pasok	%	85,5	84,73	86,5	85,8	82,5	86,5	91	87,5	88,5	90	90,00	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL)	Poin	63	63,90	63	59	64	64	64	64	64	64	64	
13	Indeks Kesehatan Umat Beragama	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	P-00PMD	P-00PMD	P-00PMD	P-00PMD	P-00PMD	70,40	78,70	76,70
14	Indeks Ketahanan Umat Beragama	%	75	91,1	80	80,13	85	90	95	85	90	95	85	
15	Operasi BPB	Opasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
16	Nilai Akumulatif Kinerja Instansi Desentralisasi (NAKID)	Nilai	81,36	84,39	70	67,06	71,55	75,70	80,68	70,01	71,00	72,00	72	
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	84,15	82,71	67,52	67,22	71,68	75,47	77,35	71,68	75,47	77,35	77,35	

Sumber: Data diolah, Bappenas/Itbang 2022

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama Bupati Deli Serdang, berhasil tidaknya pencapaian Bupati Deli Serdang untuk Tahun 2023 dapat diukur dengan tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut:

Tabel 2.6
Target Kinerja

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	10,12
		Rata-rata harapan lama sekolah	13,37
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	71,87
3.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)	159,77
4.	Meningkatnya Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	2.772.893,58
			104.529,62
5.	Meningkatnya kesempatan kerja dan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	berusaha		
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi	Jalan dalam Kondisi baik	75
		Irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik	79
7.	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,13
		Cakupan Pelayanan Air Minum	78,5
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	88,5
8.	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64
9.	Meningkatnya rasa aman, penegakan hukum dan ketertiban	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,4
		Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	90
10.	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	71
11.	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,47

Sumber data: Bagian Organisasi Setdakab Deli Serdang 2023

2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *Reward* (penghargaan) dan *Punishment* (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai

dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dasar yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan Perangkat Daerah dilingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama dilingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 11 sasaran dan 17 indikator kinerja.

Tabel 2.7
Skala Pengukuran Capaian Kinerja

NO.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	> 90 – 100	Memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Sangat Baik
3.	BB	> 70 – 80	Baik
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik
5.	CC	>50 – 60	Agak Kurang
6.	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rencana Tingkat Capaian

Sedangkan dalam pengukuran target perjanjian kinerja mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan – kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dapat dilihat dari alat ukur keberhasilan dalam pencapaian target perjanjian kinerja yaitu sasaran dan indikator kinerja utama.

Tabel 2.8
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interprestasi
1.	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,12	10,28	101,58	Memuaskan
		2. Rata-Rata Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,39	100,15	Memuaskan
						100,86	Memuaskan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interprestasi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	Tahun	71,87	73,65	102,48	Memuaskan
						*102,48	Memuaskan
3.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)	Triliun	159,77	139,09	87,05	Sangat Baik
						87,05	Sangat Baik
4.	Meningkatnya investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PDMN dan PMA)	Rp. Juta	2.772.893,58	2.636.565,00	95,08	Memuaskan
			US \$	104.529,62	120.071,00	114,68	Memuaskan
						104,88	Memuaskan
5.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69	66,84	96,87	Memuaskan
						96,87	Memuaskan
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi	1. Jalan dalam Kondisi Baik	%	75	75,31	100,41	Memuaskan
		2. Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	79	79,02	100,03	Memuaskan
						100,22	Memuaskan
7.	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman	1. Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,13	0,14	92,31	Memuaskan
		2. Cakupan Pelayanan Air Minum	%	78,5	59,87	76,26	Baik
		3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	88,5	64,89	73,32	Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interprestasi
						80,63	Sangat Baik
8.	Meningkatnya pengelolaan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64	61,18	95,59	Memuaskan
						95,59	Memuaskan
9.	Meningkatnya rasa aman, penegakan hukum dan ketertiban	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78,4	75,27	96,01	Memuaskan
		2. Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	90	89,00	98,89	Memuaskan
						97,45	Memuaskan
10.	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Memuaskan
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71	71,21	100,30	Memuaskan
						100,15	Memuaskan
11.	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	75,47	84,97	112,58	Memuaskan
						112,58	Memuaskan

Sumber data : Bagian Organisasi Setdakab Deli Serdang Tahun 2023

Keterangan :

* : Data BPS Pada Tahun 2023

3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023, berdasarkan pengukuran kinerja dan IKU sebagai acuan dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 11 sasaran dan 17 indikator kinerja dari 5 Misi dan 5 tujuan. Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 2 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut yaitu :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,12	10,28	101,58	10,10	10,27
Rata-Rata Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,39	100,15	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				100,86		

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang 2023

Berdasarkan tabel 2.9 diatas maka tingkat persentase capaian rata-rata pada Tahun 2023 untuk Sasaran 1, *Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat* sebesar 100,86 % yang memiliki interpretasi Memuaskan.

Indikator Kinerja *Rata-Rata Lama Sekolah* hal ini didapat dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, yang mana data yang digunakan data Tahun 2023, *Rata-Rata Lama Sekolah* merupakan salah satu komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Deli Serdang bersekolah selama **10,28** tahun atau mencapai SMA/K kelas I pada tahun 2023. Rumus untuk menghitung Rata- Rata Lama Sekolah adalah sebagai berikut :

$$RLS = \frac{\sum f_i \times s_i}{\sum f_i}$$

Keterangan:
RLS = Rata – rata lama sekolah
 f_i = Frekuensi penduduk berumur 10 tahun ke atas pada jenjang pendidikan i , $i = 1,2, \dots, 11$
 s_i = Skor masing-masing jenjang pendidikan

Rata-rata lama sekolah (MYS) di Deli Serdang cukup tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yang hanya 9,82 tahun. Hasil yang cukup menggembirakan, MYS Deli Serdang berada di urutan ke-delapan di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Rata-rata lama Sekolah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara Tahun 2023

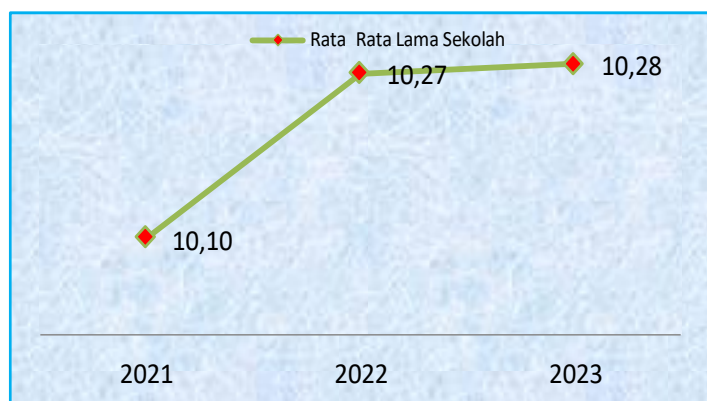
No	Kabupaten dan Kota	Rata-Rata Lama Sekolah
1	Medan	11,62
2	Pematangsiantar	11,58
3	Binjai	11,19
4	Padangsidempuan	11,12
5	Tebing Tinggi	10,86
6	Toba	10,59
7	Sibolga	10,44
8	Deli Serdang	10,28
9	Tapanuli Utara	10,09
10	Karo	10,03
11	Humbang Hasundutan	10,01
12	Dairi	9,88
13	Sumatera Utara	9,82
14	Simalungun	9,72
15	Tanjungbalai	9,68
16	Pakpak Bharat	9,61
17	Padang Lawas Utara	9,55
18	Tapanuli Selatan	9,51
19	Labuhan Batu	9,49
20	Samosir	9,47
21	Padang Lawas	9,43
22	Labuhanbatu Selatan	8,93

No	Kabupaten dan Kota	Rata-Rata Lama Sekolah
23	Tapanuli Tengah	8,87
24	Labuhanbatu Utara	8,87
25	Serdang Bedagai	8,85
26	Mandailing Natal	8,84
27	Asahan	8,83
28	Langkat	8,73
29	Gunungsitoli	8,65
30	Batu Bara	8,5
31	Nias Barat	7,07
32	Nias Utara	6,85
33	Nias Selatan	6,48
34	Nias	6,14

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2023

Sedangkan capaian Rata rata Lama Sekolah di Kabupaten Deli Serdang selama kurun waktu 2021-2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup berarti dan signifikan, sebagaimana pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.1
Rata rata Lama Sekolah 2021-2023



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya bersekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator HLS hanya dapat disajikan pada tahun 2023 karena adanya perubahan pada dokumen RPJMD Deli Serdang Tahun 2019-2024, yang sebelumnya Indikator ini belum menjadi Indikator Sasaran. Rumus hitung untuk indikator HLS adalah sebagai berikut :

$$EYS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana:

- EYS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;
- E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;
- P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;
- i : Usia ($a, a+1, \dots, n$);
- FK : Faktor koreksi.

untuk capaian kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara Tahun 2023

Kabupaten Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2021	2022	2023
Sumatera Utara	13.27	13.31	13.48
Nias	12.84	13.04	13.30
Mandailing Natal	13.61	13.85	13.86
Tapanuli Selatan	13.35	13.37	13.58
Tapanuli Tengah	13.07	13.24	13.49
Tapanuli Utara	13.70	13.72	13.73
Toba	13.46	13.58	13.59
Labuhan Batu	12.74	12.95	13.25
Asahan	12.61	12.63	12.64
Simalungun	12.79	12.81	12.82
Dairi	13.11	13.24	13.32
Karo	12.77	12.95	13.25
Deli Serdang	13.36	13.38	13.39
Langkat	13.24	13.26	13.27

Kabupaten Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2021	2022	2023
Nias Selatan	12.27	12.48	12.78
Humbang			
Hasundutan	13.29	13.31	13.32
Pakpak Bharat	13.87	13.89	13.90
Samosir	13.48	13.50	13.51
Serdang Bedagai	12.61	12.63	12.64
Batu Bara	12.64	12.93	13.11
Padang Lawas Utara	13.04	13.23	13.53
Padang Lawas	13.27	13.41	13.70
Labuhanbatu Selatan	13.01	13.12	13.42
Labuanbatu Utara	13.19	13.29	13.57
Nias Utara	13.04	13.06	13.36
Nias Barat	12.95	12.97	12.98
Sibolga	13.28	13.30	13.42
Tanjungbalai	12.62	12.90	13.14
Pematangsiantar	14.57	14.59	14.60
Tebing Tinggi	12.73	12.91	13.12
Medan	14.75	14.77	14.78
Binjai	13.63	13.87	14.17
Padangsidempuan	14.56	14.58	14.59
Gunungsitoli	13.75	13.77	13.78

Sumber : <https://sumut.bps.go.id/indicator/26/76/1/harapan-lama-sekolah.html>

Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 1 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Umur Harapan Hidup	Tahun	71,87	73,65	102,48	71,77	72,07
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2				102,48		

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.12 diatas maka tingkat persentase capaian pada Tahun 2023 untuk Sasaran 2 meningkatnya derajat kesehatan masyarakat capaiannya sebesar 102,48 % pada Tahun 2023 yang memiliki interprestasi Memuaskan.

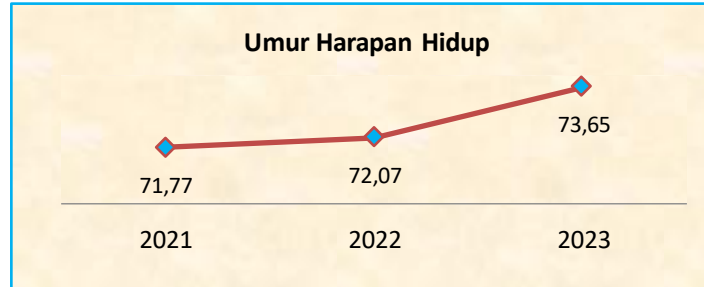
Indikator kinerja umur harapan hidup merupakan indikator yang menggunakan data hasil pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar Perangkat Daerah, yaitu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Umur Harapan Hidup pada Tahun 2023 sebesar 73,65. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator Umur Harapan Hidup memiliki interprestasi Memuaskan dengan capaian 102,48 %.

Umur Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun indikator ini adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Umur Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Faktor yang mempengaruhi Umur Harapan Hidup yaitu : faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan mulai dari kandungan sampai lanjut usia. Oleh karena itu pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan mulai dari kandungan sampai lanjut usia tentunya akan

mempengaruhi keberhasilan Umur Harapan Hidup. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para lanjut usia, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang juga membentuk dan memberdayakan Posyandu Lanjut Usia di masyarakat. Selain itu Dinas Kesehatan juga mengintegrasikan Posyandu Lanjut Usia dengan lintas sektor. Ada beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target peningkatan Umur Harapan Hidup adalah (1) Meningkatnya sosial ekonomi masyarakat; (2) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat seiring dengan semakin giatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); (4) Meningkatnya kualitas lingkungan (rumah sehat, air bersih, sarana sanitasi, pembuangan air limbah, tempat sampah, dan kepemilikan jamban), tempat umum dan pengelolaan makanan, serta sarana pengolahan limbah di sarana pelayanan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2.2
Umur Harapan Hidup Kab.Deli Serdang Tahun 2021 s/d 2023



Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang **73,65** tahun yang merupakan realisasi pada Tahun 2023. Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang cukup tinggi yang hampir sebanding dengan Provinsi Sumatera Utara yang 73,67 tahun. Hasil yang cukup memuaskan bahwa Kabupaten Deli Serdang berada di urutan kedelapan belas di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Umur Harapan Hidup Kabupaten dan Kota
Sumatera Utara Tahun 2023

No	Kabupaten dan Kota	Umur Harapan Hidup
1	Medan	74,76
2	Pematangsiantar	74,75
3	Toba	74,22
4	Binjai	74,18
5	Karo	74,16
6	Langkat	74,14
7	Dairi	74,13
8	Tapanuli Utara	74,1
9	Samosir	74,1
10	Simalungun	74,08
11	Tebing Tinggi	74,07
12	Humbang Hasundutan	74,07
13	Labuanbatu Utara	74,06
14	Gunungsitoli	74,03
15	Sibolga	74,02
16	Tanjungbalai	74,01
17	Sumatera Utara	73,67
18	Deli Serdang	73,65
19	Padangsidempuan	73,54
20	Asahan	73,39
21	Serdang Bedagai	73,11

No	Kabupaten dan Kota	Umur Harapan Hidup
22	Labuhan Batu	72,88
23	Batu Bara	72,63
24	Pakpak Bharat	72,61
25	Labuhanbatu Selatan	72,46
26	Nias Barat	72,3
27	Nias Utara	72,12
28	Nias	71,74
29	Tapanuli Tengah	71,76
30	Mandailing Natal	71,72
31	Tapanuli Selatan	71,61
32	Nias Selatan	71,61
33	Padang Lawas Utara	71,57
34	Padang Lawas	71,52

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Sasaran 3 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 1 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

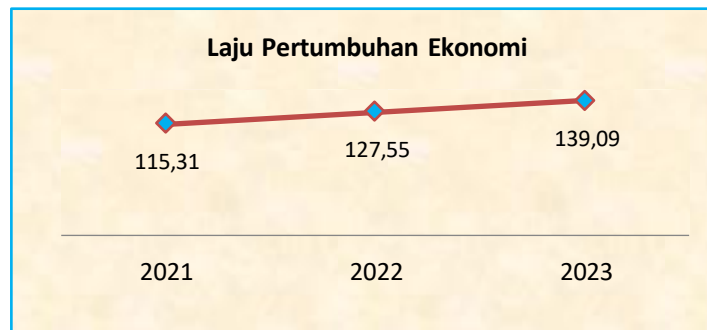
Tabel 2.14
Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	%		
				Realisasi		
PDRB (ADHB)	Triliun	159,77	139,09	87,05	115,31	127,55
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3				87,05		

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.14 diatas maka tingkat capaian rata-rata pada Tahun 2023 untuk Sasaran 3, *Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan* mempunyai realisasi sebesar 87,05 % pada Tahun 2023 memiliki interpretasi Sangat Baik.

Grafik 2.3
Nilai PDRB (ADHB) 2021 s/d 2023



Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dari target sebesar 159,77 terealisasi sebesar 139,09 maka capaian persentasenya 87,05 %. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan semakin tinggi pada Tahun 2024 didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung konektivitas dan produksi diharapkan lebih menguat di Tahun 2024, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja penanaman modal di Kabupaten Deli Serdang menjadi lebih baik. Letak Kabupaten Deli Serdang yang strategis dan ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai dapat menjadi penarik bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah ini. Dan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang diprediksi terus membaik pada Tahun 2024, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang secara tidak langsung, mengingat membaiknya kinerja ekspor, investasi serta konsumsi rumah tangga yang secara perlahan sudah mulai tumbuh. Beberapa sektor utama penggerak ekonomi Kabupaten Deli Serdang seperti industri pengolahan dan konstruksi secara perlahan sudah semakin membaik seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi hal-hal diatas adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan pada sektor pendidikan;
2. Pembangunan Kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang cukup dan memadai;
Adapun arah penyediaan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang antara lain adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
 - b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku)
 - c. Meningkatkan infrastruktur air bersih
 - d. Meningkatkan penyediaan air bersih
 - e. Meningkatkan infrastruktur perumahan
 - f. Meningkatkan layanan angkutan darat
 - g. Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan budaya pelayanan umum yang prima bagi masyarakat;
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan yang lebih adil;
7. Mempertahankan kerukunan beragama dan menjunjung tinggi norma-norma kearifan lokal. Dalam upaya mempertahankan kerukunan beragama dan menjunjung tinggi norma-norma kearifan lokal, maka arah kebijakan yang ditempuh antara lain adalah:
 - a. Pembinaan kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
8. Penerapan teknologi dalam peningkatan daya saing daerah.

Indikator Kinerja PDRB (ADHB) dari target sebesar 159,77 dapat terealisasi sebesar 139,09 untuk PDRB (ADHB) Kabupaten Deli Serdang, angka ini bersumber dari BPS Sumatera Utara Tahun 2023, namun masih bersifat sementara. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp109,33 triliun menjadi Rp139,09 triliun. Peningkatan PDRB (ADHB) menunjukkan terjadi perkembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang semakin besar yang sesuai dengan harga yang berjalan.

Sasaran 4 Meningkatnya Investasi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Investasi*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 1 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut yaitu :

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Sasaran 4

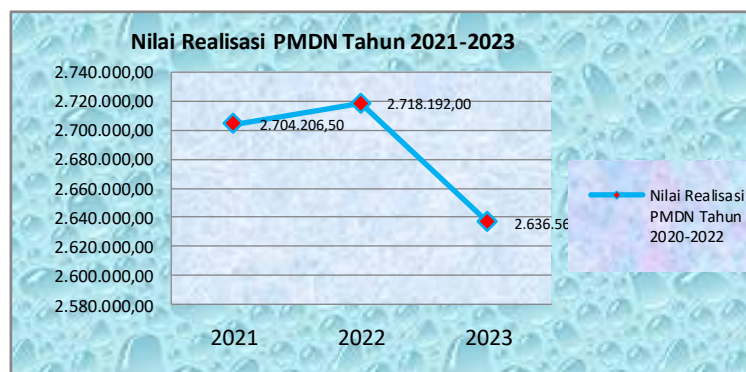
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	PMDN/Rp.Juta	2.772.893,58	2.636.565,00	95,08	2.704.206,50	2.718.192,00
	PMA/US\$	104.529,62	120.071,00	114,68	61.492,70	83.092,40
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 4				104,88		

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 2023

Berdasarkan tabel 2.15 diatas maka tingkat capaian rata-rata pada Tahun 2023 untuk Sasaran 4, *Meningkatnya Investasi* memiliki rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 104,88 % memiliki interpretasi Memuaskan, yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA).

Capaian indikator kinerja *Nilai Realisasi Investasi PMDN* pada Tahun 2023 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang telah melebihi target dengan presentase capaian kinerja sebesar 173,82 %. Pada Tahun 2024 diharapkan adanya program promosi dan kerjasama antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi dan juga mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli, dan hambatan investasi lainnya dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif dan juga mengintensifkan promosi peluang investasi. Nilai investasi PMDN di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2021-2023 dapat dilihat secara jelas melalui grafik ini :

Grafik 2.4
 Nilai Realisasi PMDN Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 2023

Sedangkan capaian indikator kinerja *Nilai Realisasi Investasi PMA* pada Tahun 2023 mencapai persentase kinerja dari target yaitu 114,68 %. Jika dibandingkan nilai realisasi investasi PMA tahun 2023 sebesar US\$ 120.071,00 (ribu) terhadap nilai realisasi investasi PMA tahun 2022 sebesar US\$ 83.092,40 (ribu), maka terjadi kenaikan investasi. Hal ini terjadi karena adanya pengawasan pengendalian PMA untuk tingkat Kabupaten. Hal ini dapat dilihat lebih jelas melalui grafik di bawah ini :

Grafik 2.5
 Nilai Realisasi PMA Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 2023

Kebijakan arah pembangunan di Kabupaten Deli Serdang sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim berinvestasi di Kabupaten Deli Serdang. Kebijakan arah pembangunan di Kabupaten Deli Serdang yang bertumpu pada 3 pilar pembangunan yaitu: peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dukungan para stakeholders dari investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sangat diharapkan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pengambilan kebijakan yang strategis dalam rangka untuk meningkatkan investasi daerah harus menjadi perhatian yang serius, seperti menciptakan iklim usaha yang sehat, pemberian kemudahan dan kejelasan prosedur perizinan, serta mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah telah menerapkan layanan terpadu satu pintu dengan ketersediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Deli Serdang. Melalui Dinas ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta mendorong percepatan penciptaan perluasan investasi bagi daerah dan juga tercipta iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Sasaran 5 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 1 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut yaitu :

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69	66,84	96,87	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 5				96,87		

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.16 di atas maka tingkat capaian rata-rata pada Tahun 2023 untuk Sasaran 5, *Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha* memiliki rata-rata capaian presentase kinerja sebesar 96,87 pada Tahun 2023 memiliki interpretasi Memuaskan yang terdiri dari Indikator Kinerja yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Indikator kinerja *Persentase Kemiskinan* pada tahun 2023 merupakan indikator pada sasaran *Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Masyarakat*. Berdasarkan data informasi yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang, capaian pada tahun 2023 sebesar 3,44 dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 3,62 maka terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat terlihat secara jelas dengan grafik di bawah ini :

Grafik 2.6
Persentase Kemiskinan 2021 s/d 2023



Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang 2023

Merujuk kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa TPAK merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah sebagian penduduk atau mereka yang sudah bekerja, sedang

mencari pekerjaan, pengangguran, ataupun mereka yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja (biasanya 15 tahun ke atas).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu :

1. Usia Angkatan Kerja

TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada masa tersebut umumnya mereka masih bersekolah dan merasa belum mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah, menurut golongan usia. TPAK terendah pada kelompok usia 15-19 tahun, dan kemudian akan meningkat seiring bertambahnya jumlah usia. Akan tetapi TPAK tertinggi berada pada golongan usia 45-49 tahun. Selanjutnya setelah melebihi usia 49 tahun, tingkat TPAK akan menurun secara perlahan-lahan. Penurunan tingkat TPAK secara tajam akan terjadi pada usia kerja lansia, yaitu diatas 60 tahun.

2. Jenis Kelamin

TPAK antara pria dan wanita berbeda. Biasanya TPAK wanita lebih rendah dibandingkan dengan TPAK. Hal ini erat kaitannya dengan system nilai masyarakat, bahwa pria memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah.

3. Pendidikan

Penduduk yang berpendidikan rendah biasanya mempunyai TPAK yang lebih tinggi dari kelompok lain. Hal ini disebabkan penduduk yang berpendidikan rendah relatif tidak punya banyak kebebasan untuk memilih-milih jenis pekerjaan.

Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Irigasi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “ *Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Irigasi* “ Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 2 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Jalan dalam kondisi baik	%	75	75,31	100,41	73,19	74,24
Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	79	79,02	100,03	76,65	78,04
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 6				100,22		

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang 2023

Berdasarkan tabel 2.17 diatas maka persentase capaian rata-rata pada Tahun 2023 untuk sasaran 6, *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Irigasi* sebesar 100,22 % memiliki interpretasi Memuaskan, yang terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Jalan dalam Kondisi Baik dengan capaian 100,41 % dan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dengan capaian 100,03 %.

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2020 s/d 2023 terjadi peningkatan diantara Tahun 2022 s/d 2023 sebesar 1,07 % Hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2022 sebesar 100,32 % sedangkan tahun 2023 sebesar 100,41 %. Jalan dalam kondisi baik tahun 2023 adalah penjumlahan dari panjang jalan dalam kondisi baik yaitu 1.490,129 Km dan panjang jalan dalam kondisi sedang yaitu 46,998 Km sehingga dihasilkan total panjang jalan dalam kondisi baik senilai 1.537,127 Km dibagi panjang seluruh jalan Kabupaten yaitu 2.060,292 Km sehingga 21 didapatkan Persentase Capaian tahun 2023 sebesar 100,41 %.

Data kinerja tercapai sebesar 100,22 % dikarenakan keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam menunjang Program Penyelenggaraan Jalan. Dan yang menjadi penyebab keberhasilannya adalah meningkatnya kinerja dan pemeliharaan

jaringan jalan sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan jalan, serta peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan fungsi jaringan jalan. Adapun indikator kinerja jalan dalam kondisi baik sampai pada akhir periode RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2023 dapat di lihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.7
Jalan Dalam Kondisi Baik 2021 s/d 2023



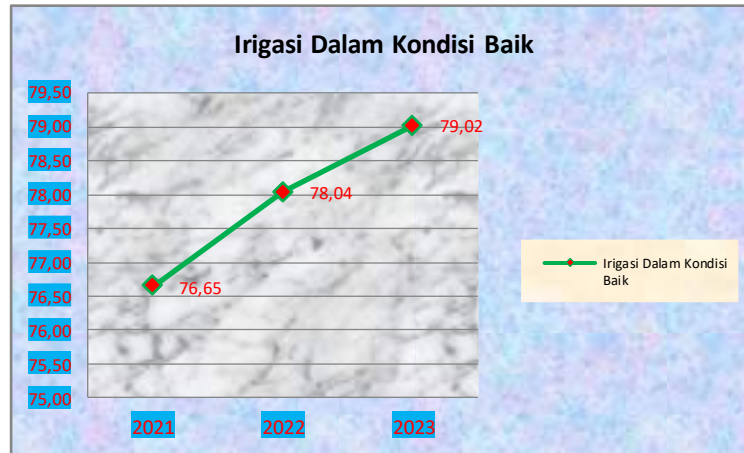
Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang 2023

Persentase Capaian luas irigasi dalam kondisi baik tahun 2022 s/d 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,98%, Luas irigasi dalam kondisi baik tahun 2023 yaitu 18.228 Ha dibagi luas irigasi Kabupaten yaitu 23.068 Ha sehingga didapatkan persentase capaian tahun 2023 sebesar 100,03%.

Dan yang menjadi penyebab keberhasilannya adalah meningkatnya kinerja dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi, serta peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan fungsi jaringan irigasi. Kedepannya diupayakan agar pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menunjang hasil pertanian dalam hal ini akses irigasi dapat lebih ditingkatkan. Adapun indikator kinerja Irigasi dalam kondisi baik sampai pada akhir periode RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2023 dapat di lihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.8

Irigasi Dalam Kondisi Baik 2021 s/d 2023



Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang 2023

Sasaran 7 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 3 indikator kinerja utama sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,13	0,14	92,31	0,14	0,15
Cakupan Pelayanan Air Minum	%	78,5	59,87	76,26	76,17	77,29
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	88,5	64,89	73,32	85,60	86,75
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 7				80,63		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang 2023
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang 2023

Berdasarkan tabel 2.18 diatas maka persentase capaian rata-rata pada Tahun 2023 untuk Sasaran 7 *Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman* memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 80,63 dan memiliki interpretasi Sangat Baik, yang terdiri dari Indikator Kinerja Persentase areal kawasan kumuh dengan realisasi 0,14, Indikator Kinerja Cakupan pelayanan air minum dengan realisasi 59,87 dan Indikator Kinerja Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dengan realisasi 64,89.

Indikator Kinerja persentase areal kawasan kumuh realisasi kinerja sebesar 0,14 % dari target 0,13 % maka persentase capaian kinerja sebesar 92,31 % pada Tahun 2023, hal ini menunjukkan menurunnya areal kawasan kumuh namun capaian kinerja belum memenuhi dari target yang direncanakan. Luasan permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 247 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang, yang meliputi 58 (lima puluh delapan) lokasi di 14 (empat belas) kecamatan dengan total luas sebesar 533,5 (lima ratus tiga puluh tiga koma lima) hektar.

Berdasarkan klasifikasi kewenangan di atas, dari total 533,5 hektar luasan kawasan kumuh yang tertuang di Surat Keputusan Bupati Deli Serdang, luasan kawasan kumuh yang penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi seluas 437,7 hektar yang meliputi 50 (lima puluh) lokasi di 13 (tiga belas) kecamatan. Luas kawasan kumuh yang tertangani sampai dengan tahun 2023 adalah 186,33 Ha. Maka Luas kawasan kumuh sampai tahun 2023 menjadi 347,17 Ha. Dengan demikian dibandingkan total wilayah Kabupaten Deli Serdang seluas 249.772 hektar, persentase areal kawasan kumuh untuk tahun 2023 adalah 0,14%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana luasan kawasan kumuh adalah sebesar 394,33 hektar, artinya ada capaian penurunan luasan kawasan kumuh di 2023 sebesar 11,96% atau sebesar 47,16 hektar. Berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2023 dalam menangani kawasan kumuh, maka persentase areal kawasan kumuh berkurang dan pencapaian kerjanya meningkat dari target capaian di 2023 sebesar 0,14%.

Capaian kinerja tercapai disebabkan oleh pencapaian penanganan kawasan kumuh yang terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, antara lain adalah :

1. Indikator Bangunan Gedung
2. Indikator Jalan Lingkungan
3. Indikator Drainase Lingkungan
4. Indikator Penyediaan Air Minum
5. Indikator Pengelolaan Limbah
6. Indikator Pengelolaan Persampahan
7. Indikator Proteksi Kebakaran

Dari ketujuh indikator di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Kawasan Permukiman telah berperan serta dalam penanganan kumuh di beberapa aspek diantaranya terkait bangunan gedung, pada tahun 2023 telah dilaksanakan program bedah rumah, yaitu bantuan material perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 246 unit bagi masyarakat kurang mampu di 22 kecamatan. Perbaikan rumah tidak layak huni berasal dari dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dan APBD. Perbaikan yang sumber dananya berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebanyak 7 unit dan dari APBD sebanyak 239 unit. Pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini mencapai keberhasilan 100% dari target yang ditetapkan. Di aspek jalan lingkungan, pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 132.466,98 m.

Pada aspek drainase lingkungan sejak tahun 2023 diampu oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Sedangkan penyediaan air minum, akses sanitasi, dan penyediaan infrastruktur persampahan diampu oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Untuk penanganan pengelolaan sampah wewenangnya berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan. Begitu juga terkait aspek proteksi kebakaran diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai penanganan kumuh kedepannya diperlukan koordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat, baik dari masyarakat, aparat pemerintah, pihak swasta dan mitra kerja.

Indikator Kinerja Cakupan pelayanan air minum, pada Tahun 2023 dengan capaian 76,26, Cakupan pelayanan air minum mendapatkan realisasi sebesar 59,87

dari target 78,50, pencapaian ini lebih rendah dari realisasi tahun-tahun sebelumnya, namun masih dalam kategori Baik. Jumlah rumah tangga (RT) di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 590.955 RT. Dari jumlah tersebut rumah tangga yang telah berakses air minum untuk tahun 2023 mencapai 352.966 RT. Ini menunjukkan penurunan rumah tangga yang berakses air minum dari tahun sebelumnya yaitu 450.122 RT.

Mengacu kepada dokumen P-RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, pemenuhan SPM Air Minum diproyeksikan sebesar 80,00 % dengan capaian sebanyak 365.381 RT. Dengan target sebesar 2,71% (12.385 RT) sampai dengan tahun 2024 tersebut maka diperlukan langkah-langkah percepatan untuk memenuhi capaian SPM Air Minum dimaksud terutama pengembangan jaringan perpipaan untuk mendukung peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) terpasang di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan dengan cara metode Swakelola Tipe 4 yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola, terdiri atas:

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Desa Bandar Kwala Kec. Galang dengan nilai Rp. 1.300.000.000 (jumlah 130 SR)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Desa Emplasmen Kec. Beringin dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (150 SR)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Desa Lantasan Lama Kec. Patumbak dengan nilai Rp. 1.270.000.000 (127 SR)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Desa Purwodadi Kec. Pagar Merbau dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (SR 150)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Desa Salam Tani Kec. Pancur Batu dengan nilai Rp. 500.000.000 (50 SR)

Total nilai anggaran kegiatan konstruksi SPAM sumber dana DAK sebesar Rp. 6.070.000.000.

Kegiatan SPAM yang dilaksanakan melalui APBD TA. 2023 terdiri atas:

- (a) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.
 - Peningkatan Jaringan Distribusi SPAM Regional Mebidang Kec. Sunggal dengan nilai Rp. 5.004.047.120 (1347 SR)
- (b) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - Pengadaan Bahan Material Perpipaan dengan nilai Rp. 11.778.000.000 (3.926 SR)
- (c) Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Perbaiki Sarana dan Prasarana Air Minum dengan nilai Rp.1.838.735 (23 paket)

Total nilai anggaran kegiatan konstruksi SPAM sumber dana APBD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 18.620.782.120. Dengan demikian maka jumlah total keseluruhan kegiatan SPAM pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang pada TA. 2023 adalah sebesar Rp. 24.690.782.120.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas diharapkan akan menyediakan akses air minum untuk RT yang lebih banyak lagi di Kabupaten Deli Serdang. Kinerja ini akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya infrastruktur dasar permukiman yang layak dan aman.

Indikator kinerja *Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi* realisasi kinerja sebesar 64,89 % dari target 88,5 % maka persentase capaian kinerja sebesar 73,32 % pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan penurunan kinerja dari realisasi tahun-tahun sebelumnya dan dari target yang direncanakan. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah, air hujan/ drainase dan sampah.

Sanitasi merupakan salah satu sarana prasarana dasar permukiman yang harus dimiliki setiap rumah. Sanitasi pada setiap rumah tinggal juga menentukan tingkat kesehatan keluarga tersebut. Oleh karena itu, akses sanitasi layak sangat penting. Sanitasi juga menjadi satu program prioritas pemerintah pusat yang ditargetkan mencapai 100%. Hasil perhitungan capaian kinerja sanitasi di Kabupaten

Deli Serdang tahun 2023 belum memenuhi target yaitu 64,89% dengan target 88,50% dan capaian kinerja 73,32%. Jumlah seluruh rumah tinggal di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 yaitu 454.267 rumah tinggal. Sedangkan jumlah rumah tinggal yang sudah mengakses sanitasi layak berjumlah 388.800 rumah tinggal. Bantuan penyediaan tangki septik tahun 2023 ini berhasil menyediakan sarana air limbah domestik untuk 707 rumah tinggal di 24 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Untuk yang bersumber dari DAK, ada pembangunan 6 unit IPAL di 6 lokasi desa di 6 kecamatan yang per unitnya diperkirakan mampu menyediakan sarana air limbah domestik untuk ±50 rumah tinggal. Selain itu ada juga pembangunan MCK baik MCK di fasilitas umum maupun di kawasan permukiman.

Adapun yang menjadi permasalahan sehingga target kinerja tidak tercapai yaitu di tahun 2023 ada penyesuaian dalam Detail Engineering Design (DED) yang menyebabkan direvisinya Standar Satuan Harga untuk pembangunan tangki septik, sehingga dari pagu anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembangunan sesuai target output dan harus dilakukan penyesuaian realisasi unit di lapangan. Selain itu ketersediaan lahan juga masih menjadi kendala, sulitnya mendapatkan lokasi dan hibah lahan dari warga masyarakat membuat pembangunan tidak dapat menjangkau ke banyak kecamatan dan desa yang masuk dalam kategori penanganan stunting. Untuk tahun berikutnya hal-hal di atas perlu menjadi perhatian dan perbaikan sehingga kondisi tidak tercapainya target kinerja diharapkan tidak terjadi lagi.

Sasaran 8 Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini sesuai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64	61,18	95,59	59,00	57,37
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 8				95,59		

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang 2023

Berdasarkan tabel 2.19 diatas maka tingkat capaian pada Tahun 2023 untuk Sasaran 8 *Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan* memiliki capaian kinerja memiliki interpretasi Memuaskan pada Tahun 2023, yang Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan realisasi 61,18 poin dari target 64 poin.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berhasil mendapat capaian kinerja dengan klasifikasi Memuaskan walaupun belum mencapai target, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain :

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam sudah menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- b. Terlaksananya sinergitas program penanggulangan dan pencemaran antar sektor terkait;
- c. Pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan terlaksana dengan baik;
- d. Terselenggaranya sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha untuk mengelola limbahnya dengan baik;

Sasaran 9 Meningkatkan Rasa Aman, Penegakan Hukum dan Ketertiban

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran "*Meningkatnya Rasa Aman, Penegakan Hukum dan Ketertiban*" Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 2 indikator kinerja utama sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78,4	75,27	96,01	-	-
Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	90	89,00	98,89	96,56	84,50
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 9				97,45		

Sumber : Satpol-PP dan Bakesbangpol Kabupaten Deli Serdang 2023

Berdasarkan tabel 2.20 diatas maka tingkat capaian rata-rata pada tahun 2023 untuk Sasaran 9 *Meningkatnya Rasa Aman, Penegakan Hukum dan Ketertiban* memiliki capaian kinerja sebesar 97,45 pada tahun 2023 memiliki interprestasi memuaskan

Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama berhasil mendapat capaian kinerja dengan klasifikasi Memuaskan. Dan indikator ini pertama sekali dimasukkan dalam IKU Bupati Deli Serdang di P-RPJMD Tahun 2023. Sehingga hasilnya belum bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 mencapai angka 75,27%. Angka indeks ini diperoleh dari hasil pengukuran tiga indikator yaitu :

(a) Toleransi : kerukunan umat beragama sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing;

(b) Kesetaraan : dalam interaksi tersebut tidak merendahkan agama satu atas agama yang lain, dengan kata lain setara dalam menjalankan agamanya, juga tidak mencampuradukkan dan melanggar norma-norma agama;

(c) Kerja sama : bekerja sama dalam membangun masyarakat, dengan prinsip saling bahu membahu dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam

mencapai tujuan bersama, bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Indikator Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berhasil mendapat capaian kinerja dengan klasifikasi Memuaskan, walaupun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu kurang 1 poin lagi, dari target 90 realisasi 89 dengan capaian 98,89%. Adapun Kendala yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai leading sektornya adalah :

1. Kurangnya Personil Untuk Menunjang Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Kurangnya Pegawai yang belum mengikuti Bimtek/Diklat PPNS.
3. Kurangnya anggaran dan sarana prasarana.
4. Kurangnya koordinasi instansi terkait perihal penegakan Perda dan Perkada.

Namun Satuan Polisi Pamong Praja mencoba melakukan berbagai upaya untuk mendukung tercapainya indikator *Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*, diantaranya dengan cara :

1. Menambah Penganggaran untuk penambahan Personil.
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satpol-PP melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan fisik dan mental anggota.
3. Menambah usulan anggaran dalam peningkatan sarana dan prasarana.
4. Melakukan Koordinasi secara intensif terhadap instansi terkait untuk mensinergikan program kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

Sasaran 10 Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 2 indikator kinerja utama sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71	71,21	100,30	67,08	70,18
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 10				100,15		

Sumber : BKAD dan Bagian Organisasi Kabupaten Deli Serdang 2023

Berdasarkan tabel 2.21, tingkat capaian rata-rata untuk sasaran 10 pada Sasaran *Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* dengan kategori memuaskan dengan kategori 100,15 % pada Tahun 2023, adapun sasaran ini terdiri 2 Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Opini BPK dengan realisasi WTP dari target WTP dan Indikator Kinerja Evaluasi AKIP Kabupaten dengan realisasi penilaian BB (71,21).

Indikator Kinerja Opini BPK dengan Realisasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan hasil yang memuaskan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun ini masih menggunakan data pada Tahun 2022 karena hasil Tahun 2023 belum dirilis oleh BPK-RI sampai saat penyusunan laporan ini. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam Laporan Keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemkab Deli Serdang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemkab Deli Serdang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemkab Deli Serdang, serta evaluasi atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan, BPK yakin bahwa

bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Menurut opini BPK, Kabupaten Deli Serdang menyajikan secara wajar Laporan Keuangan (LK) Pemkab Deli Serdang TA 2022 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) realisasi kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 71,21 untuk Tahun 2023. Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan kepada peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akan tetapi masih banyaknya Perangkat Daerah belum mengacu kepada sistem yang berlaku, walaupun pelaporannya telah di laporkan.

Berdasarkan hasil Evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Deli Serdang oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2023 menunjukkan secara umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum secara intensif melakukan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Komponen-komponen AKIP berdasarkan hasil Evaluasi masih mengandung banyak kelemahan meliputi :

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (renstra), Perjanjian Kinerja (PK), RKPD dan renja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah (PD). Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut :

- a. Meskipun telah memperbaiki penjenjangan kinerja (cascading), namun masih terdapat cascading PD yang belum sepenuhnya mempertimbangkan critical success factor dan model logis sebagaimana termuat pada

Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga mengakibatkan penetapan kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan level jabatannya. Contohnya pada PK Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Tahun 2023 dimana terdapat kinerja yang sama persis antara Kepala Bidang TIK dan Persandian dengan Manggala Informatika Ahli Muda, yaitu indikator “jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet” dengan target “52 PD”;

- b. Terdapat indikator kinerja PD yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound), contohnya pada PK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait indikator “penyelesaian pengaduan perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan” untuk mendukung sasaran “meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak berkeadilan gender”;
- c. Penetapan rencana aksi yang disusun pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada PK.

2) Pengukuran Kinerja

Kabupaten Deli Serdang dan seluruh PD telah melakukan pengukuran atas realisasi kerjanya. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Utama pada sebagian PD belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan indikator dan definisi operasionalnya, contohnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Aplikasi manajemen kinerja seperti e-SAKIP belum sepenuhnya optimal dalam implementasinya untuk monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Hal tersebut terlihat dari PD mengisi data capaian kinerja belum secara patuh dalam aplikasi sehingga datanya belum ter-update dengan baik;
- c. Terdapat ketidakselarasan penetapan kinerja utama PD di antara dokumen IKU dengan PK Tahun 2023. Contohnya pada Dinas Perhubungan, yaitu dalam IKU terdapat sasaran “meningkatnya pelayanan transportasi yang

aman dan memadai” yang diukur dengan “persentase peningkatan pengawasan jalan” dan persentase peningkatan fasilitas dan prasarana perhubungan yang memadai”. Sedangkan, di dalam PK terdapat sasaran “meningkatnya keselamatan lalu lintas” dengan indikator “persentase angka kecelakaan menurun” yang mana sasaran ini tidak ada di dalam IKU sehingga belum dapat diketahui bagaimana definisi operasional dan validitas cara pengukurannya;

- d. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

3) Pelaporan Kinerja

Kabupaten Deli Serdang telah menyusun laporan kinerja pada tingkat pemerintah daerah yang sudah diintegrasikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2022 dan laporan kinerja pada PD. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- a. Laporan kinerja PD belum dipublikasikan secara umum melalui website (sebagian website PD tidak dapat diakses/error);
- b. Dalam laporan kinerja level Pemerintah Daerah, terdapat indikator yang realisasinya berada dibawah 75 persen, yaitu indikator Nilai realisasi PMA dengan capaian 44,92 persen;
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, contohnya pada PK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait indeks “persentase desa cepat berkembang” dengan target tahun 2023 adalah 32,89 sedangkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2022 adalah 36,05 persen;

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada perangkat daerah. Namun demikian, masih

terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut :

- a. PD belum sepenuhnya memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan oleh Inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja perangkat daerah;
- b. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang mendalam dan menysasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP;
- c. Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD belum dilakukan oleh inspektorat.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, maka Kementerian PAN dan RB merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja PD pada setiap level organisasi terutama di level eselon III kebawah, sehingga sasaran strategis menjadi berorientasi hasil sesuai dengan level jabatannya, dan menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan memenuhi unsur cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- 2) Melakukan reuiu dan perbaikan dokumen cascading kinerja di level PD untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Proses reuiu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Memanfaatkan hasil perbaikan cascading kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi;

- 4) Mengoptimalkan pengintegrasian aplikasi manajemen kinerja dan mendorong seluruh pegawai menggunakan aplikasi tersebut untuk pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara real time;
- 5) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- 6) Menginformasikan Laporan Kinerja PD dalam website kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
- 7) Menjadikan capaian indikator kinerja baik yang belum berada di bawah 75 persen maupun yang sudah berada di atas kategori tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi dan penentuan target kinerja mendatang;
- 8) Memastikan temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
- 9) Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh SKPD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- 10) Meningkatkan pemahaman pimpinan dan SDM perencana, pengelola, serta evaluator internal terkait sistem akuntabilitas kinerja dan penjabaran (cascading) kinerja untuk meningkatkan implementasi manajemen kinerja instansi pemerintah.

Sasaran 11 Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2023 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran, pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	75,47	84,97	112,58	67,21	83,58
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 11				112,58		

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kabupaten Deli Serdang 2023*

Berdasarkan tabel 2.22, tingkat capaian rata-rata untuk sasaran 11 pada Sasaran *Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah* dengan memiliki interpretasi memuaskan dengan presentase capaian kinerja 112,58 % pada Tahun 2023, adapun sasaran ini terdiri 1 Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi 84,97 dari target 75,47, hal ini menunjukkan capaian yang melebihi target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*, realisasi kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 84,97 pada Tahun 2023 dari target 75,47, dari jumlah perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Terhadap Pelayanan yang menghasilkan indeks kepuasan masyarakat 55 perangkat daerah dan untuk sementara ini yang sudah menyerahkan Laporan IKM dan memiliki kategori baik dan sangat baik berjumlah 49 perangkat daerah. Salah satu pelayanan publik yang dilakukan aparatur pemerintah adalah menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja publik oleh aparatus pemerintah kepada masyarakat, penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan kepadanya, Indeks ini digunakan sebagai tolak ukur dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat, apakah telah memenuhi standar pelayanan yang telah diisyaratkan oleh pemerintah dan Kepuasan Masyarakat dapat diketahui dengan melihat kualitas pelayanan dari masing-masing indikator yang telah ditentukan.

Mulai triwulan IV tahun 2023 pemerintah kabupaten Deli Serdang telah memiliki sebuah aplikasi untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di seluruh perangkat daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui tautan <http://www.sukmadeli.deliserdangkab.go.id> dimana masyarakat dan stakeholder terkait dapat melakukan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah kepada penerima pelayanan setiap saat dan dimana pun berada. Dan seluruh hasil survey dapat dilihat secara realtime.

4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Deli Serdang untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode 2019-2024, RPJMD Kabupaten Deli Serdang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. P-RPJMD juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan.

P-RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024, dimaksudkan untuk mewujudkan kesepakatan bersama dari segenap *Stakeholders* pembangunan Kabupaten menyangkut strategi, kebijakan dan prioritas program serta kegiatan pembangunan Kabupaten dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu periode 2019-2024. Berdasarkan maksud tersebut maka tujuan pokok penetapan P-RPJMD Kabupaten Deli Serdang adalah untuk menggambarkan dan mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya P-RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) bagi unit kerja dibawah lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati Deli Serdang sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik Perangkat Daerah

Kabupaten, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Bupati Deli Serdang yang tertuang dalam P-RPJMD.

Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir P-RPJMD sudah memenuhi target P-RPJMD Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang tertera pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.23
Capaian Sasaran 1 dengan Target P-RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,12	10,28	101,58	10,10	10,27	10,13	101,48
Rata-Rata Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,39	100,15	-	-	13,38	100,07

Berdasarkan tabel 2.23 Sasaran 1 Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam P-RPJMD, pada Tahun 2023 capaian realisasi sebesar 101,58 %, dibandingkan dengan target akhir P-RPJMD capaiannya 101,48 % maka dapat dilihat bahwa capaiannya melebihi 0,10 % dari target akhir P-RPJMD. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan dengan bertambahnya daya tampung sekolah
2. Meningkatnya mutu sekolah, lembaga, siswa dan guru.

Lamanya pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh kombinasi pengaruh yaitu perbedaan upah atau pendapatan antara sektor modern dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus

ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak langsung dari pendidikan. Faktor lain yang sangat mempengaruhi tingkat permintaan pendidikan adalah pengaruh tradisi budaya, gender, status sosial, pendidikan orang tua, dan besarnya anggota keluarga atau beban ketergantungan. faktor ekonomi berupa tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan salah satu faktor penting penyebab putus sekolah. Pemerataan pendidikan juga terkendala oleh faktor tempat tinggal. Layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penyebab kedua, keberadaan unit sekolah rata-rata baru pada wilayah kecamatan, sehingga aksesnya relatif jauh dari pemukiman penduduk dan membutuhkan biaya transportasi, Selain biaya pendidikan, tingkat kemiskinan dan tempat tinggal beban ketergantungan juga mempengaruhi pemerataan pendidikan. Permintaan atau hasrat suatu keluarga untuk mendapatkan sejumlah anak ditentukan oleh preferensi keluarga itu sendiri atas sejumlah anak yang dianggap bisa terus bertahan hidup.

Peningkatan kinerja melalui program-program prioritas dan perlunya upaya percepatan peningkatan mutu sarana prasarana Pendidikan PAUD, peningkatan mutu sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar, meningkatkan mutu sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru serta mutu kompetensi siswa dan Pendidikan Non Formal, capaian kinerja tersebut di atas adalah merupakan kinerja dari program –program berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan.

Sasaran 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD hampir memenuhi target RPJMD Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang tertera pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.24
Capaian Sasaran 2 dengan Target P-RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Umur Harapan Hidup	Tahun	71,87	73,65	102,48	71,77	72,07	71,97	102,33

Berdasarkan tabel 2.24 Sasaran 2 *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* sebagaimana yang tertuang dalam target akhir P-RPJMD, sampai pada Tahun 2024 indikator kinerja Umur Harapan Hidup hampir mencapai target yang ditentukan yaitu hanya selisih 0,15 % dan memiliki interpretasi Memuaskan. Capaian kinerja tersebut di atas adalah merupakan kinerja dari program-program berikut ini :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

Sasaran 3 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Sasaran *Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang dilihat pada capaian akhir P-RPJMD hampir memenuhi target P-RPJMD Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang tertera pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.25
Capaian Sasaran 3 Terhadap Target P-RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	%				
				Realisasi				
PDRB (ADHB)	Triliun	159,77	139,09	87,05	115,31	127,55	173,5	80,17

Berdasarkan tabel 2.25 Sasaran 3 *Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan* sebagaimana yang tertuang dalam P-RPJMD, pada Tahun 2023 rata-rata indikator kinerja tidak mencapai target akhir dari P-RPJMD Tahun 2024. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap sasaran strategis P-RPJMD. Namun rata-rata indikator kinerja pada Tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang akan mengalami

peningkatan seiring dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Utara setelah mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang diperkirakan membaik di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diprediksi dengan terkendalinya secara baik Pandemi Covid-19, yang menyebabkan pergerakan sosial serta aktivitas ekonomi masyarakat kembali menuju ke normal sehingga perekonomian kembali membaik setelah mengalami kemerosotan di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi akan membawa dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang.

Sasaran 4 Meningkatkan Investasi

Sasaran *Meningkatnya Investasi* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang dilihat pada capaian akhir P-RPJMD yang direviu hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.26
Capaian Sasaran 4 Terhadap Target P-RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	PMDN/ Rp.Juta	2.772.893,58	2.636.565,00	95,08	2.704.206,50	2.718.192,00	2.772.893,58	95,08
	PMA/ US\$	104.529,62	120.071,00	114,68	61.492,70	83.092,40	104.529,62	114,87

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.26 Sasaran 4 *Meningkatnya Investasi* pada tahun 2023 bahwa iklim investasi PMDN mengalami penurunan dan nilai investasi PMA mengalami peningkatan. Hal ini tentunya patut untuk terus lebih ditingkatkan melalui berbagai langkah dan upaya dalam menarik minat investor untuk mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan salah satu bentuk nilai lebih yang dapat dijadikan motivator dalam pengembangan investasi adalah posisi wilayah Kabupaten Deli Serdang yang sangat strategis dengan kekayaan sumber daya alam dan luas wilayah yang cukup besar tentunya akan memberikan

harapan besar bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran nilai realisasi investasi PMA dan PMDN, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan dana untuk dialokasikan pada kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah dan peluang investasi dan pameran investasi baik di dalam daerah luar Propinsi Sumatera Utara maupun ke luar negeri.
2. Perlu penambahan fasilitas pendukung pelayanan yang menyamakan para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Deli Serdang seperti ruangan khusus yang nyaman, data investasi dan peluang investasi yang lengkap.
3. Perlunya sosialisasi peraturan terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada investor.

Sasaran 5 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha

Sasaran *Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha* yang terapkan di Kabupaten Deli Serdang dilihat pada capaian akhir P-RPJMD yang direviu hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.27
Capaian Sasaran 5 Terhadap Target P-RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	%				
				Realisasi				
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69	66,84	96,87	-	-	70	95,49

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.27 Sasaran 5 *Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha*, pada akhir tahun P-RPJMD bahwa Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan realisasi 96,87 % yang dapat memiliki interpretasi Memuaskan. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2023 juga mendekati target akhir pada P-RPJMD 2024, tentu hal tersebut

harus ditingkatkan pada Tahun 2024 sehingga target akhir P-RPJMD Tahun 2024 dapat tercapai.

Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Irigasi

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Irigasi yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang dilihat pada capaian akhir P-RPJMD memenuhi target akhir P-RPJMD hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.28
Capaian Sasaran 6 Terhadap Target P-RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Jalan dalam kondisi baik	%	75	75,31	100,41	73,19	74,24	76	99,09
Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	79	79,02	100,03	76,65	78,04	80	98,78

Berdasarkan tabel 2.28 Sasaran 6 *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Irigasi* sebagaimana yang tertuang dalam P-RPJMD, pada Tahun 2024 yang merupakan tahun akhir P-RPJMD kedua indikator kinerja belum mencapai target yang diharapkan yaitu indikator kinerja Irigasi dalam kondisi baik, dan indikator Irigasi dalam Kondisi Baik. Kedepannya agar kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Tingkat profesionalisme pelaku jasa-jasa konstruksi di bidang jalan dan jembatan.
2. Belum optimalnya kinerja pelaksana teknis dalam hal pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama masalah ganti rugi tanah dimana dana pemerintah daerah masih minim / kecil untuk memberikan ganti rugi.

4. Adanya perubahan kondisi di lapangan dengan kondisi yang telah diperhitungkan dalam proses perencanaan.
5. Masih terjadinya bencana longsor dan banjir di beberapa lokasi.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu diambil langkah-langkah pemecahan masalah antara lain:

1. Melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam pengelolaan penanganan jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan kinerja pelaksana teknis dalam pelaksanaan swakelola melalui pembinaan, pembagian tugas yang jelas, proporsional dan berkesinambungan kepada staf.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan jalan dan pembangunan jembatan.
4. Melakukan Review Design.
5. Melakukan penanganan darurat terhadap lokasi bencana berupa perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi yang terkena dampak.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 adalah :

1. Terbatasnya anggaran sehingga pembayaran hanya dapat dilakukan untuk panjar upah, panjar sewa alat, dan panjar material.
2. Belum optimalnya kinerja pelaksana teknis dalam hal pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut, adalah:

1. Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembiayaan kegiatan.
2. Meningkatkan kinerja pelaksana teknis dalam pelaksanaan swakelola melalui pembinaan, pembagian tugas yang jelas, proporsional dan berkesinambungan kepada jabatan pelaksanan/fungsional.

Sasaran 7 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman

Sasaran *Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang dilihat pada capaian akhir P-RPJMD yang direviu hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Capaian Sasaran 7 Terhadap Target P-RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,13	0,14	92,31	0,14	0,15	0,12	83,33
Cakupan Pelayanan Air Minum	%	78,5	59,87	76,26	76,17	77,29	80	74,84
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	88,5	64,89	73,32	85,60	86,75	90	72,10

Berdasarkan tabel 2.29 Sasaran 7 *Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman* sebagaimana yang tertuang dalam P-RPJMD, sampai pada Tahun akhir 2023 berdasarkan realisasi indikator kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target akhir RPJMD. Capaian kinerja tersebut di atas adalah merupakan kinerja dari program berikut ini :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Pengembangan Perumahan;
5. Program Kawasan Permukiman;
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum;
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
8. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Program Penataan Bangunan Gedung.

Sasaran 8 Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Sasaran *Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang dilihat pada capaian akhir P-RPJMD yang direviu hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.30
Capaian Sasaran 8 Terhadap Target P-RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64	61,18	95,59	59,00	57,37	64	95,59

Berdasarkan tabel 2.30 Sasaran 8 *Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan* sebagaimana yang tertuang pada target akhir P-RPJMD, pada Tahun 2023 pencapaian realisasinya sudah berhasil mencapai target akhir P-RPJMD yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sehingga berdampak pada capaian sasaran strategis dengan capaian adalah 95,59 %.

Sasaran 9 Meningkatnya Kerukunan, Penegakan Hukum dan Ketertiban

Sasaran *Meningkatnya Rasa Aman, Penegakan Hukum dan Ketertiban* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang dilihat pada capaian akhir P-RPJMD yang direviu hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.31
Capaian Sasaran 9 Terhadap Target P-RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Indeks Kerukunan Beragama	Poin	78,4	75,27	96,01	-	-	78,7	95,60
Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	90	89	98,89	96,56	84,50	95	93,68

Berdasarkan tabel 2.31 Sasaran 9 *Meningkatnya Rasa Aman, Penegakan Hukum dan Ketertiban* sebagaimana yang tertuang pada target akhir P-RPJMD, pada Tahun 2024 dengan indikator sasaran Indeks Kerukunan Beragama dan Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pencapaian realisasinya masih belum berhasil mencapai target akhir P-RPJMD sehingga berdampak pada capaian sasaran strategis dengan capaian rata-rata adalah 97,45 %.

Sasaran 10 Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran *Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang dilihat pada capaian akhir P-RPJMD yang direviu hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.32
Capaian Sasaran 10 Terhadap Target P-RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71	71,21	100,30	67,08	70,18	72	98,90

Berdasarkan tabel 2.32 Sasaran 10 *Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* sebagaimana yang tertuang pada target akhir P-RPJMD, pada Tahun 2023 pencapaian realisasi 1 indikator memenuhi target yang ditentukan yaitu Opini BPK berhasil dengan realisasi WTP, sedangkan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) belum berhasil mencapai target akhir RPJMD yaitu 72.00.

Sasaran 11 Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah

Sasaran *Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang dilihat pada capaian akhir P-RPJMD yang direviu hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.33
Capaian Sasaran 11 Terhadap Target P-RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	75,47	84,97	112,58	67,21	83,58	77,35	109,85

Berdasarkan tabel 2.33, Sasaran 11 “*Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah*” sebagaimana yang tertuang dalam P-RPJMD, capaian Tahun 2023 terhadap akhir P-RPJMD Tahun 2024 sudah melebihi target yang diharapkan yaitu 114,41 %. Namun perlu adanya peningkatan kinerja yang lebih baik lagi sesuai dengan hasil yang di capai, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi untuk yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Berikut ini adalah realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 2.34
Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
I	PENDAPATAN DAERAH	4.401.020.036.873,00	3.853.330.105.887,03	87,56
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.591.671.684.311,00	1.049.802.528.387,03	65,96
	PENDAPATAN TRANSFER	2.809.348.352.562,00	2.803.527.577.500,00	99,79
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
II	BELANJA DAERAH	4.573.427.170.286,00	3.864.372.930.375,79	84,50
	BELANJA OPERASI	3.238.934.047.967,00	2.761.112.083.033,79	85,25
	BELANJA MODAL	736.247.603.354,00	518.703.185.644,00	70,45
	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	2.205.249.833,00	14,70
	BELANJA TRANSFER	583.245.518.965,00	582.352.411.865,00	99,85
III	PEM BIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	174.907.133.413,00	174.933.313.575,82	100,01
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEM BIAYAAN NETTO	172.407.133.413,00	174.933.313.575,82	101,47

Sumber : BPKAD Deli Serdang 2023 (LRA Unaudited)

Untuk efisiensi penggunaan sumberdaya (keuangan) dikaitkan dengan kinerja dari setiap indikator utama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Rumus Efisiensi Anggaran

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK No. 249/PMK.02/2011

Keterangan :

E = Efisiensi

RAK = Realisasi Anggaran Keluaran

RVK = Realisasi Volume Keluaran

PAK = Pagu Anggaran Keluaran

TVK = Target Volume Keluaran

Tabel 2.35
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	% Capaian	
1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	10,12	10,28	101,58	427.379.788.881	410.787.483.123	96,11	4,70
		Rata-rata harapan lama sekolah	13,37	13,39	100,15				
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	71,87	73,65	102,48	232.815.919.619	207.895.601.356,12	89,30	12,86
3	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)	159,77	139,09	87,05	16.891.524.125	7.716.735.387	59,65	47,52
4	Meningkatnya investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	2.772.893,58	2.636.565,00	95,08	2.087.312.598	1.647.525.186	78,93	24,14
			104.529,62	120.071,00	114,68				
5	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,00	66,84	96,87	4.016.572.733	3.139.039.840	78,15	19,32

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
6	Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi	Jalan dalam kondisi baik	75,00	75,31	100,41	490.240.721.474	321.844.314.155	65,65	34,62
		Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	79,00	79,02	100,03	58.469.615.945	49.795.785.361	85,17	14,86
7	Meningkatnya infrastuktur dasar permukiman	Persentase areal kawasan kumuh	0,13	0,14	92,31	129.630.078.995	93.014.345.638	71,75	33,37
		Cakupan pelayanan air minum	78,50	59,87	76,26	18.640.392.258	14.924.820.010	80,07	-4,98
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	88,50	64,89	73,32	108.706.415.337	97.094.587.474	89,32	-21,85
8	Meningkatnya pengelolaan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,00	61,18	95,59	12.619.736.767	9.648.990.615	76,46	20,02
9	Meningkatnya rasa aman, penegakan hukum dan ketertiban	Indeks kerukunan umat beragama	78,40	75,27	96,01	5.183.524.600	5.178.681.121	99,90	-2,54
		Indeks ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	90,00	89,00	98,89				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
			WTP	WTP	100				
10	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK				603.078.633.083	587.599.112.018	97,43	2,57
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	71,00	71,21	100,3	2.280.611.569	1.674.653.441	73,43	26,79
11	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,47	84,97	112,58	1.876.567.974.241	1.614.178.801.750	86,01	23,6

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

BAB III

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN**



KABUPATEN DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2023

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan oleh Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintah yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan bagi daerah dan desa. Melalui pemberian TP diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai APBN, baik kewenangan pusat yang didesentralisasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat yang ditugaskan kepada daerah. Pengadministrasian Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN.

Proses perencanaan TP mengacu pada mekanisme perencanaan APBN. Perencanaan program/kegiatan TP dilakukan oleh satker terkait dengan mengacu/berpedoman pada juknis (petunjuk teknis) serta dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Penyusunan rencana dilakukan melalui aplikasi RKA-KL. Selanjutnya hasil RKA-KL tersebut didesk oleh Kementerian/Lembaga terkait. Apabila disetujui oleh Kementerian/Lembaga terkait maka satker kab/kota akan memperoleh DIPA pada awal tahun berjalan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari permintaan laporan realisasi dana bersumber APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Pusat dan Urusan Bersama) tahun 2023, tidak ada Perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang yang menerima dana yang bersumber dari TP. Sejak tahun 2018, TP dan Dekonsentrasi tidak lagi berdasarkan pada fisik dan non fisik (sebelumnya TP diidentikkan dengan fisik, sedangkan Dekonsentrasi hanya diidentikkan dengan non fisik). TP dan Dekonsentrasi berdasarkan konsep baru bahwa sudah berdasarkan kewenangan pusat sehingga tidak ada lagi kewenangan daerah yang dilakukan melalui TP dan Dekonsentrasi (sedangkan kewenangan daerah melalui Dana Alokasi Khusus).

Mekanisme perencanaan TP dan Dekonsentrasi, sama prinsipnya dengan perencanaan APBN yang lainnya, dengan memperhatikan Prioritas Nasional, dengan pendekatan perencanaan, dengan Tematik (fokus perencanaan yang didetailkan sampai dengan Program Prioritas), *Holistik* (pendekatan menyeluruh dan komprehensif/ dari hulu sampai hilir), *Integratif* (integrasi antar seluruh pemangku kepentingan, dan integrasi sumber pendanaan), *Spasial* (Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi). Usulan kegiatan TP dan Dekonsentrasi bersifat *top down*, sehingga untuk mendukung TP dan Dekonsentrasi maka Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (K/L). Anggaran TP dan Dekonsentrasi tidak terdapat dalam dokumen perencanaan daerah. TP dimanfaatkan untuk pencapaian target nasional yang dilaksanakan oleh daerah (mengingat hal tersebut lebih efisien dilaksanakan oleh daerah), sedangkan Dekonsentrasi untuk koordinasi/bimbingan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan TP dan Dekon, sama prinsipnya dengan perencanaan APBN yang lainnya, yaitu: dengan memperhatikan Prioritas Nasional. Dengan pendekatan perencanaan, yaitu: Tematik (fokus perencanaan yang didetailkan sampai dengan Program Prioritas), *Holistik* (pendekatan menyeluruh dan komprehensif/ dari hulu sampai hilir), *Integratif* (integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan), *Spasial*

(Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi). Usulan kegiatan TP dan Dekon bersifat *top down*, sehingga untuk mendukung TP dan Dekon maka Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan K/L. Anggaran TP dan Dekon tidak masuk dalam dokumen perencanaan daerah. TP diperuntukan untuk pencapaian target nasional yang dilaksanakan oleh daerah (mengingat hal tersebut lebih efisien dilaksanakan oleh daerah). Sedangkan Dekon untuk koordinasi/bimbingan dan pengawasan.

B. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pada Tahun 2023, Kabupaten Deli Serdang tidak menerima dana TP, namun dapat disampaikan beberapa permasalahan, antara lain:

- Perencanaan TP masih belum berkesinambungan sehingga menyulitkan daerah dalam menyusun perencanaan. Terbatasnya anggaran K/L menyebabkan belum berkesinambungannya perencanaan TP di daerah.
- Masih belum sinkronnya perencanaan antara kegiatan yang dibiayai melalui APBD dengan TP. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi antara Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran TP.
- Terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran TP dikarenakan adanya keterlambatan DIPA, keterlambatan juknis, revisi anggaran pada saat tahun berjalan.
- Kurang terpeliharanya Barang Milik Negara (BMN) hasil TP oleh daerah karena belum dihibahkan.

Upaya penyelesaian untuk menghadapi hambatan/permasalahan tersebut, sebagai berikut:

- Mengintensifkan koordinasi/konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga untuk mensinkronkan dan menjaga keberlangsungan TP dengan APBD.
- Mengintensifkan pemantuan terhadap Perangkat Daerah penerima TP. Serta mengkonfirmasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dalam hal ini KPPN Tebing Tinggi.
- Berkoordinasi dan memberikan masukan terhadap Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga untuk mempercepat penyerahan DIPA dan juknisnya.
- Melakukan pendampingan terhadap pengelola/petugas Perangkat Daerah yang menerima TP dalam penyusunan pelaporannya.

- Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga untuk kejelasan Barang Milik Negara (BMN) hasil TP, apabila memungkinkan dilakukan hibah agar dapat dilakukan pembebanan pemeliharaan melalui APBD.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

BAB IV

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**



KABUPATEN DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2023

B A B IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. Urusan Pendidikan

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan.

1. Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, untuk peserta didik usia 5 – 6 tahun;
2. Pendidikan Dasar, untuk peserta didik usia 7 – 15 tahun;
3. Pendidikan Kesetaraan, untuk peserta didik usia 7 – 18 tahun.

2. Target Pencapaian

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya).

Tabel 4.1

Target Capaian SPM Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Elemen Data	Target Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usi 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang sudah tamat dalam pendidikan dasar atau sedang belajar di pendidikan dasar	100%
			Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
			Jumlah penduduk usia 7-18 tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Elemen Data	Target Capaian
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan satuan pendidikan anak usia dini jumlah penduduk usia 5-6 tahun	100%

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari APBD, APBN & Sumber lain yang sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2023

No	PRO GRAM	KE GI AT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. DELI SERDANG				86,495,506,486	81,138,676,122	93.81 %
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				12,529,468,879	11,941,430,280	95.31 %
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD K2023542			4,574,980,600	4,430,767,900	96.85 %
		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	0	0	0%
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan	Peserta didik	2,121,385,600	1,988,222,600	93.72 %

			paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan					
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	0	0		0%
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	2,453,595,000	2,442,545,300		99.55 %
		6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0		0%
	JUMLAH INDIKATOR				4,574,980,600	4,430,767,900		96.85 %
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan K2023532			3,744,912,000	3,375,706,500		90.14 %
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0		0%
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0		0%
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	1,575,034,810	1,229,240,200		78.05 %
		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling	Kegiatan	0	0		0%

			sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun				
		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	<u>2,169,877,190</u>	<u>2,146,466,300</u>	98.92 %
	JUMLAH INDIKATOR				3,744,912,000	3,375,706,500	90.14 %
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K2023543			0	0	0.00 %
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan	Kegiatan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%

			guru penggerak sebagai pengawas sekolah				
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K2023541			4,209,576,279	4,134,955,880	98.23 %
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	4,063,526,269	3,995,349,400	98.32 %
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	146,050,010	139,606,480	95.59 %
	JUMLAH INDIKATOR				4,209,576,279	4,134,955,880	98.23 %
	JUMLAH PROGRAM				12,529,468,879	11,941,430,280	95.31 %
	2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR			45,760,981,449	42,811,734,370	93.56 %
	5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023533			4,144,880,000	3,077,182,050	74.24 %
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%

	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	0	0	0%
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	4,144,880,000	3,077,182,050	74.24 %
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				4,144,880,000	3,077,182,050	74.24 %
6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023534			1,514,288,798	1,314,861,000	86.83 %
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
	2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	1,514,288,798	1,314,861,000	86.83 %
JUMLAH INDIKATOR				1,514,288,798	1,314,861,000	86.83 %
7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023535			22,726,885,097	21,727,038,951	95.60 %
	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%

	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	<u>19,502,297,340</u>	<u>18,520,834,760</u>	94.97 %
	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	<u>3,224,587,757</u>	<u>3,206,204,191</u>	99.43 %
JUMLAH INDIKATOR				22,726,885,097	21,727,038,951	95.60 %
8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K2023519			0	0	0.00 %
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
	2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
	4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan	Kegiatan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%

			pendidikan inklusif					
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0		0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0		0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0		0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0		0.00 %
	9	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K2023536			17,374,927,554	16,692,652,369		96.07 %
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	15,974,429,876	15,414,421,150		96.49 %
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	1,108,573,046	999,715,450		90.18 %
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	291,924,632	278,515,769		95.41 %
	JUMLAH INDIKATOR				17,374,927,554	16,692,652,369		96.07 %

	JUMLAH PROGRAM			45,760,981,449	42,811,734,370	93.56 %
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN			15,135,949,223	13,949,642,821	92.16 %
	10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan) K2023564		0	0	0.00 %
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik 0	0	0%
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik 0	0	0%
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik 0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik 0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
	11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan) K2023563		7,868,960,660	7,564,877,100	96.14 %
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas 0	0	0%
		2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan 7,868,960,660	7,564,877,100	96.14 %
	JUMLAH INDIKATOR			7,868,960,660	7,564,877,100	96.14 %
	12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) K2023562		7,266,988,563	6,384,765,721	87.86 %
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah	Kegiatan 0	0	0%

			perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan					
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0		0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0		0%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	7,266,988,563	6,384,765,721		87.86 %
	JUMLAH INDIKATOR				7,266,988,563	6,384,765,721		87.86 %
	13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K2023561			0	0		0.00 %
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0		0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0		0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan	Guru	0	0		0%

			peraturan perundang-undangan					
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0		0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0		0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0		0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0		0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0		0.00 %
	14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K2023560			0	0		0.00 %
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0		0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0		0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti	Kegiatan	0	0		0%

		pendidikan dan pelatihan guru penggerak				
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM		15,135,949,223	13,949,642,821	92.16 %	
KEGIATAN LAINNYA						
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA					
	01	Pengadaan				
	.0	Perlengkapan				
	0	Siswa	13,069,106,935	12,435,868,651	95.15 %	

4. Dukungan Personil

Proses Dukungan personil menggambarkan jumlah personil personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Status		Total
		PNS	Non PNS	
1	Dinas	126	78	204
2	Pengawas	132	-	132
3	Penilik	35	-	35
4	Pamong	7	-	7
5	Guru			
	a.PAUD	103	1.997	1.997
	b.SD	7.422	3.202	10.624
	c.SMP	2.366	2.682	5.048
	d.Kesetaraan	16	453	469
Total		10.207	8.412	18.619

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Berdasarkan Jabatan

No.	Status Pegawai	Jumlah
1	Struktural	15
2	Jabatan Fungsional (Kantor)	205
3	Jabatan Fungsional Tertentu	56
4	Jabatan Fungsional Guru	7227
Total		7.503

5. Realisasi

Capaian Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan pada tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					93.81 %	
1	Pendidikan Dasar Usia Dini					94.91 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		30826	30826	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.91 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					74.57 %	
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	65	60.44.00	04.56	92.98 %	
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	45	41.76	03.24	92.80 %	
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	55	53.39.00	0,084027778	97.07 %	
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	3	0,042361111	02.39	20.33 %	
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	91	9	91.00 %	
	6 . Indeks distribusi guru	%	35	28	7	80.00 %	
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	45	39.57.00	05.43	87.93 %	
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	10	07.02	02.08	72.00 %	
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	1	00.37	0,04375	37.00 %	
	JUMLAH	359	322	37	671.12 %		
02.00	Pendidikan Dasar					96.15 %	
			Jumlah Total Yang	Jumlah Total Yang	Yang Belum Terlayani		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %	

			Harus Dilayani	Terlayani	i		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		275610	275610	0	100.00	%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						16.15 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		80.73 %
	SD						
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.97	0.030000000000000001	99.97 %	
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	94.59.00	05.41	94.59 %	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	53.28.00	59.40.00	-6.12	100.00 %	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	40.31.00	45.07.00	-4.76	100.00 %	
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2	01.38	0,043055556	69.00 %	
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	1	00.33	0,046527778	33.00 %	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.94	67.04.00	03.09	94.50 %	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	64.13.00	67.50.00	-3.37	100.00 %	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	65	58	7	89.23 %	
	11 . Indeks distribusi guru	%	45	38	7	84.44 %	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	95	89.50.00	05.05	94.21 %	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	1	00.06	0,065277778	6.00 %	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	60	52.53.00	07.47	87.55 %	
	SMP						
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	94.56.00	05.44	94.56 %	
	3 . Angka partisipasi murni	%	85	77.88	07.12	91.62 %	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	61.48.00	52.28.00	09.02	85.04 %	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	60.89	35.49.00	25.04.00	58.29 %	
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5	04.04	0,066666667	80.80 %	
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	2	0,05	01.28	36.00 %	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	68.94	64.06.00	0,227777778	92.92 %	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	61.65	64.44.00	-2.79	100.00 %	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	60	45	15	75.00 %	
	11 . Indeks distribusi guru	%	50	35	15	70.00 %	

	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	92.04.00	07.06	92.40 %	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	20	11	9	55.00 %	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	50	38.02.00	11.08	76.40 %	
	JUMLAH		1,62	1,488	134	2,260.52 %	
03.00	Pendidikan Kesetaraan						90.38 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		13128	13128	0		100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						10.38 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		51.91 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	88	12	88.00 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	0,681944 444	84.18.00	15.82 %	
	3 . Angka partisipasi murni	%	0	0	0	0.00 %	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00 %	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00 %	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00 %	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	0.00 %	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	0	0	0	0.00 %	
	JUMLAH		200	104	96	103.82 %	

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh:

1) Pendidikan Anak Usia Dini

a. Permasalahan:

- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD bagi tumbuh kembangnya anak belum merata;
- Biaya kelompok bermain yang masih mahal;
- Masih rendahnya lembaga PAUD yang sudah memiliki akreditasi sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan PAUD;
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini masih kurang memadai,
- Belum tersedianya lahan untuk pembangunan Unit Gedung baru bagi penambahan TK Negeri;
- Kurangnya kualitas para pengajar pendidikan anak usia dini.

b. Solusi:

- (1) Mensosialisasikan ke Masyarakat tentang manfaat pentingnya anak menerima pendidikan di usia dini dan Pemberdayaan HIMPAUDI, forum PAUD dan ikatan guru taman kanak-kanak Indonesia (IGTKI) agar bisa bersinergi membantu mengembangkan PAUD serta pembukaan lembaga PAUD baru.
- (2) Meningkatkan kualitas para pengajar pendidikan anak usia dini, menyelaraskan kemampuan akademik maupun non akademik pengajar dengan cara membuat program-program pelatihan kemampuan pengajar.
- (3) Pendanaan pengembangan PAUD baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten cukup besar. Tersedianya bantuan untuk peningkatan sarana prasarana PAUD dan pengembangan PAUD.
- (4) Mendorong kemandirian lembaga masyarakat dalam pendanaan/pembiayaan pendidikan.

2) Pendidikan dasar

a. Permasalahan

- (1) Prioritas pembangunan pemerintah pusat sudah bergeser dari peningkatan akses ke arah peningkatan mutu.
- (2) Masih terdapatnya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sehingga belum dapat menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) sembilan tahun.
- (3) Masih banyak ruang kelas SD / MI yang rusak.
- (4) Masih kurangnya prasarana SD dan SMP yang memadai, terutama ruang kelas dan perabotnya yang baik, perpustakaan dan perabotnya, serta sanitasi.

- (5) Kurangnya prestasi akademik peserta didik dalam menempuh Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.
- (6) Masih adanya peserta didik yang mengulang, baik pada jenjang SD maupun SMP.
- (7) Banyak SD kekurangan siswa.

b. Solusi

- (1) Program BOS akan ditingkatkan melalui penganggaran Pemerintah Pusat dan Kabupaten (BOSDA) dan Program bantuan Beasiswa Siswa miskin dari Program Indonesia Pintar (PIP) melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari input dapodik dan serap aspirasi dari pemangku kepentingan.
- (2) Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas dan prasarana penunjang lainnya terus dilakukan
- (3) Kegiatan peningkatan prestasi siswa terus dilakukan pada semua kelas, tidak hanya siswa berprestasi saja.
- (4) Regruping/penggabungan sekolah lokasi.
- (5) Membangun kesadaran orang tua dan keluarga pentingnya pendidikan.
- (6) Mendorong kemandirian masyarakat dalam pembiayaan lembaga swasta.
- (7) Pengaturan zonasi peserta didik.

3) Pendidikan Kesetaraan

a. Permasalahan

- (1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.
- (2) Masih lemahnya pengelolaan administrasi dan kelembagaan PKBM.
- (3) Masih sulitnya ijin dari pemberi kerja kepada pekerja untuk meningkatkan pendidikan.

b. Solusi

- Alternatif layanan pendidikan (Paket B, C) perlu ditingkatkan.
- Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu program prioritas.
- Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan PKBM untuk akreditasi.

4) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Permasalahan

- (1) Kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat terbatas.
- (2) Kurangnya motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi.
- (3) Jumlah pengangkatan guru PNS tidak seimbang dengan guru yang pensiun.
- (4) Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga administrasi sekolah non PNS.
- (5) Rendahnya motivasi pengawas untuk meningkatkan kompetensi.
- (6) Kinerja Kepala Sekolah belum optimal

b. Solusi

- (1) Meningkatkan Kesra guru non PNS (PTT / Wiyata Bhakti).
- (2) Peningkatan Kualifikasi guru.
- (3) Tersedia fasilitasi dari Dinas bagi guru yang akan sertifikasi.

- (4) Mempersiapkan calon KS dan Pengawas sejak awal.
- (5) Tersedia program dan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru.
- (6) Meningkatkan Kompetensi pengawas, dan penilik.
- (7) Tersedia kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non PNS.
- (8) Tersedian dana BOS untuk merekrut tenaga administrasi SD.
- (9) Tersedia program dan kegiatan untuk peningkatan kompetensi pengawas.
- (10) Mendorong sertifikasi guru dan peningkatan kompetensi guru.
- (11) Mendorong peningkatan kualifikasi guru baik secara mandiri atau maupun memanfaatkan beasiswa yang disediakan oleh banyak pihak.
- (12) Mendorong evaluasi kinerja guru yang sudah bersertifikat pendidik

B. Urusan Kesehatan

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan.

1. Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan daerah Kabupaten terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGGJ);
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
Yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

2. Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan harus 100% (seratus persen). Berikut adalah penerima pelayanan dasar bidang kesehatan berdasarkan jenis pelayanannya.

Tabel 4.6
Penerima Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	100
4	Pelayanan kesehatan Balita	Balita (0-5 tahun)	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak usia pendidikan dasar (7-15 tahun)	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	WNI usia 15-59 tahun	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	WNI usia 60 tahun keatas	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun	100
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Penderita ODGJ	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang yang terduga TBC	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Orang yang berisiko terinfeksi HIV	100

3. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2023, belanja daerah Kabupaten Deli Serdang diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Secara garis besar, belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib dipergunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan beberapa kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan rincian yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2023

No	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPA N
	KAB. DELI SERDANG				15.059.750. 228	14,456,711, 138	96.00 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				15.059.750. 228	14,456,711, 138	96.00 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten			15.059.750. 228	14,456,711, 138	96.00 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Oran g	3,061.599.6 42	3,024,914,6 42	98.80 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Oran g	109.363.662	109,363,662	100.00 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Oran g	203.019.233	98,631,106	97.84 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Oran g	2,929.404.8 80	2,904,451,8 80	99.15 %

		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Oran g	1.448.801.1 98	1,425,861,1 98	98.42 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Oran g	3.283.240.4 56	3,067,582,8 86	93.43 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Oran g	1.439.162.9 40	1,418,309,2 64	98.55 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Oran g	164.161.000	107,407,000	65.43 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Oran g	104.159.760	91,647,480	93.43 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Oran g	358.037.904	314,875,000	87.94 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Oran g	992.799.548	893,967,020	90.05 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Oran g	966.000.000	899,700,000	93.14 %
		JUMLAH INDIKATOR			15.059.750. 228	14,456,711, 138	96.00 %
		JUMLAH PROGRAM			15.059.750. 228	14,456,711, 138	96.00 %

4. Dukungan Personil

Dukungan personil sangat berperan dalam keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan. SDMK yang bekerja di Dinas Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada tahun 2023 adalah 2.119. Jumlah SDMK berdasarkan rumpun SDMK di Dinas Kesehatan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.8
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli
Serdang Tahun 2023

No	Rumpun SDM	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
I	Tenaga Kesehatan			
1	Kebidanan	1	983	984
	Keperawatan	21	223	244
	Medis	55	174	229
	Kesehatan Masyarakat	16	114	130
	Kefarmasian	7	66	73
	Gizi	7	47	54
	Keteknisian Medis	2	41	43
	Teknik Biomedika	7	35	42
	Kesehatan Lingkungan	7	18	25
	Nakes Lainnya	4	15	19
II	Asisten Tenaga Kesehatan			
	Kebidanan	2	39	41
	Keperawatan	3	15	18
	Keteknisian Medis	1	13	14
	Kefarmasian	3	10	13
	Teknik Biomedika	1	8	9
	Kesehatan Lingkungan	3	1	4
	Gizi	0	1	1
III	Tenaga Penunjang			
	Dukungan Manajemen	58	78	136
	Struktural	9	31	40
	TOTAL	207	1.912	2.119

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi tenaga kesehatan paling banyak adalah rumpun SDM Kebidanan sebesar 46,44%. Dalam menjamin mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan selain menetapkan standar jumlah dan kualitas barang/jasa juga ditetapkan standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusianya.

5. Realisasi

Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 sebesar 93,32 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			93.32 %
01.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					98.34 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.55 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	47156	46300	856	98.18 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.79 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	98.97 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	4716	4630	86	98.18 %
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	4244040	4167000	77040	98.18 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	47156	46638	518	98.90 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	47156	46300	856	98.18 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	47156	46300	856	98.18 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	7073	7073	0	100.00 %
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	47156	46638	518	98.90 %
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	47156	46638	518	98.90 %
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	68	68	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	68	68	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	68	68	0	100.00 %
	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua	Orang	47156	46300	856	98.18 %

	kali pada trimester ketiga)					
	JUMLAH	4,538,969	4,457,721	81,248	1,187.60 %	
02.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					98.68 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.82 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	45011	44349	662	98.53 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.85 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	99.27 %
	1 . Formulir Partograf	Formulir	45011	44349	662	98.53 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	47156	46300	856	98.18 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	47156	46638	518	98.90 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	68	68	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	68	68	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	68	68	0	100.00 %
	JUMLAH	139,5	137,491	2,036	595.61 %	
03.00	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					92.37 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.53 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	42868	39938	2,93	93.17 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.84 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	89.18 %
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	42868	39938	2930	93.17 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	42868	39938	2930	93.17 %
	3 . Salep/tetes mata	Orang	42868	39938	2930	93.17 %

	antibiotik					
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	42868	39938	2930	93.17 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	128604	39938	88666	31.06 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	47156	46638	518	98.90 %
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	68	68	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	68	68	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	68	68	0	100.00 %
	JUMLAH	347,4	246,532	100,904	802.64 %	
04.00	Pelayanan Kesehatan Balita					89.92 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.86 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	165231	152545	12,686	92.32 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.06 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	80.30 %
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	165231	152545	12686	92.32 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	165231	152545	12686	92.32 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	165231	46638	118593	28.23 %
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	41260	20600	20660	49.93 %
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	330462	138841	191621	42.01 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	165231	152545	12686	92.32 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	165231	152545	12686	92.32 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	165231	152545	12686	92.32 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	165231	152545	12686	92.32 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	165231	65419	99812	39.59 %

	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	165231	25194	140037	15.25 %
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	165231	152545	12686	92.32 %
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	Vaksin	165231	152545	12686	92.32 %
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	165231	152545	12686	92.32 %
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	165231	152545	12686	92.32 %
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	165231	80356	84875	48.63 %
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	34	34	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	34	34	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	68	68	0	100.00 %
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	34	0	100.00 %
	21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	34	34	0	100.00 %
	22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	394	394	0	100.00 %
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	629	629	0	100.00 %
	JUMLAH	2,686,183	1,903,725	782,458	1,846.84 %	
05.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					94.29 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.60 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	369499	358431	11,068	97.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.69 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	83.43 %
	1 . Buku raport kesehatanku	Buku	369499	7689	361810	2.08 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	369499	7689	361810	2.08 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	369499	358431	11068	97.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam	Dokumen	1292	1292	0	100.00 %

	sekolah					
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	209	209	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	34	34	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	68	68	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	34	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	34	34	0	100.00 %
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	34	34	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	34	34	0	100.00 %
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	394	394	0	100.00 %
	JUMLAH	1,110,630	375,942	734,688	1,001.16 %	
06.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					86.45 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	70.60 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1594286	1406863	187,423	88.24 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.86 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	79.28 %
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	68	68	0	100.00 %
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	396	181	215	45.71 %
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	396	181	215	45.71 %
	4 . Alat : Alat ukur lingkaran perut	Unit	396	181	215	45.71 %
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	396	181	215	45.71 %
	6 . Alat : Glukometer	Unit	396	181	215	45.71 %
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	396	181	215	45.71 %
	8 . Alat : Lancet	Unit	1594286	1406863	187423	88.24 %
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	1594286	1406863	187423	88.24 %
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	34	33	1	97.06 %

	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	68	68	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	34	34	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	34	34	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	34	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	34	34	0	100.00 %
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	34	34	0	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	3,191,322	2,815,185	376,137	1,347.80 %	
07.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					95.89 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.21 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	203345	198797	4,548	97.76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.68 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	88.39 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	203345	198797	4548	97.76 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	203345	198797	4548	97.76 %
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	203345	34	203311	0.02 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	34	34	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	34	34	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	34	0	100.00 %

	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	34	34	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	34	34	0	100.00 %
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	610,2	397,832	212,407	795.54 %	
08.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					92.14 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	564456	536233	28,223	95.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.14 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	80.71 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	68	68	0	100.00 %
	2 . Tensimeter	Unit	396	181	215	45.71 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	68	68	0	100.00 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	34	34	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	34	34	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	34	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	34	34	0	100.00 %
	8 . Obat Hipertensi	Paket	564456	34	564422	0.01 %
	JUMLAH	565,1	487	564,637	645.72 %	
09.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					90.11 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.84 %

	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	48896	45133	3,763	92.30 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.27 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	81.34 %
	1 . Alat : Glukometer	Unit	396	181	215	45.71 %
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	396	181	215	45.71 %
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit	48896	45133	3763	92.30 %
	4 . Alat : Lancet	Unit	48896	45133	3763	92.30 %
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	68	68	0	100.00 %
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	68	68	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	34	34	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	34	34	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	34	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	34	34	0	100.00 %
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	34	34	0	100.00 %
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	48896	34	48862	0.07 %
	JUMLAH	147,8	90,968	56,818	976.09 %	
10.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					95.85 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.49 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3381	3275	106	96.86 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.36 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	91.80 %

	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	34	34	0	100.00 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	396	181	215	45.71 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	3381	3275	106	96.86 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	34	34	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	34	34	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	34	34	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	3,947	3,626	321	642.57 %	
11.00	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					98.24 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	62589	62589	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.24 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	91.18 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	68	68	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Paket	56203	42138	14065	74.97 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	38485	41919	-3434	108.92 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	56203	41919	14284	74.58 %

	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	56203	9857	46346	17.54 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	56203	61445	-5242	109.33 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	34	34	0	100.00 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	34	34	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	34	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	34	34	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	34	34	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	34	34	0	100.00 %
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	263,6	197,584	66,019	1,185.34 %	
12.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					87.53 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	63449	54030	9,419	85.16 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.41 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	97.03 %
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	68	68	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	63449	54030	9419	85.16 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril,	Paket	63449	54030	9419	85.16 %

	Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai					
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	34	34	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	34	34	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	34	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	34	34	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	34	34	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	34	34	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	127,2	108,366	18,838	970.32	%

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang Kesehatan tahun 2023 dan solusi dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.10
Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilakukan belum memenuhi standar kualitas pelayanan antenatal 10 T terutama kualitas tes laboratorium (pemeriksaan Hb, golongan darah, dan glukoprotein)	1 Menyiapkan sarana dan prasana pendukung Antenatal care yang terstandar dan berkualitas

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
		<p>2 Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum maksimal</p> <p>3 Masih minimnya sarana dan SDM terlatih dalam penggunaan alat Ultrasonografi (USG) yang menunjang pemeriksaan terutama dalam memenuhi standar kualitas penentuan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)</p> <p>4 Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program terkait belum maksimal seperti program imunisasi, program Penyakit Tidak</p>	<p>2 Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu</p> <p>3 Membuat master plan untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang akan melayani pemeriksaan kehamilan menggunakan alat USG</p> <p>4 Memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pelayanan kesehatan ibu hamil</p>
		<p>Menular (PTM), program HIV, program hepatitis, program TB, dan program malaria belum maksimal</p>	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<p>1 Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin belum maksimal terutama pengadaan Buku KIA</p> <p>2</p>	<p>1 Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dengan memaksimalkan anggaran BOK Puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil</p> <p>2</p>
		<p>3 Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum maksimal</p> <p>4</p>	<p>3 Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu</p> <p>4</p>
		<p>Keterbatasan anggaran dalam mengadakan alat kesehatan, obat, dan BHP dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin</p>	<p>Memperkuat koordinasi dengan pihak desa terkait penggunaan dana desa dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu bersalin</p>

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
		Koordinasi lintas program terkait belum maksimal seperti program imunisasi, program Penyakit Tidak Menular (PTM), program HIV, program hepatitis, program TB, dan program malaria	Memperkuat koordinasi lintas program dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir belum maksimal	1 Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir
		2 Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum maksimal	2 Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu
		3 Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan yang diusulkan dalam sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tidak dapat terealisasi	3 Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun berikutnya
		4 Koordinasi dengan program terkait seperti program imunisasi belum maksimal	4 Memperkuat koordinasi dengan petugas yang menangani program terkait dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1 Data sasaran Balita yang tidak sesuai dengan jumlah Balita di lapangan	1 Data sasaran disesuaikan dengan jumlah Balita di lapangan
		2 Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum	2 Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan
		Maksimal	tepat waktu

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
		3 Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	3 Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan Balita pada tahun berikutnya
		4 Masih kurangnya kepedulian ibu yang memiliki Balita untuk datang ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Balita	4 Membuat inovasi yang dapat meningkatkan minat ibu untuk tetap memantau tumbuh kembang Balita
		5 Koordinasi dengan program terkait seperti program imunisasi belum maksimal	5 Memperkuat koordinasi dengan petugas yang menangani program terkait dalam pelayanan kesehatan Balita
		6 Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan Balita belum maksimal terutama dalam pelayanan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang Balita dan manajemen terpadu Balita sakit	6 Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada	1 Masih rendahnya kerjasama	1 Melakukan koordinasi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
	Usia Pendidikan Dasar	pengelola program dengan pihak sekolah dalam kegiatan anak usia pendidikan dasar	dengan pihak sekolah dan melakukan penjadwalan kunjungan ke sekolah dalam pelayanan kesehatan (skrining)
		2 Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	2 Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar pada tahun berikutnya
		3 Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan pendidikan dasar belum maksimal	3 Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan pendidikan dasar
		4 Keterbatasan waktu petugas karena merangkap tugas lain sehingga siswa yang tidak hadir pada saat jadwal pemeriksaan atau pelayanan kesehatan dilakukan tidak mendapat skrining	4 Seluruh siswa harus hadir pada saat pelayanan kesehatan dilakukan, cara yang dilakukan yaitu dengan membuat surat pemberitahuan adanya kegiatan skrining kesehatan dilakukan
		5 Masih adanya penolakan dari sekolah ketika kegiatan penjangkaran kesehatan pendidikan dasar dilakukan	5 Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menginformasikan ke sekolah bahwa ada kegiatan penjangkaran kesehatan sehingga sekolah menerima kunjungan petugas kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 Kunjungan pelayanan kesehatan usia produktif ke fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal	1 Meningkatkan kunjungan masyarakat usia produktif ke fasilitas pelayanan kesehatan
		2 Koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama usia produktif untuk memeriksakan kesehatannya	2 Melakukan promosi kesehatan/penyuluhan terkait pelayanan kesehatan usia produktif
		3 Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh	3 Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menunjang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
		kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	pencapaian pelayanan kesehatan pada usia produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan lanjut usia dasar belum maksimal	1 Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan usia lanjut
		2 Usia lanjut yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagian masih harus didampingi oleh keluarga sehingga angka kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal	2 Membuat kunjungan rumah atau home visit agar sasaran pelayanan kesehatan usia lanjut dapat dijangkau
		3 Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	3 Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut
		4 Koordinasi dengan lintas program terkait pelayanan kesehatan usia lanjut belum maksimal	4 Meningkatkan koordinasi dengan program di Bidang P2P
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1 Kunjungan pelayanan kesehatan penderita hipertensi ke fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal	1 Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi ke fasilitas pelayanan kesehatan
		2 Koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum maksimal	2 Melakukan promosi kesehatan/penyuluhan terkait pelayanan kesehatan penderita hipertensi
		3 Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	3 Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi
		4 Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam	4 Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
		<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>menyebabkan tidak seluruh kegiatan pelayanan kesehatan DM yang diusulkan dapat terealisasi</p>	<p>penderita hipertensi</p> <p>1 Merancang inovasi untuk meningkatkan deteksi dini penyakit DM</p> <p>2 Meningkatkan pengetahuan penderita hipertensi mengenai pengobatan DM yang tepat</p> <p>3 Melakukan efisiensi dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan pencapaian pelayanan kesehatan penderita DM</p>
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<p>1 Kunjungan penderita DM ke fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal</p> <p>2 Minimnya pengetahuan penderita DM tentang farmakologi obat sehingga berpikir bahwa rutin minum obat DM akan merusak ginjal</p>	<p>1 Merancang inovasi untuk meningkatkan deteksi dini penyakit DM</p> <p>2 Meningkatkan pengetahuan penderita hipertensi mengenai pengobatan DM yang tepat</p>
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<p>1 Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 tidak dapat terpenuhi</p> <p>2 Koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ODGJ belum maksimal</p> <p>3 Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang diusulkan tidak dapat ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga target program tidak tercapai secara maksimal</p>	<p>1 Melakukan pendataan penderita ODGJ berdasarkan data riil di wilayah kerja Puskesmas</p> <p>2 Penguatan komitmen untuk tetap memprioritaskan pelaksanaan pelayanan kesehatan penderita ODGJ</p> <p>3 Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan kesehatan ODGJ dan berkoordinasi dengan lintas perangkat daerah terkait pendanaan penanganan ODGJ</p>
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<p>1 Belum semua terduga tuberkulosis mampu mengeluarkan dahak pada</p>	<p>1 Memberikan pengetahuan bagi terduga tuberkulosis agar dahaknya dapat</p>

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
		saat pemeriksaan dengan Tes Cepat Molekuler (TCM)	diperiksa dengan TCM
		2 Terduga tuberkulosis yang terdaftar tidak lagi datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan	2 Melakukan kunjungan rumah untuk menjangkau kontak erat atau terduga tuberkulosis
		3 Terbatasnya biaya orang terduga tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti foto Rontgen	3 Mengupayakan kerjasama dengan pihak swasta agar orang terduga tuberkulosis mendapat kemudahan dalam mendapatkan pemeriksaan penunjang dan melakukan pemantauan berkelanjutan melalui kader tuberkulosis
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1 Realisasi anggaran kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tidak sesuai dengan rencana aliran kas yang telah dirumuskan pada saat perencanaan	1 Melakukan koordinasi dengan perencanaan dan keuangan dalam hal prioritas anggaran kegiatan penunjang SPM dan aliran kas agar anggaran dapat dicairkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
		2 Kurangnya koordinasi antara petugas program dalam pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	2 Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor
		3 Minimnya anggaran untuk skrining maupun penjangkauan terhadap ODHIV sehingga kegiatan skrining HIV di fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal	3 Meningkatkan peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam hal ketersediaan dana pendukung dalam skrining dan penjangkauan ODHIV
		4 Sasaran yang ditetapkan berdasarkan delapan kelompok sasaran masih	4 Melakukan mobile clinic ke hotspot kelompok kunci di wilayah fasilitas pelayanan kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4
		terlalu tinggi	
		5 Masih adanya pergantian petugas kesehatan dalam program HIV	5 Membuat kebijakan agar adanya transfer knowledge bagi petugas kesehatan lainnya sebelum pemegang program HIV diganti

C. Urusan Pekerjaan Umum

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pekerjaan umum.

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan public yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Pelayanan ini bertujuan untuk menyediakan layanan yang penting bagi kehidupan sehari-hari penduduk, seperti pemenuhan kebutuhan akan air minum. Pelayanan dasar ini merupakan bagian integral dari tugas pemerintah dalam menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk Negara tersebut.

Pelayanan dasar yang dilaksanakan untuk urusan pekerjaan umum oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang terbagi 2 (dua) yaitu Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan komponen pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang berdasarkan kepada indikator persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum yaitu melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.
- b. Jenis pelayanan untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga Negara dan diberikan melalui Sistem Pengolahan air limbah domestik setempat (SPALD-S) yang berupa penyusunan rencana, kebijakan, strategi, pengelolaan skala pemukiman sub sistem pengolahan setempat, operasi dan pemeliharaan, supervise pembangunan skala pemukiman.

2. Target Pencapaian SPM

Target capaian berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

c.

3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang untuk Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah sebesar Rp. 48.248.212.688,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Tahun Anggaran 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. DELI SERDANG				48,248,212,688	48,248,212,688	100.00 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				29,399,286,198	29,399,286,198	100.00 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638				29,399,286,198	100.00 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	<u>382,456,028</u>	<u>382,456,028</u>	100.00 %
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	<u>358,736,000</u>	<u>358,736,000</u>	100.00 %
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	<u>7,063,491,450</u>	<u>7,063,491,450</u>	100.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	5,227,086,568	5,227,086,568	100.00 %
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		217,650,468	217,650,468	100.00 %
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	13,004,234,036	13,004,234,036	100.00 %
		8	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		3,145,631,648	3,145,631,648	100.00 %
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			pelaksanaan kerja sama SPAM				
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				29,399,286,198	29,399,286,198	100.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	JUMLAH PROGRAM				29,399,286,198	29,399,286,198	100.00 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				18,848,926,490	18,848,926,490	100.00 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639			18,848,926,490	18,848,926,490	100.00 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	<u>207,358,960</u>	<u>207,358,960</u>	100.00 %
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan /perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	<u>0</u>	<u>0</u>	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		5	Rehabilitasi/peningkatan /perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	<u>488,604,000</u>	<u>488,604,000</u>	100.00 %
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	<u>15,922,560,387</u>	<u>15,922,560,387</u>	100.00 %
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		<u>1,978,765,087</u>	<u>1,978,765,087</u>	100.00 %
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		<u>10,234,920</u>	<u>10,234,920</u>	100.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			terpusat skala permukiman				
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	241,403,136	241,403,136	100.00 %
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				18,848,926,490	18,848,926,490	100.00 %
	JUMLAH PROGRAM				18,848,926,490	18,848,926,490	100.00 %

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Adapun rincian personil yaitu PNS Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Urusan Pekerjaan Umum dengan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan sebagai berikut:

a. Kualifikasi Pendidikan

Tabel 4.13
Komposisi Personil Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah(Orang)
1.	S-3	-
2.	S-2	4
3.	S-1	42
4.	Diploma III	4
5	SLTA	17
6	SLTP	-
Jumlah		67

b. Pangkat dan golongan PNS

Tabel 4.14
Komposisi Personil Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	2
2.	Golongan III	29
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	-
5	Non PNS	31
Jumlah		67

Sumber data: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Deli Serdang 2023

5. Realisasi

Capaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 4.15
Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5285	5285	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
			-1	-2	-3	
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	1057	1057	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	420	420	0	100.00 %
	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	7	7	0	100.00 %
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau)	Rumah Tangga	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	1,485	1,485	0	400.00 %	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3732	3732	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	933	933	0	100.00 %
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	933	933	0	100.00 %
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	933	933	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	0	0	0	0%
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	0	0	0	0%
	JUMLAH	2,799	2,799	0	300.00 %	

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Deli Serdang baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

1. Keterbatasan air baku aman

Keterbatasan air baku dapat timbul dari beberapa factor, termasuk pertambahan penduduk, perubahan iklim, polusi, serta pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien. Beberapa sumber air baku yang umum digunakan adalah sungai, mata air, dan sumur bor.

Sungai, mata air dan sumur bor dapat terkena dampak dari polusi lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan industri, pertanian dan permukiman. Polusi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan mengancam kesehatan manusia jika digunakan sebagai sumber air baku.

Pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan pemanfaatan air baku yang berlebihan. Jika sumber daya air tidak dikelola dengan baik, maka sumber air tersebut dapat habis atau menipis, menyebabkan kekeringan dan ketidakstabilan pasokan air.

Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola curah hujan dan siklus alam, sehingga mengurangi ketersediaan air baku, fenomena ini dapat menyebabkan kekeringan lebih sering terjadi.

Terkadang, sumber air baku yang memadai mungkin ada di suatu wilayah, tetapi masalah aksesibilitas fisik dan infrastruktur yang kurang memadai dapat menjadi penghambat untuk mendapatkan air bersih.

2. Database pengguna air minum/air bersih yang ada belum relevan dengan kondisi saat ini

Data yang tidak akurat atau usang dapat menyebabkan masalah dalam mengelola pasokan air dan pemeliharannya. Ini bisa terjadi karena kurangnya update data secara berkala atau kurangnya validasi data yang masuk.

b. Solusi

1. Untuk mengatasi masalah keterbatasan air baku aman, maka diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penyediaan Air Baku Aman. Diperlukan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan untuk menghindari penurunan sumber daya air. Infrastruktur juga perlu ditingkatkan untuk mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan air baku dengan efisien. Ini bisa mencakup pembangunan bendungan, saluran air dan sistem pengolahan air bersih.

2. Untuk mengatasi masalah data pengguna air minum/ air bersih yang belum relevan, maka diperlukan updating pendataan sarana air minum/bersih di Kabupaten Deli Serdang

D. Urusan Perumahan Rakyat

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan rakyat.

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan dasar yang dilaksanakan berdasarkan bidang urusan perumahan rakyat terbagi 2 yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota sedangkan komponen pelayanan yang di berikan adalah sebagai berikut:

1. Jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana antara lain:
 - (1) Pembangunan baru/pembangunan kembali rumah yang terkena bencana.
 - (2) Pembangunan baru rumah yang layak huni yang harus di relokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
 - (3) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat pada lokasi yang sama.
 - (4) Rehabilitasi dengan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
 - (5) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.
2. Jenis pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah antara lain:
 - (1) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dalam rangka mendukung:
 - Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha dan atau
 - Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

2. Target Pencapaian SPM

Target capaian berdasarkan indikator standar pelayanan minimal bidang urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16

Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu (Tahun)
		Indikator	Nilai (%)	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban yang bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	2023
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100	2023

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pencapaian target SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah Rp. 3.627.431.100,-. Alokasi Anggaran tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.17

Alokasi Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	P R O G R A M	K E G I A T A N	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERA PAN	
-1	- 2	- 3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. DELI SERDANG				3,627,431,100	1,632,338,310	45.00 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				3,627,431,100	1,632,338,310	45.00 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program			976,864,680	911,485,860	93.31 %

		Kabupaten/Kota K2023340				
	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	926,899,340	903,015,860	97.42 %
	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	49,965,340	8,470,000	16.95 %
	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				976,864,680	911,485,860	93.31 %
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			2,650,566,420	720,852,450	27.20 %
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	964,429,340	415,514,900	43.08 %
	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1,686,137,080	305,337,550	18.11 %
	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				2,650,566,420	720,852,450	27.2

				0 %
	JUMLAH PROGRAM	3,627,431,100	1,632,338,310	45.00 %

4. Dukungan Personil

Rincian PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dengan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan PNS adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Pendidikan

Tabel 4.18

Kualifikasi Pendidikan Personil

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-2	1
2	S-1	15
3	Diploma III	4
4	SMA	10
Jumlah		30

2. Pangkat dan Golongan PNS

Tabel 4.19

Pangkat dan Golongan Personil

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	6
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-
5	Non PNS	21
Jumlah		30

5. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20
Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					21.24 %	
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					42.48 %	
Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
download SK yang telah di upload 1207-20230706042346sk bencana TW II.pdf							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	36.48 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		125	57	68	45.60 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					6.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0.00 %	
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	100	46	54	46.00 %	
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	25	11	14	44.00 %	
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0	0	0	0.00 %	
	JUMLAH	125	57	68	90.00 %		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	0.00 %	

		Yang Harus Dilaya ni	Yang Terla yani	Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		28	0	28	0.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumla h Mutu Yang Harus Dilaya ni / Dipenu hi	Juml ah Mutu Yang Terla yani / Terp enuh i	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	0.00 %	
1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0.00 % 0	
2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	0.00 % 0	
3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	7	0	7	0.00 % 0	
JUMLAH	7	0	7	0.00 %		

6. Permasalahan dan Solusi

Kabupaten Deli Serdang yang topografinya terdiri dari dataran rendah, dataran pantai dan dataran tinggi mengalami beberapa jenis bencana alam hampir setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BPS tahun 2021, frekuensi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Deli Serdang adalah banjir, piting beliung dan longsor. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memiliki beberapa permasalahan dalam menangani bencana alam tersebut. Masalah yang terjadi adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan

Berdasarkan identifikasi risiko operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Data perumahan di lokasi rawan bencana yang tidak valid. Masalah ini disebabkan belum terlaksananya pendataan secara koheren pada setiap perumahan dan kawasan permukiman di lokasi rawan bencana. Dampak dari masalah ini adalah tindakan preventif dalam mencegah terjadinya kerusakan berulang pada perumahan dan kawasan permukiman yang berada pada lokasi rawan bencana.
- b. Bantuan material untuk rumah bencana terlambat atau tidak tersalurkan. Penyebab dari masalah ini adalah lokasi bencana sulit terjangkau, korban bencana sudah ditangani pihak lain/ditangani

secara mandiri, dan kerusakan material saat mobilisasi. Dampak dari masalah ini adalah rumah korban bencana terlambat dan bahkan tidak tertangani.

- c. Bantuan material tidak tepat jenis, jumlah dan mutu. Penyebab dari masalah ini adalah kurangnya koordinasi dengan pihak terkait penanganan bencana dan perfoma penyedia kurang baik. Dampak dari masalah ini adalah kualitas konstruksi tidak sesuai standar.

2. Solusi

- a. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak desa atau kelurahan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
- b. Melakukan survey ke lapangan secara berkala mengingatkan masyarakat yang masih mendirikan rumah atau tempat tinggal di lokasi rawan bencana dikarenakan masyarakat tidak sepenuhnya mengerti akan bahayanya mendirikan bangunan di lokasi rawan bencana.
- c. Bantuan rumah bencana yang terlambat atau tidak tersalurkan merupakan masalah yang terjadi pada tahap pelaksanaan, maka perlu adanya koordinasi antar berbagai pihak terkait agar kerusakan rumah korban bencana dapat tertangani dengan baik.
- d. Bantuan material tidak tepat jenis, jumlah dan mutuh merupakan masalah yang terjadi pada tahap monitoring dan evaluasi, maka perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait penanganan bencana agar material sesuai dengan yang dibutuhkan pada rumah korban bencana.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

1. Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal urusan Trantibumlinmas adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- 3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

2. Target Pencapaian SPM

Pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas 100% sebagai berikut:

Tabel 4.21
Target Pencapaian SPM dan Perangkat Daerah yang Menangani

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	Satpol PP
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	BPBD
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	BPBD
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	BPBD
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber data: Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2023

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Satpol Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran Tahun 2023 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 4.22

Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					-6	-7	
	KAB. DELI SERDANG				8,991,821,440	5,830,502,680	64.84 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				5,183,524,600	5,178,681,121	99.91 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			5,183,524,600	5,178,681,121	99.91 %
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	<u>1,088,400,000</u>	<u>1,088,377,500</u>	100.00 %
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	<u>111,600,000</u>	<u>111,540,000</u>	99.95 %
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Organis	<u>3,983,524,600</u>	<u>3,978,763,621</u>	99.88 %
	JUMLAH INDIKATOR				5,183,524,600	5,178,681,121	99.91 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			0	0	0.00 %

	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	La po ra n	0	0	0%
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	La po ra n	0	0	0%
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	La po ra n	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457		0	0	0.00 %
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	La po ra n	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM			5,183,524,600	5,178,681,121	99.91 %

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.23
Alokasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	PROG RAM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. DELI SERDANG				8,991,821,440	5,830,502,680	64.84 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				5,183,524,600	5,178,681,121	99.91 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			5,183,524,600	5,178,681,121	99.91 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				0	0	0.00 %
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			0	0	0.00 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2023447			0	0	0.00 %

		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%

		JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			0	0	0.00 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
		JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			0	0	0.00 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				0	0	0.00 %

Alokasi anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran tahun 2023 sebesar Rp. 3.748.096.840 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.24

Alokasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	PROGRA M	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. DELI SERDANG				8,991,821,440	5,830,502,680	64.84 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				5,183,524,600	5,178,681,121	99.91 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				0	0	0.00 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				3,808,296,840	651,821,559	17.12 %
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			3,748,096,840	591,626,559	15.78 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	14,850,000	10,010,000	67.41 %
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3,154,200,840	230,466,635	7.31 %
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	465,000,000	265,407,500	57.08 %

	6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0	0%
	7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	114,046,000	85,742,424	75.18 %
	10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				3,748,096,840	591,626,559	15.78 %
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			60,200,000	60,195,000	99.99 %
	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	60,200,000	60,195,000	99.99 %
	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				60,200,000	60,195,000	99.99 %
3	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			0	0	0.00 %

	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			0	0	0.00 %
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0	0	0%
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0	0	0%
	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			0	0	0.00 %
	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%

	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	4	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
JUMLAH PROGRAM				3,808,296,840	651,821,559	17.12 %

4. Dukungan Personil

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) perangkat daerah yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Pemadam Kebakaran

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh personil sebanyak 182 orang. Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d Bulan Desember 2023 adalah 183 orang dengan status sebagai berikut :

- a) Pegawai Negeri Sipil : 60 Orang
- b) Non Pegawai Negeri Sipil : 117 Orang
- c) PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 6 Orang
- d) PPNS Unit Kerja lainnya : 0 Orang

Rincian Pegawai Satpol PP dengan tingkat pendidikan dan pangkat/ golongan PNS

- a) Kualifikasi Pendidikan

Tabel 4.25
Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	PNS)	NON PNS	Jumlah (orang)
1.	S-3	-	-	-
2.	S-2	4	-	4
3.	S-1	31	14	45
4.	Diploma III	1	5	6
5.	SLTA	30	96	126
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	2	2
Jumlah		66	116	183

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang 2023

- b) Pangkat dan Golongan PNS

Tabel 4.26
Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah(Orang)
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	31
3.	Golongan II	29
4.	Golongan I	-
Jumlah		66

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang 2023

- c) Jumlah eselon :
- 1) Eselon II : 1 orang
 - 2) Eselon III : 5 orang
 - 3) Eselon IV : 14 orang
 - 4) Fungsional Pol-PP : 28 orang
 - 5) JFU : 21 orang

Pelaksanaan SPM urusan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2022 didukung oleh personil ASN sebanyak 16 orang, non PNS sebanyak 14 orang dan relawan satgas sebanyak 12 orang.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran pada Tahun 2023 di 7 pos yang ada didukung oleh personil sebanyak 110 orang. Jumlah keseluruhan Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang per Januari sampai dengan bulan Desember 2023 adalah 148 Orang dengan status sebagai berikut:

- a) Pegawai negeri Sipil : 51 Orang
- b) Non Pegawai Negeri Sipil : 97 Orang

Rincian Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang dengan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan PNS:

- a) Kualifikasi Pendidikan

Tabel 4.27
Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	4
2	S 1	21
3	D III	1
4	SLTA	24
5	SLTP	1
	Jumlah	51

b). Jumlah eselon

Tabel 4.28
Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	4
4	Kasi	12
5	Kasubbag	3
	Jumlah	21

c). Pangkat/Golongan PNS

Tabel 4.29
Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	4	-	4	
4	III/d	2	1	3	
5	III/c	7	1	8	
6	III/b	1	1	2	
7	III/a	12	-	12	
8	II/d	18	-	18	
9	II/c	-	-	-	
10	II/b	1	-	1	
11	II/a	-	-	-	
12	I/d	1	-	1	
13	1/a	-	-	-	
	Jumlah PNS	48	3	51	
	Non PNS				
14	Honorar	94	3	97	
	Jumlah Non PNS	94	3	97	
	Jml PNS + Honorar + Tenaga Kontrak	142	6	148	

5. Realisasi

Capaian Standar Pelayanan Minimal urusan Trantibumlinmas pada tahun 2023 sebesar 92,87 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.30
Capaian Standar Pelayanan Minimal

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			92.87 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				92.87 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	21,174	21,174	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			12.87 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	64.34 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit 120	116	4	96.67 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Do ku me n 5	5	0	100.00 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	ora ng 300	182	118	60.67 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Do ku me n 0	0	0	0%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	ora ng 0	0	0	0%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	ora ng 0	0	0	0%

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
N o	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencap aian
-1	-2		-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			95.81 %
01. 00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					95.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		6,541	6,541	0	100.00 %
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			15.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhk an	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	75.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	do ku me n	1	0	1	0%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	ora ng	6,541	6,541	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	ora ng	6,541	6,541	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	uni t	38	38	0	100.00 %
02. 00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					96.44 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		6,541	6,541	0	100.00 %
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			16.44 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhk an	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	82.22 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	uni t	12	12	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga	Or an g	45	29	16	64.44 %

	Negara yang berada di kawasan rawan bencana)					
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					96.00 %
	Ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		6,541	6,541	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	81	81	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	6,541	6,541	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	81	81	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	6,541	6,541	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			96.09 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.09 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		532	532	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.09 %
			Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	80.47 %

			Barang / Jasa Yang Dibutuhk an	Barang / Jasa Yang Tersedia	Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	lay an an	532	402	130	75.56 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	do ku me n	6	6	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Uin it	192	192	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Or an g	151	11	140	7.28 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	lay an an	532	532	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	lay an an	532	532	0	100.00 %

6. Permasalahan dan Solusi

a. Satuan Polisi Pamong Praja

1) Permasalahan

- Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se Kabupaten Deli Serdang.
- Jumlah PPNS dan PNS dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang yang minim/kurang memadai.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada.
- Kurangnya SDM dan sarana prasarana di Satpol=PP dalam mengumpulkan data.
- Kurangnya kemampuan untuk menghitung item penganggaran barang/jasa SDM yang dibutuhkan di Satpol-PP.
- Adanya pengurangan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan di Satpol-PP tidak dapat terlaksana dengan maksimal

2) Solusi

- Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.
- Merencanakan penambahan personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dan pengikutsertaan aparatur dalam pendidikan PPNS dan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja.
- Mengadakan pembinaan dan sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat.
- Menyusun perencanaan penambahan personil dan sarana prasarana di Satpol-PP.
- Melaksanakan koordinasi antar instansi Satpol_PP di kabupaten/kota dan mengikuti bimtek barang jasa.
- Menyusun kembali perencanaan penganggaran dengan memprioritaskan program kegiatan terhadap pencapaian SPM.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 di Kabupaten Deli Serdang baik permasalahan internal maupun eksternal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.31
Permasalahan dan Solusi Penerapan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	P5rmasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Kurangnya informasi rawan bencana kepada masyarakat	Menyiapkan sarana dan prasarana informasi rawan bencana	Membuat usulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi rawan bencana kepada masyarakat	Belum maksimalnya koordinasi dengan OPD dan stake holder terkait untuk melakukan pengembangan informasi rawan bencana	Melakukan koordinasi dengan OPD dan stake holder terkait untuk melakukan pengembangan informasi rawan bencana	Melakukan rapat koordinasi dengan stake holder terkait membahas pelayanan informasi bencana kepada masyarakat	Keterbatasan anggaran akibat refocussing	Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan informasi rawan bencana pada tahun berikutnya	Menguatkan pembiayaan pelayanan informasi rawan bencana dari pihak ketiga

						rawan bencana				
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kurangnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Membuat usulan pengadaan sarana pendukung untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum maksimalnya koordinnasi dengan OPD dan stake holder terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Melakukan koordinasi dengan OPD dan stake holder terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Melakukan rapat koordinasi dengan OPD dan stake holder untuk membahas pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keterbatasan anggaran akibat refocussing	Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Menguatkan pembiayaan dengan pihak ketiga dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3.	Pelayanan penyelamatan dan	Kurangnya perlengkapan dan peralatan serta personil	Menambah perlengkapan dan peralatan	Membuat usulan pengadaan perlengkapan dan	Belum maksimalnya koordinasi dalam penanggulangan	Melakukan koordinasi dengan OPD dan	Melakukan Latihan Gabungan Penanggulangan Bencana	Keterbatasan anggaran akibat refocussing	Merencanakan kembali yang mendukung pelayanan penyelamata	Menguatkan pembiayaan dengan pihak ketiga

	evakuasi korban bencana	penanggulangan bencana	serta personil penanggulangan bencana	peralatan serta penambahan personil penanggulangan bencana	an bencana dengan OPD dan stakeholder terkait	stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana			n dan evakuasi korban bencana	dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana
--	-------------------------	------------------------	---------------------------------------	--	---	--	--	--	-------------------------------	--

C. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 4.32
Permasalahan dan Solusi Penerapan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
Sarana prasarana yang belum memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan pemadaman dan penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran.	Mengajukan alokasi anggaran Berkaitan sarana prasarana tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.	Mengusulkan penambahan anggaran sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2021 dan Nomor 114 Tahun 2018
Jumlah PNS dan P2K dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang yang minim/kurang memadai dan belum memiliki sertifikasi/kompetensi yang menunjang pelaksanaan tugas pelayanan;	Merencanakan,menambahkan personil anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang dan pengikutsertaan aparatur dalam Pendidikan /diklat dasar Pemadam Kebakaran;	Mengusulkan penambahan personil sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018;
Jauhnya jangkauan wilayah manajemen kebakaran dari pos pemadam yang tersedia;	Mengadakan sosialisasi terkait relawan pemadam kebakaran ke kecamatan dan pemberdayaan masyarakat;	Meningkatkan koordinasi yang baik dengan daerah perbatasan, pemadam kebakaran tingkat provinsi, Kab/Kota;

F. Urusan Sosial

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial.

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan dasar yang dilaksanakan bidang sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar bidang sosial daerah penyandang dasar bidang sosial kabupaten/kota yaitu:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial;
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar panti yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara memberikan dukungan layanan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan/pendampingan kepada penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan pengemis.

Sedangkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana, dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima layanan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial

2. Target Pencapaian SPM

Dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dengan mempedomani Peraturan Kementerian Sosial yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.33
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target (%)
		Indikator	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100
		Persentase penyandang	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target (%)
		Indikator	
		disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia di luar panti Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan pengemis di luar panti Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100

Adapun pembiayaan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dipergunakan dalam bentuk pelayanan:

- a. Layanan Data dan Pengaduan;
- b. Layanan Kedaruratan;
- c. Penyediaan Permakanan;
- d. Penyediaan Sandang;
- e. Penyediaan Alat Bantu;
- f. Fasilitasi Pembuatan Dokumen K;
- g. Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;

- h. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- i. Layanan Reunifikasi; dan
- j. Layanan Rujukan

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34
Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM

No	PROGRA M	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
					-6	-7	
			KAB. DELI SERDANG		807,585,287	441,850,600	54.71 %
1			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		807,585,287	441,850,600	54.71 %
	1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152		406,547,062	159,958,900	39.35 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	139,632,000	60,399,200	43.26 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	42,842,990	2,774,700	6.48 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	202,000,000	86,385,000	42.76 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	12,844,272	8,545,000	66.53 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	0%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%

		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	9,227,800	1,855,000	20.10 %
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					406,547,062	159,958,900	39.35 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153				401,038,225	281,891,700	70.29 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	285,900,000	221,304,200	77.41 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	73,868,000	36,655,000	49.62 %
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	17,700,225	17,625,000	99.58 %
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	19,570,000	4,947,500	25.28 %
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	4,000,000	1,360,000	34.00 %
JUMLAH INDIKATOR					401,038,225	281,891,700	70.29 %
JUMLAH PROGRAM					807,585,287	441,850,600	54.71 %

Selain anggaran pada Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana, kegiatan pemenuhan SPM juga menggunakan anggaran di Sekretariat, yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 331.908.400,- yang dipergunakan untuk pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, Layanan Reunifikasi, dan Layanan Rujukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Selain itu, anggaran tersebut juga dipergunakan untuk mendukung Kegiatan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, dan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan untuk korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Deli Serdang.

4. Dukungan Personil

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Deli Serdang yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.35
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023

No	PSKS	Jumlah
1	Pendamping PKH	118
2	Pekerja Sosial Profesional	2
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	22
4	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	35
5	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	43
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	19
7	Karang Taruna	106
8	LKS	111

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) internal pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dari kondisi jumlah pegawai berdasarkan data sampai dengan bulan Desember 2023, jumlah pegawai Dinas sosial sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.36
Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

No	Uraian	Laki -Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pejabat Struktural			
	- Eselon II	1	-	1
	- Eselon III	3	2	5
	- Eselon IV	2	1	3
2	Pejabat Fungsional	2	10	12
3	Staf	2	3	5
Jumlah		10	16	26

Komposisi Sumber daya Manusia (SDM) berdasarkan strata pendidikan adalah seperti tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4.37
Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

No	Uraian	Laki -Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	3	1	4
2	S-1	6	13	19
3	Diploma III	-	1	1
4	Diploma IV	-	-	-
2	SLTA	1	1	2
Jumlah		11	16	26

5. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dapat dilihat melalui capaian indicator kinerjanya dengan menggunakan formulasi/rumus yaitu:

- a. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi jumlah pupolasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial khususnya gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali seratus persen (100%);
- b. Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi populasi Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dikali seratus persen (100%).

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.38

Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			75.76 %	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					46.15 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	44.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		40	22	18	55.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					2.15 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	10.77 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	40	11	29	27.50 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	40	0	40	0.00 %	
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	40	1	39	2.50 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	40	1	39	2.50 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	40	22	18	55.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	40	4	36	10.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	40	1	39	2.50 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	40	8	32	20.00 %	

	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	40	1	39	2.50 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	40	0	40	0.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	40	2	38	5.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	40	0	40	0.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	40	5	35	12.50 %	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					60.81 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	57.14 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		35	25	10	71.43 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					3.67 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	18.33 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	35	25	10	71.43 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	35	0	35	0.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	35	9	26	25.71 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	35	5	30	14.29 %	
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	35	0	35	0.00 %	

	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	35	0	35	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	35	0	35	0.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	35	14	21	40.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	35	5	30	14.29 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	35	9	26	25.71 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	35	8	27	22.86 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	35	2	33	5.71 %	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					85.38 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		20	20	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					5.38 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	26.92 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	20	20	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	20	0	20	0.00 %	

	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	20	10	10	50.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	20	8	12	40.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	20	0	20	0.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	20	0	20	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	20	0	20	0.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	20	0	20	0.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	20	3	17	15.00 %	
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	20	1	19	5.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	20	15	5	75.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20	3	17	15.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	20	10	10	50.00 %	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					86.44 %	
	Ya ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khusus nya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		60	60	0	 100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					6.44 %	

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	32.22 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM						
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	60	60	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	60	4	56	6.67 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	60	41	19	68.33 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	60	38	22	63.33 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	60	9	51	15.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	60	2	58	3.33 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	60	2	58	3.33 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	60	7	53	11.67 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	60	5	55	8.33 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	60	34	26	56.67 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	60	23	37	38.33 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	60	7	53	11.67 %	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana					100.00 %	

Kabupaten/Kota						
Ya Terjadi Bencana						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2000	2000	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
1 . Penyediaan permakanan	Orang	2000	2000	0	100.00 %	
2 . Penyediaan sandang	Orang	2000	2000	0	100.00 %	
3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	4	4	0	100.00 %	
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	250	250	0	100.00 %	
5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2000	2000	0	100.00 %	

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum ada database Pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS), khususnya data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis se Kabupaten Deli Serdang yang valid dan akurat.
- Kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap SDM dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang sosial.
- Keterbatasan SDM dalam menghitung target penerimaan layanan dan mutu layanan.
- Keterbatasan SDM sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data.
- Belum optimalnya peran potensi dan Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial.
- Tempat penampungan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar (ODGJ) yang masih terbatas

Solusi:

- a. Perlu adanya pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS), khususnya data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis yang dilakukan pada 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.
- b. Mengajukan usulan ke instansi terkait untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan pembinaan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- d. Perlu adanya tempat penampungan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar (ODGJ, baik yang ada di masyarakat maupun di Panti.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**BAB V
PENUTUP**



**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**

BAB V

PENUTUP

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Uraian yang telah dikemukakan pada Bab-bab Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang. Laporan yang telah disusun juga diharapkan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas-tugas pemerintahan.

Laporan ini merupakan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta merupakan gambaran pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana indikator yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga merupakan informasi bagi pemerintah atasan dan masyarakat tentang berbagai masalah yang masih perlu diperbaiki pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun 2023 masih terdapat berbagai kekurangan untuk menyahuti aspirasi masyarakat namun dengan semangat pengabdian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan berkat dukungan berbagai pihak terus berupaya mewujudkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kiranya LPPD ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya pada kurun waktu tahun 2023.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini kami perbuat sebagai salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada

Pemerintah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua.